



**KEGIATAN PERCEPATAN
PENYEDIAAN DATA STATISTIK
DALAM RANGKA KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN
TAHUN 2009**



BADAN PUSAT STATISTIK

**KEGIATAN PERCEPATAN PENYEDIAAN DATA STATISTIK
DALAM RANGKA KEBIJAKAN DANA PERIMBANGAN TAHUN 2009**

KATA PENGANTAR

Seperti tahun-tahun sebelumnya, Badan Pusat Statistik diminta Pemerintah melalui Menteri Keuangan dengan surat Dirjen Perimbangan Keuangan Nomor : S-31/MK.07/2008 tanggal 12 Pebruari 2008 untuk menyiapkan data yang akan dijadikan dasar alokasi Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2009. Data dasar tersebut terdiri dari : Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2007, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita 2007, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2008.

Salah satu keputusan rapat Panitia Kerja Dana Perimbangan DPR RI dan Pemerintah pada bulan Mei 2003, dalam rangka Dana Alokasi Umum (DAU) 2004 dan tahun-tahun selanjutnya, adalah meningkatkan akurasi data dasar penghitungan DAU. Sehubungan dengan hal tersebut maka BPS telah melakukan upaya untuk meningkatkan kualitas data, antara lain dengan melakukan pengecekan lapangan dan konsolidasi berupa diskusi antara petugas pengumpul data di seluruh kabupaten/kota dengan petugas BPS Provinsi dan BPS Pusat yang dilakukan di masing-masing provinsi. Dari pengecekan lapang dan diskusi tersebut diharapkan diperoleh data yang valid, akurat, dan terkini.

Buku laporan ini terdiri dari: Pendahuluan, Penjelasan Teknis (*Technical Notes*), dan Tabel Ringkasan (*Summary Table*) yang berisi data dasar empat variabel yaitu : Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008, Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2007, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Perkapita 2007, dan Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) 2008.

Jakarta, Oktober 2008

Tim Kegiatan Percepatan Penyediaan Data Statistik
Dalam Rangka Kebijakan Dana Perimbangan Tahun anggaran 2009
Badan Pusat Statistik

Pengarah : Pimpinan Badan Pusat Statistik

Anggota : Supriyanto, SE, MA
Wiwiek Arumwaty S, MSi
Dr. Wendy Hartanto
Bambang Sabarudin, MSc
Yomin Tofri, MA
Dra. Sri Kusumowati
Ir. Bagus Sumargo, MSi
Rini Savitri Dina, MA

Asisten : Margo Yuwono, MSi
Sunarno, MSi
M. Firmansyah Rifai, SE
Ika Luswara, S.Si

Penyiapan Naskah : Nur Indah Kristiani, S.Si
Ari Sugih Mulia, SE
Iis Hayyun Nurul Islam

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
I.PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Kualifikasi Data	1
1.3 Permasalahan	2
1.3.1 Cakupan	2
1.3.2 Sensus dan Survei	2
1.3.3 Waktu	3
1.4 Pelaksanaan.....	3
1.4.1 Jadwal Waktu	3
1.4.2 Kegiatan Lapang	3
1.4.3 Pengolahan dan Rekonsiliasi Data.....	4
1.5 Sistematika Penyajian Laporan.....	4
II.PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN 2008	5
2.1 Sumber Data	5
2.2 Konsep Penduduk	6
2.3 Metode Proyeksi	6
2.4 Rumus Proyeksi.....	7
2.5 Tahapan Penghitungan	7
III. INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA 2007.....	9
3.1. Pendahuluan	9
3.1. 1. Pengertian Pembangunan Manusia	9
3.1.2. Sumber Data	9
3.1.3. Komponen IPM dan Konsep	10
3.2. Metodologi.....	11
3.3. Tahapan Penghitungan	12
IV. INDEKS KEMAHALAN KONSTRUKSI (IKK)	16
4.1. Pendahuluan.....	16
4.1.1. Konsep dan Definisi	16
4.1.2 Ruang Lingkup dan Sumber Data	16
4.1.3 Kegiatan Pengumpulan Data	17
4.2 Metodologi	18
4.2.1 Paket Komoditas.....	19
4.2.2 Diagram Timbang (DT) atau Bobot.....	19
4.2.3 Formula Penghitungan	20

V. PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO	22
5.1 Pengertian dan Definisi	22
5.1.1 PDRB	22
5.1.2 Output	22
5.1.3 Input Antara.....	23
5.1.4 Nilai Tambah.....	23
5.1.5 Harga Berlaku	23
5.1.6 Harga Konstan	23
5.2 Ruang Lingkup dan Sumber Data	24
5.3 Kegiatan Pengumpulan Data.....	25
5.4 Metode Penghitungan	25
5.4.1 Pendekatan Produksi.....	25
5.4.2 Pendekatan Pengeluaran.....	25
5.4.3 Pendekatan Pendapatan	25
5.5 PDRB Kabupaten/Kota	26
5.6 PDRB untuk Penghitungan DAU	26
TABEL RINGKASAN	27
TABEL 1.1: DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU 33 PROVINSI, TAHUN 2009	
TABEL 1.2: DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU 451 KABUPATEN/KOTA, TAHUN 2009	
GRAFIK.....	43

I.PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Otonomi daerah yang dilaksanakan sejak 1 Januari 2001 memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada Daerah untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan di Daerah. Untuk mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah tersebut, kepada Pemerintah Daerah diberikan kewenangan untuk mendayagunakan potensi keuangan Daerah sendiri serta sumber keuangan lain seperti perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang berupa Dana Bagi Hasil Pajak dan Bukan Pajak, Dana Alokasi umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK).

Selama delapan tahun terakhir, DAU merupakan salah satu sumber pendapatan utama pendapatan Pemerintah Daerah. Azas kesenjangan fiskal (*fiscal gap*) yang mendasari penghitungan DAU memerlukan dukungan data yang valid, akurat dan terkini sehingga pembagian DAU ke daerah menjadi adil, proporsional dan merata. Sehubungan dengan keperluan tersebut maka BPS sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam UU Nomor 16 tahun 1997 tentang statistik, diminta untuk menyediakan data yang akan digunakan dalam penghitungan DAU 2009 dengan kualifikasi seperti tersebut di atas. Data tersebut adalah Jumlah penduduk, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) tingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

1.2 Kualifikasi Data

Berdasarkan Rapat Dengar Pendapat antara Komisi IX DPR dengan BPS pada tanggal 22 Januari 2003 mengusulkan agar BPS meningkatkan kualitas data untuk keperluan penghitungan DAU 2004 dan tahun-tahun selanjutnya. Peningkatan kualitas data tersebut meliputi: pertama,

meningkatkan validitas data agar dapat menggambarkan kondisi riil daerah yang sebenarnya dengan memperbaiki konsep dan definisi variabel; kedua, meningkatkan akurasi data dengan memperluas cakupan dan cara penghitungan; dan ketiga, pemutakhiran data dengan mempercepat pengumpulan data yang selama ini mengalami keterlambatan (*time gap*). Dalam upaya peningkatan kualitas data tersebut, maka BPS bekerjasama dengan Direktorat Jendral Anggaran dan Perimbangan Keuangan, Departemen Keuangan melakukan kegiatan percepatan penyediaan data variabel DAU yang mencakup data Jumlah Penduduk, IPM, IKK, dan PDRB Provinsi dan Kabupaten/Kota seluruh Indonesia.

1.3 Permasalahan

1.3.1 Cakupan

Kegiatan pengadaan dan percepatan data variabel DAU Tahun Anggaran 2009 ini mencakup wilayah yang sangat luas dengan tingkat keragaman yang tinggi, terdiri dari 451 Kabupaten/Kota yang terbagi dalam 33 Provinsi

1.3.2 Sensus dan Survei

Sensus dan survei yang merupakan sumber utama data BPS dilaksanakan pada periode tertentu (sebagai contoh Sensus Penduduk 10 tahun sekali, Susenas 3 tahun sekali, Survei Harga dan PDRB setiap tahun dengan cakupan terbatas). Sementara itu data yang dibutuhkan untuk penghitungan DAU bersifat tahunan dan mencakup semua wilayah administrasi kabupaten/kota. Hal ini menimbulkan masalah kesenjangan antara kebutuhan data dan ketersediaan data pada tingkat wilayah kecil. Untuk menutup kesenjangan ini, maka dilakukan penyesuaian (penambahan sampel), proyeksi dan proxy terhadap data hasil survei dan pengumpulan data

yang ada seperti P4B, Survei Harga Perdagangan Besar Bahan Bangunan/Konstruksi, Susenas dan sumber data lainnya.

1.3.3 Waktu

Waktu yang diperlukan dalam kegiatan pengumpulan data variabel DAU 2009, adalah selama 7 bulan mencakup proses pengumpulan data, pengolahan data dan penghitungan data DAU 2009.

1.4 Pelaksanaan

Pelaksanaan kegiatan penyediaan data IKK dan PDRB dilakukan di tingkat kabupaten/kota, provinsi dan BPS Pusat. Sedangkan kegiatan penyediaan data jumlah penduduk dan IPM dilakukan di BPS Pusat.

1.4.1 Jadwal Waktu

- a. Perencanaan integrasi kegiatan IKK dan SHPB-Konstruksi, Januari sampai dengan Mei 2008.
- b. Pengolahan dan rekonsiliasi data, April sampai dengan Agustus 2008
- c. Evaluasi hasil dan penyusunan laporan, September 2008
- d. Pencetakan hasil, Oktober 2008.

1.4.2 Kegiatan Lapangan

Dari empat variabel DAU yang dibutuhkan, hanya dua variabel yang lengkap cakupannya sampai dengan 451 Kabupaten/Kota yaitu Data Jumlah Penduduk dan Indeks Pembangunan Manusia. Dua variabel lain yaitu PDRB dan IKK masih dikumpulkan dari lapangan untuk melengkapi dan memperbaruinya. Dalam hal ini peranan BPS Daerah baik provinsi maupun Kabupaten/Kota sangat besar dalam proses pengumpulan data lapangan yang lengkap dan mutakhir.

1.4.3 Pengolahan dan Rekonsiliasi Data

Tingkat heterogenitas yang tinggi baik antar provinsi maupun antar kabupaten/kota dalam provinsi membutuhkan proses pengolahan data yang lama. Heterogenitas yang dimaksud adalah data variabel ekonomi menyebar dan berfluktuasi tidak sesuai dengan penyebaran wilayah administratif melainkan mengikuti jalur distribusinya. Oleh karena itu diperlukan adanya rekonsiliasi data Kabupaten/Kota dalam provinsi untuk menjaga konsistensi dan agregasi data.

1.5 Sistematika Penyajian Laporan

Laporan hasil pengadaaan data dasar DAU 2009 terdiri dari penjelasan teknis kegiatan masing-masing variabel, yaitu: Jumlah Penduduk, Indeks Pembangunan Manusia, IKK dan PDRB yang dirangkum menjadi satu.

Dalam laporan ini juga dilengkapi dengan tabel ringkasan (*summary table*) yang berisi data dasar empat variabel yang digunakan dalam penghitungan DAU 2009. Selain itu, laporan ini dilengkapi dengan suplemen yang berisi data komponen IPM dan PDRB atas dasar harga berlaku serta harga konstan, dengan migas maupun tidak dengan migas. Data-data tersebut disajikan menurut kabupaten/kota maupun provinsi.

II. PENDUDUK PERTENGAHAN TAHUN 2008

Jumlah penduduk merupakan salah satu variabel penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU). Data penduduk yang dibutuhkan adalah jumlah penduduk per kabupaten/kota kondisi pertengahan tahun. Sejauh ini, proyeksi penduduk yang dihitung BPS hanya tersedia secara nasional dan tingkat propinsi. Oleh sebab itu, sejak tahun 2003 BPS mulai melakukan penghitungan proyeksi/estimasi penduduk per kabupaten/kota untuk memenuhi kebutuhan data dasar penduduk untuk keperluan penghitungan DAU. Berbeda dengan proyeksi penduduk nasional dan per propinsi yang dihitung dengan metode komponen, maka data penduduk per kabupaten/kota ini dihitung dengan metode Geometrik. Pada saat hasil Sensus Penduduk maupun Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) yang terakhir tersedia, maka hasil tersebut dipakai sebagai data dasar penduduk untuk memproyeksikan penduduk per kabupaten/kota tahun-tahun berikutnya. Mulai tahun 2007, jumlah penduduk kabupaten/kota dikontrol dengan jumlah penduduk provinsi hasil proyeksi dengan metode komponen

2.1 Sumber Data

- Penduduk yang dipakai untuk penghitungan Dana Alokasi Umum (DAU) Tahun Anggaran 2009 adalah penduduk pada pertengahan tahun 2008 (Juni 2008).
- Data dasar yang dipakai adalah jumlah penduduk kondisi Juni 2005, hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS) 2005 yang sudah disesuaikan berdasarkan konfirmasi dari daerah.
- NAD, Nias dan Nias Selatan menggunakan data dasar hasil Sensus Penduduk Aceh Nias (SPAN) yang dilaksanakan September 2005.

- Data penduduk hasil SUPAS 2005 yang sudah disesuaikan berdasarkan konfirmasi dari daerah dan data penduduk pertengahan tahun 2007 juga digunakan untuk menghitung Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun.

2.2 Konsep Penduduk

- Konsep penduduk pada pelaksanaan SUPAS 2005 sama seperti konsep penduduk yang digunakan pada SP 2000 maupun P4B (Pendaftaran Pemilih dan Pendataan Penduduk Berkelanjutan).
- Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis Republik Indonesia selama 6 bulan atau lebih dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap.
- Batasan lamanya tinggal diaplikasikan dalam konsep anggota rumah tangga, yang selanjutnya dipakai untuk menentukan seseorang terhitung sebagai penduduk di suatu wilayah tertentu.
- Anggota rumah tangga adalah semua orang yang biasanya bertempat tinggal di suatu rumah tangga, baik yang berada di rumah pada waktu pencacahan maupun yang sementara tidak ada.
- Penduduk mencakup penduduk yang bertempat tinggal tetap dan penduduk yang tidak bertempat tinggal tetap, seperti tuna wisma, awak kapal, penghuni perahu/rumah apung, masyarakat terpencil dan pengungsi.

2.3 Metode Proyeksi

- Proyeksi penduduk per kabupaten/kota bulan Juni 2008 dilakukan dengan metode Geometrik, dimana penduduk diproyeksikan mengikuti pola regresi logistik.
- Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) per tahun yang dipakai adalah LPP per tahun periode 2005-2007 dan dihitung dengan metode yang sama.

2.4 Rumus Proyeksi

- Rumus proyeksi penduduk yang digunakan adalah:

$$P_t = P_0 (1 + r)^t$$

dimana :

P_t = jumlah penduduk pada tahun t atau penduduk yang diproyeksikan

P_0 = jumlah penduduk pada tahun 0 atau penduduk dasar

t = jumlah tahun antara tahun 0 dan tahun t

r = laju pertumbuhan penduduk rata-rata per tahun

- Jumlah kabupaten/kota pada Sensus Penduduk tahun 2000 hanya sebanyak 341 kabupaten/ kota, selanjutnya terjadi pemekaran wilayah menjadi 440 kabupaten/kota. Pada tahun 2008, jumlah kabupaten/kota yang dihitung untuk keperluan DAU adalah 457 kabupaten/kota. Oleh sebab itu, wilayah administrasi data penduduk tahun 2000 dan 2005 disesuaikan dengan wilayah administrasi terbaru.
- Penyesuaian jumlah penduduk dilakukan dengan penelusuran pembagian cakupan wilayah sesuai SK pembentukan kabupaten/kota.

2.5 Tahapan Penghitungan

- Menyiapkan data dasar jumlah penduduk bulan Juni 2005 hasil SUPAS 2005 (yang sudah disesuaikan berdasarkan konfirmasi dari daerah untuk setiap propinsi dan kabupaten/kota).
- Data SUPAS 2005 sudah disesuaikan dengan kondisi pemekaran terakhir (457 kabupaten/ kota).
- Menyiapkan data penduduk tahun 2007 untuk setiap provinsi dan kabupaten/kota.

- Menyiapkan data penduduk nasional dan provinsi tahun 2008 hasil Proyeksi Penduduk 2005-2015 yang akan digunakan sebagai kontrol jumlah penduduk provinsi dalam menghitung proyeksi penduduk kab/kota tahun 2008.
- Menghitung laju pertumbuhan penduduk per tahun periode 2005-2007 untuk masing-masing kabupaten/kota.
- Menghitung proyeksi penduduk per kabupaten/kota tahun 2008 untuk masing-masing propinsi.
- Iterasi jumlah penduduk hasil penjumlahan angka kabupaten/kota dengan proyeksi penduduk propinsi.
- Pengecekan hasil proyeksi disesuaikan dengan pola laju pertumbuhan penduduk
- Hasil proyeksi dikonfirmasi ke masing-masing BPS Propinsi dan BPS Kabupaten/Kota.

3.1. Pendahuluan

3.1.1. Pengertian Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia adalah manusia sebagai kekayaan bangsa yang sesungguhnya. Salah satu pengukuran pembangunan manusia adalah IPM.

Beberapa penjelasan mengenai Indeks Pembangunan Manusia;

- (1) Indeks Pembangunan Manusia (IPM) menjadi indikator penting untuk mengukur keberhasilan dalam upaya pembangunan kualitas hidup manusia (masyarakat/ penduduk).
- (2) IPM digunakan sebagai salah satu ukuran kinerja daerah, khususnya dalam hal evaluasi proses pembangunan sumber daya manusianya.
- (3) IPM menjelaskan tentang bagaimana manusia mempunyai kesempatan untuk meng-akses hasil dari suatu proses pembangunan, sebagai bagian dari haknya seperti dalam memperoleh pendapatan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya.
- (4) Secara berkala, data IPM digunakan sebagai penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU)
- (5) IPM harus digunakan dengan hati-hati, meskipun indeks-indeks tersebut memberikan petunjuk umum tentang kebutuhan-kebutuhan dan prioritas-prioritas pembangunan manusia. Berbagai indeks tersebut masih perlu dilengkapi dengan informasi-informasi kuantitatif dan kualitatif yang harus dimiliki oleh Pemerintah Daerah.

3.1.2. Sumber Data

Sumber data yang digunakan untuk menghitung Indeks Pembangunan Manusia utamanya data Susenas disamping Sensus Penduduk (SP2000) dan

SUPAS 2005. Untuk IPM 2007 data yang digunakan meliputi Susenas Kor 2007, Susenas Panel Maret 2007 dan IHK 2007. Susenas Kor 2007 digunakan untuk menghitung indikator seperti Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (MYS), serta pengeluaran per kapita per bulan. Untuk Angka Harapan Hidup (e_0) dihitung berdasarkan data SP2000, SUPAS 2005 dan Susenas 2005 dan Susenas 2007 dengan menggunakan modeling. Sedangkan Susenas Panel Maret 2007 digunakan untuk menghitung daya beli yang didasarkan pada 27 komoditi. Indeks Harga Konsumen (IHK) 2007 digunakan untuk men-deflate harga implisit dari 27 komoditi pada Susenas Panel Maret 2007 untuk memperoleh harga pada kondisi bulan Juni tahun 2007.

3.1.3. Komponen IPM dan Konsep

- **Angka Melek Huruf penduduk dewasa** : Proporsi penduduk berusia 15 tahun ke atas yang dapat membaca dan menulis huruf latin atau huruf lainnya.
- **Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (e_0)**: Perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan asumsi tidak ada perubahan pola mortalitas menurut umur.
- **Rata-rata Lama Sekolah**: Rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan oleh penduduk berusia 15 tahun ke atas untuk menempuh semua jenis pendidikan formal yang pernah dijalani.
- **Paritas Daya Beli (*Purchasing Power Parity = PPP*)**: Memungkinkan dilakukan perbandingan harga-harga riil antar provinsi dan antar kabupaten/kota mengingat nilai tukar yang biasa digunakan dapat menurunkan atau menaikkan nilai daya beli yang terukur dari konsumsi per kapita yang telah disesuaikan. Dalam konteks PPP untuk Indonesia, satu rupiah di suatu provinsi memiliki daya beli yang sama dengan satu rupiah di Jakarta. PPP dihitung berdasarkan pengeluaran riil per kapita setelah disesuaikan dengan indeks harga konsumen dan penurunan utilitas marginal yang dihitung dengan formula Atkinson.

- **Reduksi *Shortfall***: Mengukur keberhasilan dipandang dari jarak antara yang dicapai terhadap kondisi ideal (IPM=100). Nilai reduksi *shortfall* yang lebih besar menandakan peningkatan IPM yang lebih cepat. Pengukuran ini didasarkan asumsi, laju perubahan tidak bersifat linier, tetapi laju perubahan cenderung melambat pada tingkat IPM yang lebih tinggi.

3.2. Metodologi

- Angka Harapan Hidup dihitung dengan menggunakan paket program MORTPACK (metode *Trussel* dengan model *West*), dengan input Anak Lahir Hidup (ALH) dan Anak Masih Hidup (AMH).
- Angka Melek Huruf, menghitung proporsi penduduk yang dapat baca tulis.
- Rata-rata Lama Sekolah, menghitung rata-rata jumlah tahun yang dihabiskan penduduk untuk menjalani sekolah.
- Paritas Daya Beli dengan proses penghitungan sbb:
 1. Y : Pengeluaran per kapita
 2. Y_1 : $Y + (Y * 20 \%)$
 3. Y_2 : Nilai Riil $Y_1 \rightarrow$ deflasi, IHK
 4. PPP \rightarrow didasarkan 27 komoditi (lihat Tabel 2)

$$PPP = \frac{\sum_j E_{(i,j)}}{\sum_j P_{(9,j)} Q_{(i,j)}}$$

$E_{(i,j)}$ = Pengeluaran untuk komoditi j di provinsi i

$P_{(9,j)}$ = Harga komoditi j di Jakarta Selatan

$Q_{(i,j)}$ = Volume komoditi j (unit) yang dikonsumsi di provinsi i

5. $Y_3: Y_2/PPP$
6. Y_4 : Menghitung nilai Y_3 dengan formula Atkinson
Formula Atkinson

$$\begin{aligned}
 C_{(i)}^* &= C_{(i)} && ; \text{jika } C_{(i)} < Z \\
 &= Z + 2(C_{(i)} - Z)^{(1/2)} && ; \text{jika } Z < C_{(i)} < 2Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(C_{(i)} - 2Z)^{(1/3)} && ; \text{jika } 2Z < C_{(i)} < 3Z \\
 &= Z + 2(Z)^{(1/2)} + 3(Z)^{(1/3)} + 4(C_{(i)} - 3Z)^{(1/4)} && ; \text{jika } 3Z < C_{(i)} < 4Z
 \end{aligned}$$

$C_{(i)}$ = PPP dari nilai riil pengeluaran per kapita

Z = Batas tingkat pengeluaran yang ditetapkan secara arbiter sebesar Rp. 549.500,- per kapita per tahun atau Rp. 1.500,- per kapita per hari.

3.3. Tahapan Penghitungan

Untuk menghitung IPM, maka setiap komponen dihitung indeksnya. Formula penghitungannya sebagai berikut;

$$\text{indeks } X_{(i,j)} = \frac{(X_{(i,j)} - X_{(i-\min)})}{(X_{(i-\max)} - X_{(i-\min)})}$$

$X_{(i,j)}$ = komponen ke-i dari daerah j
 $X_{(i-\min)}$ = nilai minimum dari X_i
 $X_{(i-\max)}$ = nilai maksimum dari X_i

standar UNDP

Dengan menggunakan formula diatas, Indeks Lama Hidup, Indeks Pendidikan, Indeks Daya Beli dapat dihitung. Nilai minimum dan maksimum merupakan angka standar UNDP (lihat Tabel 1).

- Indeks Lamanya Hidup

$$\text{Indeks } X_1 = (X_1 - 25)/(85 - 25)$$

- Indeks Pendidikan terdiri dari dua komponen:

Melek Huruf (persen) → diberi bobot 2/3

Rata-rata Lama Sekolah → diberi bobot 1/3

$$\text{Indeks } X_2 = [2/3 (\text{indeks melek huruf})] + [1/3 (\text{indeks rata-rata lama sekolah})]$$

- Indeks Pengeluaran Riil

$$\text{Indeks } X_3 = (Y_4 - 360)/(732,72 - 300)$$

- Nilai IPM dapat dihitung sebagai:

$$IPM = \frac{\text{indeks } (X_1) + \text{indeks } (X_2) + \text{indeks } (X_3)}{3}$$

Tabel 1. Nilai maksimum dan minimum dari setiap komponen IPM

Komponen IPM	Nilai Maksimum	Nilai Minimum	Keterangan
Angka Harapan Hidup	85	25	Standar UNDP
Angka Melek Huruf	100	0	Standar UNDP
Rata-rata Lama Sekolah	15	0	UNDP menggunakan <i>combined gross enrollment ratio</i>
Daya Beli	732 720 ^{a)}	300 000 (1996) 360 000 ^{b)} (1999)	UNDP menggunakan PDB riil per kapita yang telah disesuaikan

a) Perkiraan maksimum pada akhir PJP II tahun 2018

b) Penyesuaian garis kemiskinan lama dengan garis kemiskinan baru

Tabel 2. Daftar paket komoditi yang digunakan dalam penghitungan PPP

Komoditi	Unit	Proporsi dari total konsumsi
1. Beras Lokal	Kg	7,25
2. Tepung terigu	Kg	0,10
3. Singkong	Kg	0,22
4. Tuna/cakalang	Kg	0,50
5. Teri	Ons	0,32
6. Daging sapi	Kg	0,78
7. Ayam	Kg	0,65
8. Telur	Butir	1,48
9. Susu kental manis	397 gram	0,48
10. Bayam	Kg	0,30
11. Kacang panjang	Kg	0,32
12. Kacang tanah	Kg	0,22
13. Tempe	Kg	0,79
14. Jeruk	Kg	0,39
15. Pepaya	Kg	0,18
16. Kelapa	Butir	0,56
17. Gula	Ons	1,61
18. Kopi	Ons	0,60
19. Garam	Ons	0,15
20. Merica	Ons	0,13
21. Mie instan	80 Gram	0,79
22. Rokok kretek	10 Batang	2,86
23. Listrik	Kwh	2,06
24. Air minum	M ³	0,46
25. Bensin	Liter	1,02
26. Minyak tanah	Liter	1,74
27. Sewa rumah	Unit	11,56
Total		37,52

4.1. Pendahuluan

4.1.1. Konsep dan Definisi

Tingkat Kemahalan Konstruksi (TKK) merupakan cerminan dari suatu nilai bangunan/konstruksi, yaitu biaya yang dibutuhkan untuk membangun 1 (satu) unit bangunan persatuan ukuran luas di suatu kabupaten/kota atau provinsi. TKK diperoleh melalui pendekatan terhadap harga sejumlah bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam bangunan tersebut.

Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) adalah angka indeks yang menggambarkan perbandingan TKK suatu kabupaten/kota atau provinsi terhadap TKK kabupaten/kota atau provinsi lain. Sesuai dengan pengertiannya, IKK dapat dikategorikan sebagai indeks spasial, yaitu indeks yang menggambarkan perbandingan harga untuk wilayah yang berbeda pada periode waktu tertentu. Berbeda dengan pengertian indeks periodikal atau temporal yang selama ini sudah kita kenal, seperti Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) atau Indeks Harga Konsumen (IHK), kedua indeks harga tersebut menggambarkan perkembangan harga di suatu wilayah pada periode waktu tertentu terhadap harga periode tahun dasar.

Sejak Tahun 2005, IKK disajikan dengan memperhitungkan pula perkembangan harga periode tertentu terhadap harga periode dasar (Pebruari 2004, harga yang digunakan dalam penghitungan IKK 2004).

4.1.2 Ruang Lingkup dan Sumber Data

IKK tahun 2008 dihitung dalam dua versi, yaitu IKK 450 Kabupaten/Kota dengan cakupan Kabupaten/Kota yang sama dengan tahun

2007 dan IKK 451 Kabupaten/Kota dengan menambah 1 (satu) kabupaten pemekaran di Papua yaitu Memberamo, adapun untuk IKK Provinsi dihitung di 33 Provinsi.

Data dasar yang digunakan dalam melakukan penghitungan IKK adalah harga perdagangan besar bahan bangunan/konstruksi dan harga sewa alat berat yang diperoleh melalui survei yang dilakukan di seluruh kabupaten/kota. Untuk penghitungan IKK provinsi, menggunakan data harga rata-rata seluruh kabupaten/kota di masing-masing provinsi. Harga bahan bangunan/konstruksi yang dikumpulkan meliputi barang-barang natural/hasil galian, barang-barang hasil industri pengolahan dan jasa sewa alat berat.

Selain data harga, data lain yang digunakan dalam penghitungan IKK adalah Diagram Timbang (DT) yang terdiri dari diagram timbang kelompok jenis bangunan (3 kelompok bangunan) dan DT umum masing-masing kabupaten/kota.

4.1.3 Kegiatan Pengumpulan Data

Pengumpulan data harga dilakukan secara triwulanan menggunakan daftar HPB-K. Data harga yang dikumpulkan terdiri dari 60 jenis barang yang mencakup sekitar 145 kualitas barang serta harga sewa 4 macam alat berat. Untuk keperluan penghitungan IKK 2008, selain survei HPB-K, dilakukan pula survei serentak khusus untuk barang-barang konstruksi yang menjadi paket komoditas IKK. Survei serentak tersebut dilakukan pada Bulan Mei 2008 di 451 Kabupaten/Kota.

Pengumpulan data kuantitas atau volume barang-barang konstruksi dan sewa alat berat tersebut diperoleh melalui kegiatan yang disebut Studi Tingkat Kemahalan Konstruksi. Kegiatan studi ini dilakukan di 20 (dua puluh) kabupaten/kota terpilih yang menyebar di 10 (sepuluh) provinsi yang dilaksanakan pada bulan April 2003 dan April 2004. Kabupaten/kota-

kabupaten/kota tersebut dipilih berdasarkan letak dan kondisi geografis serta struktur tanah yang berbeda sehingga data yang diperoleh dapat mewakili keseluruhan kondisi kabupaten/kota di Indonesia.

Dalam menyusun diagram timbang kelompok jenis bangunan, selain data hasil studi, ditunjang pula dengan data table Input-Output dan data yang diperoleh dari instansi terkait seperti Dinas Kimpraswil. Data diagram timbang kelompok jenis bangunan ini, dari tahun ke tahun selalu di up-date berdasarkan perkembangan data penunjang.

Dengan asumsi bahwa penggunaan (kuantitas/volume) barang untuk membangun satu unit bangunan per satuan ukuran luas di masing-masing kabupaten/kota adalah sama, maka diagram timbang kelompok jenis bangunan yang digunakanpun sama untuk seluruh kabupaten/kota.

Data lain yang dikumpulkan adalah perkiraan persentase pengeluaran kegiatan pembangunan fisik gedung/konstruksi masing-masing kelompok jenis bangunan terhadap total nilai pengeluaran kegiatan pembangunan tersebut. Data ini diperoleh dari masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota.

4.2 Metodologi

IKK dihitung menurut kelompok jenis bangunan yang mengacu pada klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia (KBLI). Seperti halnya IKK 2007, penghitungan IKK 2008 juga menggunakan 3 (tiga) kelompok jenis bangunan, yaitu:

- a. Bangunan tempat tinggal dan bukan tempat tinggal;
- b. Jalan, jembatan, dan pelabuhan; dan
- c. Bangunan lainnya

Pada tahun 2004 dan tahun-tahun sebelumnya, angka IKK rata-rata nasional sama dengan 100, Sedangkan pada tahun 2005 angka IKK rata-rata nasional disesuaikan menjadi 125,10. Kenaikan sebesar 25,10 persen ini berdasarkan perkembangan Indeks Harga Perdagangan Besar (IHPB) barang-barang konstruksi dari bulan Pebruari 2004 ke bulan Mei 2005. Kemudian untuk tahun 2008 angka IKK rata-rata nasional adalah 204,79 disesuaikan dengan kenaikan IHPB barang-barang konstruksi dari bulan Pebruari 2004 ke bulan Mei 2008.

4.2.1 Paket Komoditas

Paket komoditas yang digunakan dalam penghitungan IKK 2008 terdiri dari 17 jenis barang dan 4 sewa alat berat, yaitu: pasir pasang, batu kali, kayu papan, kayu balok, kayu lapis, cat tembok, cat kayu/besi, aspal, pipa PVC, kaca, batu bata, semen, batu split, lantai keramik, besi beton, seng plat, seng gelombang, sewa alat berat *excavator*, *bulldozer*, *three wheel roller* (mesin gilas), dan *dump truck*.

Jenis barang dan sewa alat berat tersebut dipilih karena mempunyai nilai atau andil cukup besar dalam membuat masing-masing kelompok jenis bangunan serta harga barang-barang tersebut *comparable* atau mempunyai keterbandingan antar kabupaten/ kota di seluruh Indonesia.

4.2.2 Diagram Timbang (DT) atau Bobot

DT atau bobot terdiri dari DT kelompok jenis bangunan dan DT umum. DT kelompok jenis bangunan digunakan untuk menghitung tingkat kemahalan konstruksi kabupaten/kota yang disusun berdasarkan besarnya volume masing-masing jenis bahan bangunan untuk membangun satu unit bangunan persatuan ukuran luas.

Sementara itu DT umum digunakan untuk menghitung IKK umum, disusun berdasarkan perkiraan persentase pengeluaran untuk pembangunan fisik yang ada di masing-masing kabupaten/kota dan dirinci menurut 3 (tiga) kelompok jenis bangunan/konstruksi.

4.2.3 Formula Penghitungan

a. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (TKK_{kj})

$$TKK_{kj} = \sum_{i=1}^{22} P_i \cdot Q_{ij}$$

i = jenis barang/bahan bangunan dan sewa alat berat

j = kelompok jenis bangunan

k = kabupaten/kota

P_i = harga jenis barang/bahan bangunan i

Q_{ij} = kuantitas/volume bahan bangunan i kelompok jenis bangunan j = diagram timbang kelompok jenis bangunan

b. Tingkat Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Rata-rata Nasional (TKK_{nj})

$$TKK_{nj} = \frac{\sum_{k=1}^{451} TKK_{kj}}{451}$$

c. Indeks Kemahalan Konstruksi Kelompok Jenis Bangunan Kabupaten/Kota (IKK_{kj})

$$IKK_{kj} = \frac{TKK_{kj}}{TKK_{nj}} \times 100$$

d. Indeks Kemahalan Konstruksi Umum Kabupaten/Kota (IKK_{uk})

$$IKK_{uk} = \sum_{j=1}^3 IKK_{kj} \cdot Q_j \times I$$

Q_j = diagram timbang IKK umum kabupaten/kota

I = suatu konstanta yang menggambarkan perkembangan harga barang-barang yang digunakan di sektor konstruksi di Indonesia (IHPB sektor konstruksi) Pebruari 2004 – Mei 2008 yaitu sebesar 2,0479

<http://www.bps.go.id>

5.1 Pengertian dan Definisi

Definisi yang dikemukakan dalam bab ini terdiri dari: PDRB, output, input antara dan nilai tambah (*value added*). PDRB disajikan dalam harga berlaku dan harga konstan, diharapkan makna penyajian dalam dua konsep harga tersebut dapat menggambarkan arti angka PDRB yang konsisten dengan penyusunan Dana Alokasi Umum (DAU).

5.1.1 PDRB

PDRB merupakan penjumlahan nilai output bersih perekonomian yang ditimbulkan oleh seluruh kegiatan ekonomi, di suatu wilayah tertentu (provinsi dan kabupaten/kota), dan dalam satu kurun waktu tertentu (satu tahun kalender). Kegiatan ekonomi yang dimaksud mulai kegiatan pertanian, pertambangan, industri pengolahan, sampai dengan jasa-jasa.

Dalam penghitungannya, untuk menghindari hitung ganda, nilai output bersih diberi nama secara spesifik, yaitu nilai tambah (*value added*). Demikian juga, harga yang digunakan dalam perhitungan ini adalah harga produsen. Penilaian pada harga konsumen akan menghilangkan PDRB subsektor perdagangan dan sebagian subsektor pengangkutan.

5.1.2 Output

Dalam suatu proses produksi selama satu tahun, seluruh nilai harga produsen barang/jasa yang diproduksi dinamakan output. Secara teknis penghitungan, output ini adalah jumlah produksi dikalikan dengan harga atau tarip jual dari produsen barang atau jasa tersebut.

5.1.3 Input Antara

Input antara merupakan nilai seluruh barang dan jasa yang digunakan untuk memproduksi barang dan jasa tersebut. Input antara juga diartikan sebagai biaya antara atau biaya produksi.

5.1.4 Nilai Tambah

Nilai tambah merupakan nilai yang ditambahkan dalam proses produksi, dan besarnya sama dengan selisih dari output dengan input antara. Sebagai contoh seorang tukang mebel selama ia membuat satu set mebel, orang tersebut memerlukan bahan-bahan yang terdiri dari papan, paku, cat, busa dan lain-lain. Perubahan semua nilai bahan diatas menjadi nilai mebel adalah suatu pertambahan nilai.

5.1.5 Harga Berlaku

Makna harga berlaku (*current prices*) adalah harga yang terjadi pada tahun yang bersangkutan. Karena pada dasarnya output atau nilai tambah merupakan perkalian $p \cdot q$ (p = harga; dan q = kuantitas), maka yang dimaksud dengan harga berlaku adalah kuantitas tahun tertentu dikalikan dengan harga tahun saat barang atau jasa itu diproduksi.

5.1.6 Harga Konstan

Kelemahan penyajian dalam harga berlaku adalah masih mengandung perubahan harga barang/jasa antar waktu, oleh karena itu untuk mengetahui pertumbuhan (perubahan) kegiatan ekonomi secara riil, diperlukan nilai yang sudah terbebas dari perubahan harga. Nilai PDRB demikian disebut PDRB atas dasar harga konstan (*constant prices*).

Penilaian harga dalam penghitungan DAU adalah harga berlaku. Karena variabel PDRB yang diperlukan hanya tahun tertentu, maka pemakaian harga berlaku menjadi relevan. Disamping itu harga berlaku mencerminkan nilai barang dan jasa yang dihasilkan oleh suatu daerah pada saat produk tersebut dihasilkan.

5.2 Ruang Lingkup dan Sumber Data

Ruang lingkup meliputi PDRB yang disajikan di 451 kabupaten/kota dan 33 provinsi sesuai kondisi terakhir. Namun perlu diingat bahwa PDRB provinsi bukanlah penjumlahan PDRB dari kabupaten/kota di dalamnya; karena antara penjumlahan individu kabupaten/kota dalam satu provinsi dengan PDRB provinsinya selalu ada diskrepansi statistik (*statistical discrepancy*). Perbedaan tersebut pasti terjadi namun dapat dijelaskan secara teoritis. Namun demikian sesuatu yang perlu dijaga adalah diskrepansi tersebut harus masih dalam rentang toleransi.

Satu hal yang perlu disepakati adalah bahwa untuk menghitung DAU kabupaten/kota digunakan PDRB kabupaten/kota, sedangkan untuk DAU provinsi digunakan PDRB provinsi (bukan penjumlahan PDRB kabupaten/kota di dalam provinsi bersangkutan). PDRB provinsi dihitung secara independen oleh BPS provinsi dengan menggunakan informasi dasar pada masing-masing provinsi.

Untuk menyusun PDRB diperlukan seluruh data kegiatan ekonomi; sedangkan belum seluruh sektor ekonomi mempunyai kelengkapan data seperti yang diharapkan. Oleh karena itu, untuk menjaring kekurangan data tersebut perlu dilakukan survei.

5.3 Kegiatan Pengumpulan Data

Data yang dibutuhkan dijamin melalui beberapa cara, yaitu melalui: sensus, survei dan dari produk administratif instansi pemerintah, perusahaan dan lembaga lainnya. Karena ragam data yang dibutuhkan sangat banyak, maka kegiatan pengumpulan data merupakan tahapan kerja yang paling membutuhkan perhatian. Kegiatan pengumpulan data ini meliputi seluruh data ekonomi mulai dari sektor pertanian sampai pada sektor jasa-jasa.

5.4 Metode Penghitungan

Sesuai dengan sistem neraca nasional yang direkomendasikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), terdapat tiga pendekatan untuk menyusun PDRB, yaitu: pendekatan produksi, pendekatan pengeluaran, dan pendekatan pendapatan. Pendekatan metode-metode ini disesuaikan dengan data dasar yang tersedia di masing-masing daerah.

5.4.1 Pendekatan Produksi

PDRB yang dihitung menurut pendekatan produksi merupakan penjumlahan nilai tambah dari seluruh proses produksi pada tahun tertentu.

5.4.2 Pendekatan Pengeluaran

PDRB yang disusun melalui pendekatan ini diperoleh melalui penjumlahan pengeluaran konsumsi rumahtangga, lembaga nirlaba, pengeluaran konsumsi pemerintah, investasi dan ekspor neto.

5.4.3 Pendekatan Pendapatan

PDRB yang diperoleh dari pendekatan ini merupakan penjumlahan balas jasa faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi, dan

dikelompokkan ke dalam upah/gaji, surplus usaha, penyusutan dan pajak tak langsung neto (pajak dikurangi subsidi).

5.5 PDRB Kabupaten/Kota

Pada tahun 2008, jumlah kabupaten/kota sudah mencapai 456 dan seluruhnya sudah melakukan penghitungan PDRB. Namun alokasi DAU hanya memberikan kepada 451 Kabupaten/Kota tanpa DKI. Jumlah PDRB dari 451 Kabupaten/Kota ini bila dibandingkan dengan jumlah PDRB provinsi dan nasional mempunyai perbedaan statistik dibawah 5 persen sehingga secara statistik masih di dalam batas toleransi yang wajar. Perbedaan ini bersumber karena pendekatan yang digunakan, dan sumber data yang berbeda, dan penghitungan PDRB Kabupaten/Kota dan provinsi adalah independen.

5.6 PDRB untuk Penghitungan DAU

Dalam penghitungan DAU tahun ini menggunakan PDRB per kapita yang diperoleh dengan cara membagi PDRB atas dasar harga berlaku dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Angka PDRB per kapita merupakan ukuran untuk melihat kemajuan pembangunan suatu daerah ditinjau dari jumlah penduduk.

<http://www.kps.go.id>

TABEL RINGKASAN

TABEL 1.1: DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU 451 KABUPATEN/KOTA, TAHUN 2009

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008 (Ribu Org)	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Juta Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	294	70.35	197.60	17.33
1	Kab. Aceh Barat	310	69.28	194.71	9.73
2	Kab. Aceh Besar	210	72.71	192.55	8.86
3	Kab. Aceh Selatan	100	68.87	194.75	5.22
4	Kab. Aceh Singkil	183	67.97	199.79	10.10
5	Kab. Aceh Tengah	176	72.11	196.31	4.66
6	Kab. Aceh Tenggara	333	70.96	196.31	29.71
7	Kab. Aceh Timur	518	69.40	199.20	23.79
8	Kab. Aceh Utara	358	71.39	199.20	8.79
9	Kab. Bireun	380	72.45	198.54	5.30
10	Kab. Pidie	82	70.76	192.45	4.06
11	Kab. Simeulue	218	67.97	226.37	12.34
12	Kota Banda Aceh	29	76.31	191.66	8.31
13	Kota Sabang	140	74.48	210.77	8.58
14	Kota Langsa	159	72.22	198.20	56.74
15	Kota Lhokseumawe	124	74.65	198.58	15.06
16	Kab. Nagan Raya	76	67.64	194.74	7.54
17	Kab. Aceh Jaya	123	68.23	198.01	8.79
18	Kab. Aceh Barat Daya	75	68.37	198.09	8.35
19	Kab. Gayo Lues	240	67.08	200.42	10.71
20	Kab. Aceh Tamiang	113	69.17	197.56	9.29
21	Kab. Bener Meriah	131	68.88	199.25	6.14
22	Kab. Pidie Jaya	64	69.96	192.36	5.76
23	Kota Subulussalam	13,042	68.28	196.47	14.17
					12.09
2	Provinsi Sumatera Utara	272	72.78	184.69	10.64
		1,738			15.45
24	Kab. Asahan	361	71.16	177.70	12.76
25	Kab. Dairi	1,028	71.49	179.46	14.27
26	Kab. Deli Serdang	1,043	73.76	175.89	11.15
27	Kab. Tanah Karo	424	74.01	179.15	6.24
28	Kab. Labuhan Batu	443	72.54	182.94	7.19
29	Kab. Langkat	853	71.83	176.54	9.04
30	Kab. Mandailing Natal	642	69.51	182.81	7.21
31	Kab. Nias	315	67.07	175.36	5.26
32	Kab. Simalungun	268	72.15	177.28	10.35
33	Kab. Tapanuli Selatan	172	70.23	183.22	14.27
34	Kab. Tapanuli Tengah	253	71.01	178.74	13.34

35	Kab. Tapanuli Utara	2,141	72.99	179.50	26.62
36	Kab. Toba Samosir	199	75.33	184.32	13.08
37	Kota Binjai	164	75.51	176.03	11.54
38	Kota Medan	164	76.22	177.99	13.94
39	Kota Pematang Siantar	141	76.52	178.39	11.55
40	Kota Sibolga	188	73.93	185.03	8.18
41	Kota Tanjung Balai	41	72.80	181.96	5.96
42	Kota Tebing Tinggi	273	75.27	177.31	6.22
43	Kota Padang Sidempuan	155	73.79	185.16	11.22
44	Kab. Pakpak Bharat	631	69.47	183.86	10.39
45	Kab. Nias Selatan	132	65.06	235.01	9.81
46	Kab. Humbang Hasundutan	382	70.79	178.58	30.41
47	Kab. Serdang Bedagai	4,763	72.20	177.00	12.73
48	Kab. Samosir	332	72.87	185.93	12.74
49	Kab. Batu Bara	430	70.55	181.30	10.42
		68			13.58
3	Provinsi Sumatera Barat	387	72.23	181.17	11.40
		257			8.83
50	Kab. Limapuluh Koto	442	69.52	177.18	7.07
51	Kab. Agam	202	72.06	180.87	10.43
52	Kab. Kepulauan Mentawai	356	67.72	231.34	9.73
53	Kab. Padang Pariaman	336	70.09	174.98	11.38
54	Kab. Pasaman	106	71.05	177.41	13.77
55	Kab. Pesisir Selatan	54	69.52	182.69	11.97
56	Kab. Sawahlunto Sijunjung	857	69.26	179.75	20.72
57	Kab. Solok	106	69.29	175.27	12.19
58	Kab. Tanah Datar	54	72.44	174.61	13.89
59	Kota Bukit Tinggi	58	77.13	179.12	13.25
60	Kota Padang Panjang	71	76.39	177.47	15.97
61	Kota Padang	333	76.70	173.34	12.56
62	Kota Payakumbuh	181	74.36	175.01	10.18
63	Kota Sawahlunto	132	73.74	176.96	7.07
64	Kota Solok	5,189	74.28	175.12	41.41
65	Kota Pariaman	748	72.82	173.89	75.39
66	Kab. Pasaman Barat	671	68.84	181.06	22.59
67	Kab. Dharmasraya	323	67.48	177.71	30.13
68	Kab. Solok Selatan	599	67.54	177.61	27.87
		275			30.19
4	Provinsi Riau	280	74.63	204.02	37.62
		551			43.39
69	Kab. Bengkalis	398	73.36	215.08	20.69
70	Kab. Indragiri Hilir	322	73.87	212.14	102.93
71	Kab. Indragiri Hulu	237	72.96	206.95	26.56
72	Kab. Kampar	785	72.98	199.53	25.18
73	Kab. Kuantan Singingi	1,453	72.47	199.90	37.21
74	Kab. Pelalawan	125	71.13	198.81	28.56
75	Kab. Rokan Hilir	96	71.13	209.51	63.91
76	Kab. Rokan Hulu	224	71.13	199.99	13.96
77	Kab. Siak	724	75.15	210.45	47.46

78	Kota Dumai	153	76.31	212.00	19.53
79	Kota Pekanbaru	88	76.98	198.89	8.55
		2,788			11.70
5	Provinsi Kepulauan Riau	219	73.68	215.82	10.27
80	Kab. Bintan	310	72.97	213.65	9.86
81	Kab. Natuna	287	69.36	234.27	6.79
82	Kab. Karimun	311	72.40	213.84	8.27
83	Kota Batam	214	76.82	212.26	11.07
84	Kota Tanjung Pinang	251	73.46	211.80	17.11
85	Kab. Lingga	212	70.25	217.48	21.77
6	Provinsi Jambi	467	71.46	189.38	12.39
86	Kab. Batanghari	341	71.83	189.34	11.72
87	Kab. Bungo	510	70.00	188.91	43.80
88	Kab. Kerinci	499	73.25	189.69	11.13
89	Kab. Merangin	661	70.73	191.36	22.60
90	Kab. Muaro Jambi	697	71.59	188.39	7.01
91	Kab. Sarolangun	265	70.74	193.16	15.94
92	Kab. Tanjung Jabung Barat	1,417	71.44	195.95	24.67
93	Kab. Tanjung Jabung Timur	116	70.23	196.26	7.65
94	Kab. Tebo	184	70.81	194.56	8.06
95	Kota Jambi	136	75.07	182.21	15.62
7	Provinsi Sumatera Selatan	379	71.40	185.14	6.81
96	Kab. Lahat	329	69.35	189.64	5.93
97	Kab. Musi Banyuasin	214	69.64	194.13	6.75
98	Kab. Musi Rawas	1,123	66.31	193.08	16.17
99	Kab. Muara Enim	271	69.42	183.65	12.57
100	Kab. Ogan Komering Ilir	139	69.15	187.66	14.39
101	Kab. Ogan Komering Ulu	157	71.40	182.81	13.98
102	Kota Palembang	161	74.94	183.74	12.42
103	Kota Pagar Alam	146	71.70	193.84	16.03
104	Kota Lubuk Linggau	158	69.24	187.59	27.52
105	Kota Prabumulih	91	72.51	189.08	17.11
106	Kab. Banyuasin	1,642	68.60	195.25	7.93
107	Kab. Ogan Ilir	140	68.17	185.74	6.57
108	Kab. OKU Timur	344	68.14	184.87	5.40
109	Kab. OKU Selatan	254	70.28	182.72	10.21
110	Kab. Empat Lawang	274	67.17	186.17	12.70
8	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	164	71.62	202.19	3.48
111	Kab. Bangka	91	71.24	200.13	8.72
112	Kab. Belitung	118	72.19	205.97	9.43
113	Kota Pangkal Pinang	7,391	74.55	198.67	8.36
114	Kab. Bangka Selatan	384	65.82	205.76	4.94

115	Kab. Bangka Tengah	1,375	70.34	203.50	6.42
116	Kab. Bangka Barat	1,178	69.06	203.31	7.92
117	Kab. Belitung Timur	567	70.58	207.12	8.56
9	Provinsi Bengkulu	831	71.57	185.36	5.76
118	Kab. Bengkulu Selatan	365	70.44	188.28	5.60
119	Kab. Bengkulu Utara	823	70.16	183.19	12.87
120	Kab. Rejang Lebong	134	69.35	184.37	5.73
121	Kota Bengkulu	9,146	76.61	182.22	62.49
122	Kab. Kaur	40,918	67.99	189.88	13.05
123	Kab. Seluma	2,817	65.66	185.20	11.99
124	Kab. Mukomuko	2,194	69.19	187.10	34.75
125	Kab. Lebong	4,029	68.38	184.81	12.77
126	Kab. Kepahiang	1,537	66.36	187.95	8.19
10	Provinsi Lampung	2,108	67.78	180.51	6.18
127	Kab. Lampung Barat	1,115	67.74	188.12	19.97
128	Kab. Lampung Selatan	2,071	68.39	184.27	18.10
129	Kab. Lampung Tengah	1,302	69.40	186.01	5.63
130	Kab. Lampung Utara	1,194	68.97	186.66	6.10
131	Kab. Lampung Timur	791	69.23	187.73	14.43
132	Kab. Tanggamus	1,410	69.62	187.44	8.63
133	Kab. Tulang Bawang	2,222	68.63	188.12	6.57
134	Kab. Way Kanan	1,046	68.46	185.68	8.70
135	Kota Bandar Lampung	1,691	74.29	181.10	5.55
136	Kota Metro	2,400	75.31	183.39	21.31
11	Provinsi DKI Jakarta	996	76.59	194.71	8.87
12	Provinsi Jawa Barat	1,536	70.71	180.81	7.02
137	Kab. Bandung	621	72.97	173.77	15.44
138	Kab. Bekasi	589	71.55	181.14	10.80
139	Kab. Bogor	167	70.08	179.20	7.76
140	Kab. Ciamis	1,419	70.14	178.24	8.77
141	Kab. Cianjur	0	67.65	174.16	0.00
142	Kab. Cirebon	0	67.30	177.27	0.00
143	Kab. Garut	9,602	69.99	176.13	11.40
144	Kab. Indramayu	1,234	66.22	184.61	4.98
145	Kab. Karawang	1,093	68.45	177.37	5.66
146	Kab. Kuningan	1,826	69.70	179.26	7.59
147	Kab. Majalengka	3,574	68.94	175.79	8.90
148	Kab. Purwakarta	344	69.88	173.88	47.45
149	Kab. Subang	1,532	70.03	176.75	26.09
150	Kab. Sukabumi	32,626	69.21	178.64	9.65
151	Kab. Sumedang	870	71.30	174.16	5.45
152	Kab. Tasikmalaya	1,503	71.24	174.14	4.86

153	Kota Bandung	683	74.86	174.86	5.71
154	Kota Bekasi	835	75.31	180.26	3.82
155	Kota Bogor	938	74.73	178.20	6.12
156	Kota Cirebon	1,789	73.87	177.59	5.38
157	Kota Depok	1,627	77.89	177.79	40.09
158	Kota Sukabumi	1,034	73.66	179.29	4.23
159	Kota Cimahi	1,336	74.42	178.68	3.44
160	Kota Tasikmalaya	1,091	72.75	175.22	6.03
161	Kota Banjar	812	70.17	176.14	8.57
162	Kab. Bandung Barat	1,216	72.29	174.61	3.78
13	Provinsi Banten	1,133	69.29	180.46	7.40
163	Kab. Lebak	1,171	66.74	181.84	5.05
164	Kab. Pandeglang	1,172	67.39	181.41	5.75
165	Kab. Serang	852	67.45	179.85	6.03
166	Kab. Tangerang	1,375	70.71	180.36	4.25
167	Kota Cilegon	828	74.43	179.84	4.73
168	Kota Tangerang	722	74.40	179.44	6.48
14	Provinsi Jawa Tengah	911	70.92	177.71	9.08
169	Kab. Banjarnegara	827	68.54	175.82	8.61
170	Kab. Banyumas	1,416	71.23	175.88	3.53
171	Kab. Batang	708	68.64	181.33	5.20
172	Kab. Blora	983	69.11	183.28	4.64
173	Kab. Boyolali	758	69.63	176.34	3.93
174	Kab. Brebes	135	66.57	179.00	11.18
175	Kab. Cilacap	275	70.25	176.10	10.95
176	Kab. Demak	178	71.05	177.87	7.84
177	Kab. Grobogan	1,511	69.75	182.68	20.50
178	Kab. Jepara	523	71.45	179.61	13.35
179	Kab. Karanganyar	241	71.59	176.50	7.80
180	Kab. Kebumen	3,469	69.96	177.57	9.58
181	Kab. Kendal	910	68.91	181.54	7.15
182	Kab. Klaten	687	71.48	178.29	7.11
183	Kab. Kudus	375	71.36	181.67	7.14
184	Kab. Magelang	1,043	71.03	178.20	9.71
185	Kab. Pati	711	71.87	179.65	19.06
186	Kab. Pekalongan	3,553	69.69	177.21	14.50
187	Kab. Pemasaran	957	67.89	180.57	5.65
188	Kab. Purbalingga	1,532	70.38	176.07	10.15
189	Kab. Purworejo	1,070	70.68	175.70	8.13
190	Kab. Rembang	1,264	70.54	181.03	10.08
191	Kab. Semarang	707	72.93	177.62	5.11
192	Kab. Sragen	1,195	68.98	175.59	20.61
193	Kab. Sukoharjo	2,321	72.46	176.09	7.05
194	Kab. Tegal	1,286	68.83	178.21	7.67
195	Kab. Temanggung	1,452	73.08	178.47	6.88

196	Kab. Wonogiri	1,189	70.11	179.82	5.88
197	Kab. Wonosobo	1,025	69.22	176.83	9.34
198	Kota Magelang	643	75.69	178.43	6.68
199	Kota Pekalongan	625	73.10	177.45	8.09
200	Kota Salatiga	2,414	75.37	178.66	9.04
201	Kota Semarang	1,005	76.11	175.75	9.66
202	Kota Surakarta	1,000	76.58	176.87	7.27
203	Kota Tegal	835	72.72	178.89	6.04
15	Provinsi DI Yogyakarta	835	74.15	180.27	4.07
204	Kab. Bantul	896	72.78	180.41	5.56
205	Kab. Gunung Kidul	1,044	69.68	187.76	9.94
206	Kab. Kulon Progo	902	72.76	180.78	4.35
207	Kab. Sleman	1,781	76.70	180.49	22.28
208	Kota Yogyakarta	623	78.14	178.74	9.29
16	Provinsi Jawa Timur	675	69.78	175.95	4.42
209	Kab. Bangkalan	989	62.97	184.51	11.38
210	Kab. Banyuwangi	132	67.24	175.95	8.32
211	Kab. Blitar	270	72.28	174.41	155.86
212	Kab. Bojonegoro	178	65.50	172.04	10.77
213	Kab. Bondowoso	817	60.76	174.75	25.40
214	Kab. Gresik	113	73.00	173.64	16.88
215	Kab. Jember	174	63.27	174.37	10.49
216	Kab. Jombang	227	71.44	172.06	14.69
217	Kab. Kediri	2,630	70.39	175.09	48.78
218	Kab. Lamongan	188	67.88	171.94	10.80
219	Kab. Lumajang	4,249	66.20	177.45	10.17
220	Kab. Madiun	206	68.24	173.89	8.34
221	Kab. Magetan	325	71.20	176.16	6.70
222	Kab. Malang	219	69.07	175.14	7.76
223	Kab. Mojokerto	409	71.99	172.21	10.44
224	Kab. Nganjuk	712	69.25	173.32	11.07
225	Kab. Ngawi	491	67.52	175.22	8.55
226	Kab. Pacitan	389	71.43	180.18	10.13
227	Kab. Pamekasan	365	62.49	190.02	7.74
228	Kab. Pasuruan	222	65.52	173.32	16.39
229	Kab. Ponorogo	171	68.55	176.82	10.36
230	Kab. Probolinggo	178	60.97	172.65	4.94
231	Kab. Sampang	168	56.99	188.57	4.18
232	Kab. Sidoarjo	91	74.87	177.45	6.50
233	Kab. Situbondo	2,057	62.64	174.16	13.77
234	Kab. Sumenep	127	63.71	195.47	12.10
235	Kab. Trenggalek	117	71.68	179.50	14.04
236	Kab. Tuban	341	66.61	174.96	9.47
237	Kab. Tulungagung	223	72.00	175.29	15.69
238	Kota Blitar	324	75.88	174.74	16.11

Tidak dicetak

239	Kota Kediri	190	74.45	175.05	12.85
240	Kota Madiun	87	75.42	174.34	11.93
241	Kota Malang	89	75.72	175.38	16.45
242	Kota Mojokerto	120	75.66	172.02	7.93
243	Kota Pasuruan	92	72.20	173.50	10.43
244	Kota Probolinggo	59	72.76	171.85	14.05
245	Kota Surabaya	39	75.87	171.81	21.46
246	Kota Batu	137	72.83	172.23	14.47
17	Provinsi Kalimantan Barat	3,447	67.53	206.92	11.61
247	Kab. Bengkayang	272	66.32	204.70	10.63
248	Kab. Landak	209	66.43	203.97	7.24
249	Kab. Kapuas Hulu	244	69.26	230.00	5.76
250	Kab. Ketapang	216	66.02	202.73	4.70
251	Kab. Pontianak	277	67.43	203.29	24.71
252	Kab. Sambas	193	63.01	207.92	17.78
253	Kab. Sanggau	270	67.64	210.00	10.94
254	Kab. Sintang	153	66.89	211.19	8.28
255	Kota Pontianak	168	71.59	202.06	7.80
256	Kota Singkawang	627	67.61	204.50	11.21
257	Kab. Sekadau	102	65.75	210.07	18.40
258	Kab. Melawi	226	67.61	216.37	17.55
259	Kab. Kayong Utara	3,095	64.19	202.49	70.12
18	Provinsi Kalimantan Tengah	114	73.49	211.18	18.65
260	Kab. Barito Selatan	160	72.56	216.29	25.23
261	Kab. Barito Utara	191	74.12	205.83	97.38
262	Kab. Kapuas	60	72.58	204.08	18.48
263	Kab. Kotawaringin Barat	133	72.14	210.66	19.52
264	Kab. Kotawaringin Timur	183	72.90	211.59	33.99
265	Kota Palangkaraya	512	77.47	198.42	56.28
266	Kab. Barito Timur	134	71.66	212.04	407.11
267	Kab. Murung Raya	602	71.68	217.63	26.76
268	Kab. Pulang Pisau	184	70.51	211.74	23.30
269	Kab. Gunung Mas	126	72.40	216.99	17.66
270	Kab. Lamandau	2,730	71.54	219.32	11.10
271	Kab. Sukamara	317	70.65	219.75	7.31
272	Kab. Katingan	198	71.59	207.31	9.38
273	Kab. Seruyan	130	71.62	218.69	6.89
19	Provinsi Kalimantan Selatan	429	68.01	195.02	17.19
274	Kab. Banjar	182	69.43	191.26	9.59
275	Kab. Barito Kuala	83	65.89	198.61	10.14
276	Kab. Hulu Sungai Selatan	174	69.35	196.01	10.19
277	Kab. Hulu Sungai Tengah	118	69.29	194.71	5.40
278	Kab. Hulu Sungai Utara	80	67.01	200.00	6.08

279	Kab. Kota Baru	62	69.98	200.93	5.93
280	Kab. Tabalong	95	68.51	199.32	12.19
281	Kab. Tanah Laut	0	69.85	193.73	0.00
282	Kab. Tapin	972	69.34	193.35	4.96
283	Kota Banjar Baru	128	73.58	192.38	4.20
284	Kota Banjarmasin	340	72.38	190.74	3.56
285	Kab. Balangan	165	65.13	197.46	6.04
286	Kab. Tanah Bumbu	115	67.88	200.87	6.33
20	Provinsi Kalimantan Timur	95	73.77	209.57	3.16
287	Kab. Berau	296	72.12	213.51	7.97
288	Kab. Bulungan	156	73.33	214.58	5.86
289	Kab. Kutai Kartanegara	117	71.53	206.14	7.07
290	Kab. Kutai Barat	198	71.93	215.08	8.47
291	Kab. Kutai Timur	471	70.46	219.36	9.02
292	Kab. Malinau	178	71.68	223.83	12.16
293	Kab. Nunukan	161	72.17	223.42	9.16
294	Kab. Pasir	309	72.70	210.58	12.58
295	Kota Balikpapan	372	76.62	205.82	10.97
296	Kota Bontang	180	75.61	214.21	3.84
297	Kota Samarinda	0	75.62	204.59	0.00
298	Kota Tarakan	0	75.30	223.32	0.00
299	Kab. Penajam Paser Utara	7,805	72.00	211.17	9.00
21	Provinsi Sulawesi Utara	162	74.68	211.49	6.30
300	Kab. Bolaang Mongondow	391	71.98	192.98	5.70
301	Kab. Minahasa	188	74.50	193.19	6.10
302	Kab. Sangihe	606	74.19	264.05	4.80
303	Kota Bitung	332	74.15	190.46	3.91
304	Kota Manado	324	76.76	191.07	7.04
305	Kab. Kepulauan Talaud	314	73.77	280.68	6.10
306	Kab. Minahasa Selatan	303	73.11	193.76	5.03
307	Kota Tomohon	295	75.72	192.30	10.82
308	Kab. Minahasa Utara	347	73.90	191.31	8.89
309	Kota Kotamubagu	121	73.90	195.60	5.43
310	Kab. Bolaang Mongondow Utara	174	71.30	197.16	7.90
311	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	26	72.10	264.81	7.14
312	Kab. Minahasa Tenggara	230	71.45	199.57	6.97
22	Provinsi Gorontalo	461	68.83	196.14	3.94
313	Kab. Boalemo	118	67.24	199.87	9.14
314	Kab. Gorontalo	1,254	67.77	195.87	16.83
315	Kota Gorontalo	142	71.64	194.54	8.41
316	Kab. Pohuwato	231	68.81	210.42	29.00
317	Kab. Bone Bolango	1,032	69.97	193.86	6.09
318	Kab. Gorontalo Utara	133	67.48	196.41	6.10

23	Provinsi Sulawesi Tengah	361	69.34	195.39	5.03
319	Kab. Banggai	107	69.33	191.21	7.94
320	Kab. Banggai Kepulauan	2,075	65.93	215.19	8.84
321	Kab. Buol	280	68.17	196.62	4.32
322	Kab. Toli-Toli	229	66.88	193.16	7.05
323	Kab. Donggala	281	68.09	183.95	15.49
324	Kab. Morowali	246	69.23	197.05	6.89
325	Kab. Poso	254	68.47	192.79	11.33
326	Kota Palu	128	75.14	181.88	10.07
327	Kab. Parigi Moutong	240	67.15	188.50	6.29
328	Kab. Tojo Una Una	110	67.28	193.02	6.38
24	Provinsi Sulawesi Selatan	111	69.62	185.79	13.27
329	Kab. Bantaeng	49	68.33	183.39	10.90
330	Kab. Barru	3,516	68.97	182.60	12.17
331	Kab. Bone	416	68.34	185.88	21.56
332	Kab. Bulukumba	217	69.27	186.87	7.48
333	Kab. Enrekang	626	73.32	187.65	8.11
334	Kab. Gowa	437	68.87	181.93	11.01
335	Kab. Jeneponto	256	63.42	183.11	9.75
336	Kab. Luwu	385	72.46	187.62	7.11
337	Kab. Luwu Utara	167	72.55	194.65	11.05
338	Kab. Maros	412	69.22	185.33	8.47
339	Kab. Pangkajene Kepulauan	599	67.73	182.24	13.41
340	Kab. Pinrang	4,364	71.43	182.70	7.81
341	Kab. Selayar	416	67.74	203.79	4.99
342	Kab. Sidenreng Rappang	213	67.22	184.43	6.66
343	Kab. Sinjai	81	65.24	187.10	4.69
344	Kab. Soppeng	414	70.26	184.69	3.65
345	Kab. Takalar	76	66.95	182.81	4.10
346	Kab. Tana Toraja	414	70.18	187.90	6.50
347	Kab. Wajo	362	68.04	186.61	8.67
348	Kota Pare-pare	130	76.47	182.71	5.31
349	Kota Makassar	99	77.33	181.42	131.17
350	Kota Palopo	4,534	75.37	187.03	4.30
351	Kab. Luwu Timur	180	71.67	195.06	3.28
25	Provinsi Sulawesi Barat	238	67.72	194.52	4.62
352	Kab. Majene	384	69.12	193.38	4.27
353	Kab. Mamuju	106	67.60	197.06	2.29
354	Kab. Polewali Mandar	512	64.77	193.37	2.77
355	Kab. Mamasa	133	69.16	204.32	4.45
356	Kab. Mamuju Utara	279	68.84	198.75	4.37
26	Provinsi Sulawesi Tenggara	228	68.32	199.33	4.38

357	Kab. Buton	213	67.08	204.21	2.99
358	Kab. Konawe	293	67.96	197.69	10.62
359	Kab. Kolaka	114	69.76	194.12	3.51
360	Kab. Muna	206	65.93	200.14	3.20
361	Kota Kendari	125	74.55	191.04	3.76
362	Kota Bau-bau	261	71.56	204.79	2.27
363	Kab. Konawe Selatan	60	68.37	200.31	2.67
364	Kab. Bombana	1,321	65.35	197.26	4.38
365	Kab. Wakatobi	156	65.54	209.05	4.26
366	Kab. Kolaka Utara	330	67.57	195.36	2.55
367	Kab. Konawe Utara	139	66.83	200.32	3.70
368	Kab. Buton Utara	132	66.89	208.51	3.20
27	Provinsi Bali	143	72.47	180.52	3.01
369	Kab. Badung	72	73.64	182.89	4.15
370	Kab. Bangli	960	69.01	177.35	3.35
371	Kab. Buleleng	34	69.15	187.62	7.35
372	Kab. Gianyar	97	71.66	175.51	2.47
373	Kab. Jembrana	170	71.40	185.54	3.52
374	Kab. Karangasem	67	65.11	183.50	4.35
375	Kab. Klungkung	82	69.01	185.97	3.55
376	Kab. Tabanan	130	73.11	181.44	2.95
377	Kota Denpasar	188	76.59	173.96	3.21
28	Provinsi Nusa Tenggara Barat	2,057	63.71	188.97	27.47
378	Kab. Bima	10	63.86	185.12	11.79
379	Kab. Dompu	10	64.04	192.94	4.41
380	Kab. Lombok Barat	172	59.34	184.80	13.55
381	Kab. Lombok Tengah	143	59.02	192.72	282.27
382	Kab. Lombok Timur	174	61.12	187.05	8.62
383	Kab. Sumbawa	123	64.99	196.06	5.01
384	Kota Mataram	123	70.71	184.74	4.56
385	Kota Bima	78	67.13	186.11	6.41
386	Kab. Sumbawa Barat	220	65.52	196.81	18.62
29	Provinsi Nusa Tenggara Timur	44	65.36	209.37	11.67
387	Kab. Alor	97	67.31	215.63	2.47
388	Kab. Belu	49	62.82	206.55	4.44
389	Kab. Ende	35	65.39	211.02	25.68
390	Kab. Flores Timur	71	66.74	213.74	5.67
391	Kab. Kupang	68	64.57	205.83	5.35
392	Kab. Lembata	15	66.10	215.06	10.94
393	Kab. Manggarai	13	65.78	211.22	11.38
394	Kab. Ngada	20	67.95	213.55	5.87
395	Kab. Sikka	730	66.04	208.78	14.48

396	Kab. Sumba Barat	98	60.82	209.75	34.52
397	Kab. Sumba Timur	173	60.26	210.08	9.94
398	Kab. Timor Tengah Selatan	67	64.43	205.76	13.90
399	Kab. Timor Tengah Utara	169	65.84	204.72	11.27
400	Kota Kupang	61	75.91	204.21	5.42
401	Kab. Rote Ndao	41	64.61	207.68	19.58
402	Kab. Manggarai Barat	55	63.99	210.40	12.14
403	Kab. Nagekeo	23	65.32	213.34	7.61
404	Kab. Sumba Barat Daya	42	59.29	209.59	12.93
405	Kab. Sumba Tengah	0	58.63	214.72	0.00
30	Provinsi Maluku	0	69.96	233.83	0.00
406	Kab. Maluku Tenggara Barat	0	67.14	244.76	0.00
407	Kab. Maluku Tengah	0	69.06	227.88	0.00
408	Kab. Maluku Tenggara	0	71.04	244.56	0.00
409	Kab. Pulau Buru	0	67.49	228.49	0.00
410	Kota Ambon	0	77.46	223.54	0.00
411	Kab. Seram Bagian Barat	0	68.28	229.98	0.00
412	Kab. Seram Bagian Timur	0	66.18	230.56	0.00
413	Kab. Kepulauan Aru	0	68.91	244.41	0.00
31	Provinsi Maluku Utara	0	67.82	227.54	0.00
414	Kab. Halmahera Tengah	0	67.82	236.04	0.00
415	Kab. Halmahera Barat	0	69.56	227.47	0.00
416	Kota Ternate	0	74.93	222.97	0.00
417	Kab. Halmahera Timur	0	66.68	236.64	0.00
418	Kota Tidore Kepulauan	0	68.13	224.99	0.00
419	Kab. Kepulauan Sula	0	66.46	227.87	0.00
420	Kab. Halmahera Selatan	0	66.93	228.29	0.00
421	Kab. Halmahera Utara	0	66.58	227.47	0.00
32	Provinsi Papua	0	63.41	405.16	0.00
422	Kab. Biak Numfor	0	68.55	300.54	0.00
423	Kab. Jayapura	0	69.97	307.07	0.00
424	Kab. Jayawijaya	0	52.97	497.68	0.00
425	Kab. Merauke	0	64.03	426.95	0.00
426	Kab. Mimika	0	67.84	351.17	0.00
427	Kab. Nabire	0	65.60	287.75	0.00
428	Kab. Paniai	0	58.74	526.66	0.00
429	Kab. Puncak Jaya	0	67.20	702.41	0.00
430	Kab. Yapen Waropen	0	68.06	288.44	0.00
431	Kota Jayapura	0	73.84	285.79	0.00
432	Kab. Sarmi	0	65.90	348.93	0.00
433	Kab. Keerom	0	67.99	328.33	0.00
434	Kab. Yahukimo	0	48.31	496.49	0.00
435	Kab. Pegunungan Bintang	0	47.38	669.72	0.00

436	Kab. Tolikara	0	50.38	533.61	0.00
437	Kab. Boven Digoel	0	18.65	363.69	0.00
438	Kab. Mappi	0	49.04	401.01	0.00
439	Kab. Asmat	0	49.53	477.84	0.00
440	Kab. Waropen	0	61.97	341.54	0.00
441	Kab. Supiori	0	66.92	290.35	0.00
442	Kab. Mamberamo Raya	0	57.31	346.00	0.00
33	Provinsi Papua Barat	0	67.28	291.52	0.00
443	Kab. Sorong	0	67.21	282.93	0.00
444	Kab. Manokwari	0	64.17	283.72	0.00
445	Kab. Fak Fak	0	69.58	303.08	0.00
446	Kota Sorong	0	75.59	244.29	0.00
447	Kab. Sorong Selatan	0	65.38	302.06	0.00
448	Kab. Raja Ampat	0	62.47	319.37	0.00
449	Kab. Teluk Bintuni	0	64.40	305.80	0.00
450	Kab. Teluk Wondama	0	63.40	287.43	0.00
451	Kab. Kaimana	0	68.80	295.55	0.00

Tidak dicetak
<http://www.bps.go.id>

TABEL 1.2: DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU 451 KABUPATEN/KOTA, TAHUN 2009

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	4 293 915	70.35	197.60	17,329,348
2	Kab. Aceh Barat	153,398	69.28	194.71	14,458,629
3	Kab. Aceh Besar	310,107	72.71	192.55	9,733,596
4	Kab. Aceh Selatan	210,111	68.87	194.75	8,857,373
5	Kab. Aceh Singkil	100,265	67.97	199.79	5,216,998
6	Kab. Aceh Tengah	182,533	72.11	196.31	10,099,567
7	Kab. Aceh Tenggara	175,501	70.96	196.31	4,664,719
8	Kab. Aceh Timur	332,915	69.40	199.20	29,706,481
9	Kab. Aceh Utara	517,741	71.39	199.20	23,786,781
10	Kab. Bireun	357,564	72.45	198.54	8,786,414
11	Kab. Pidie	380,382	70.76	192.45	5,299,025
12	Kab. Simeulue	81,790	67.97	226.37	4,063,967
13	Kota Banda Aceh	217,918	76.31	191.66	12,340,849
14	Kota Sabang	29,221	74.48	210.77	8,310,186
15	Kota Langsa	140,267	72.22	198.20	8,582,302
16	Kota Lhokseumawe	158,760	74.65	198.58	56,737,956
17	Kab. Nagan Raya	124,340	67.64	194.74	15,064,467
18	Kab. Aceh Jaya	75,597	68.23	198.01	7,538,896
19	Kab. Aceh Barat Daya	123,101	68.37	198.09	8,794,808
20	Kab. Gayo Lues	74,794	67.08	200.42	8,352,794
21	Kab. Aceh Tamiang	239,899	69.17	197.56	10,714,362
22	Kab. Bener Meriah	112,549	68.88	199.25	9,294,688
23	Kab. Pidie Jaya	130,906	69.96	192.36	6,139,764
24	Kota Subulussalam	64,256	68.28	196.47	5,761,801
25	Provinsi Sumatera Utara	13,042,317	72.78	184.69	14,166,626
26	Kab. Asahan	688,529	71.16	177.70	12,093,552
27	Kab. Dairi	271,983	71.49	179.46	10,641,435
28	Kab. Deli Serdang	1,738,431	73.76	175.89	15,449,620
29	Kab. Tanah Karo	360,880	74.01	179.15	12,759,625
30	Kab. Labuhan Batu	1,027,964	72.54	182.94	14,268,640
31	Kab. Langkat	1,042,523	71.83	176.54	11,149,662
32	Kab. Mandailing Natal	423,712	69.51	182.81	6,235,284
33	Kab. Nias	443,492	67.07	233.36	7,185,412
34	Kab. Simalungun	853,112	72.13	177.28	9,036,067
35	Kab. Tapanuli Selatan	642,299	72.96	183.22	7,214,960
36	Kab. Tapanuli Tengah	314,632	70.01	178.74	5,264,173
37	Kab. Tapanuli Utara	267,595	72.99	179.50	10,348,813
38	Kab. Toba Samosir	171,833	75.33	184.32	14,268,535
39	Kota Binjai	252,652	75.51	176.03	13,338,251
40	Kota Medan	2,102,105	76.22	177.99	26,620,947
41	Kota Pematang Siantar	238,773	76.52	178.39	13,078,887
42	Kota Sibolga	94,614	73.93	185.03	11,536,266

Tabel 1.2. (Lanjutan)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
43	Kota Tanjung Balai	163,679	72.80	181.96	13,940,310
44	Kota Tebing Tinggi	141,059	75.27	177.31	11,549,986
45	Kota Padang Sidempuan	188,499	73.79	185.16	8,179,367
46	Kab. Pakpak Bharat	41,062	69.47	183.86	5,962,684
47	Kab. Nias Selatan	272,848	65.06	235.01	6,223,340
48	Kab. Humbang Hasundutan	155,290	70.79	178.58	11,224,495
49	Kab. Serdang Bedagai	630,728	72.20	177.00	10,391,898
50	Kab. Samosir	131,549	72.87	185.93	9,812,566
51	Kab. Batu Bara	382,474	70.55	181.30	30,410,943
52	Provinsi Sumatera Barat	4,763,099	72.23	181.17	12,729,257
53	Kab. Limapuluh Koto	331,771	69.52	177.18	12,736,081
54	Kab. Agam	429,822	72.06	180.87	10,418,323
55	Kab. Kepulauan Mentawai	68,097	67.72	231.34	13,579,697
56	Kab. Padang Pariaman	387,195	70.09	174.98	11,396,243
57	Kab. Pasaman	257,374	71.05	177.41	8,825,564
58	Kab. Pesisir Selatan	442,257	69.52	182.69	7,071,565
59	Kab. Sawahlunto Sijunjung	202,275	69.26	179.75	10,425,512
60	Kab. Solok	355,705	69.29	175.27	9,731,308
61	Kab. Tanah Datar	335,926	72.44	174.61	11,381,647
62	Kota Bukit Tinggi	106,045	77.13	179.12	13,768,383
63	Kota Padang Panjang	54,218	76.39	177.47	11,969,610
64	Kota Padang	856,815	76.70	173.34	20,722,251
65	Kota Payakumbuh	105,994	74.36	175.01	12,194,927
66	Kota Sawahlunto	54,307	73.74	176.96	13,887,329
67	Kota Solok	58,473	74.28	175.12	13,249,412
68	Kota Pariaman	70,625	72.82	173.89	15,972,444
69	Kab. Pasaman Barat	333,192	68.84	181.06	12,556,376
70	Kab. Dharmasraya	180,915	67.48	177.71	10,180,287
71	Kab. Solok Selatan	132,093	67.54	177.61	7,067,450
72	Provinsi Riau	5,189,154	74.63	204.02	41,412,847
73	Kab. Bengkalis	747,797	73.36	215.08	75,393,041
74	Kab. Indragiri Hilir	670,814	73.87	212.14	22,594,051
75	Kab. Indragiri Hulu	322,759	72.96	206.95	30,129,742
76	Kab. Kampar	598,764	72.98	199.53	27,868,328
77	Kab. Kuantan Singingi	274,757	72.47	199.90	30,189,100
78	Kab. Pelalawan	280,197	71.43	198.81	37,615,428
79	Kab. Rokan Hilir	551,402	71.06	209.51	43,392,164
80	Kab. Rokan Hulu	398,089	71.43	199.99	20,694,023
81	Kab. Siak	322,417	75.15	210.45	102,925,734
82	Kota Dumai	236,778	76.31	212.00	26,561,558
83	Kota Pekanbaru	785,380	76.98	198.89	25,177,239
84	Provinsi Kepulauan Riau	1,453,073	73.68	215.82	37,206,980

Tabel 1.2. (Lanjutan)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
85	Kab. Bintan	125,058	72.97	213.65	28,556,590
86	Kab. Natuna	95,531	69.36	234.27	63,907,675
87	Kab. Karimun	223,878	72.40	213.84	13,956,158
88	Kota Batam	737,533	76.82	212.26	47,461,758
89	Kota Tanjung Pinang	182,741	73.46	211.80	19,530,085
90	Kab. Lingga	88,332	70.25	217.48	8,545,884
91	Provinsi Jambi	2,788,269	71.46	189.38	11,697,441
92	Kab. Batanghari	219,181	71.83	189.34	10,270,857
93	Kab. Bungo	264,389	70.00	188.91	8,422,439
94	Kab. Kerinci	310,093	73.25	189.69	9,857,656
95	Kab. Merangin	286,578	70.73	191.36	6,788,165
96	Kab. Muaro Jambi	310,676	71.59	188.39	8,269,297
97	Kab. Sarolangun	214,036	70.74	193.16	11,074,770
98	Kab. Tanjung Jabung Barat	250,746	71.44	195.95	17,113,354
99	Kab. Tanjung Jabung Timur	211,789	70.23	196.26	21,772,761
100	Kab. Tebo	253,373	70.81	194.56	6,575,346
101	Kota Jambi	467,408	75.07	182.21	12,385,430
102	Provinsi Sumatera Selatan	7,121,790	71.40	185.14	15,654,739
103	Kab. Lahat	340,556	69.35	189.64	11,717,681
104	Kab. Musi Banyuasin	510,387	69.64	194.13	43,799,090
105	Kab. Musi Rawas	499,238	66.31	193.08	11,127,381
106	Kab. Muara Enim	660,906	69.42	183.65	22,602,389
107	Kab. Ogan Komering Ilir	696,505	69.15	187.66	7,005,687
108	Kab. Ogan Komering Ulu	264,743	71.40	182.81	15,943,156
109	Kota Palembang	1,417,047	74.94	183.74	24,668,537
110	Kota Pagar Alam	116,316	71.70	193.84	7,646,767
111	Kota Lubuk Linggau	183,580	69.24	187.59	8,056,730
112	Kota Prabumulih	136,253	72.51	189.08	15,623,665
113	Kab. Banyuasin	798,360	68.60	195.25	10,478,463
114	Kab. Ogan Ilir	378,570	68.17	185.74	6,812,980
115	Kab. OKU Timur	576,699	68.14	184.87	6,350,516
116	Kab. OKU Selatan	329,071	70.28	182.72	5,925,647
117	Kab. Empat Lawang	213,559	67.17	186.17	6,748,964
118	Provinsi Kepulauan Bangka Belitung	1,122,526	71.62	202.19	16,170,337
119	Kab. Bangka	270,704	71.24	200.13	12,566,318
120	Kab. Belitung	138,547	72.19	205.97	14,394,746
121	Kota Pangkal Pinang	156,982	74.55	198.67	13,980,685
122	Kab. Bangka Selatan	161,087	65.82	205.76	12,423,482
123	Kab. Bangka Tengah	145,670	70.34	203.50	16,034,377
124	Kab. Bangka Barat	158,433	69.06	203.31	27,515,328
125	Kab. Belitung Timur	91,103	70.58	207.12	17,114,439

Tabel 1.2. (Lanjutan)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
126	Provinsi Bengkulu	1,641,921	71.57	185.36	7,930,113
127	Kab. Bengkulu Selatan	140,083	70.44	188.28	6,573,581
128	Kab. Bengkulu Utara	343,568	70.16	183.19	5,401,503
129	Kab. Rejang Lebong	253,661	69.35	184.37	10,205,603
130	Kota Bengkulu	274,477	76.61	182.22	12,695,511
131	Kab. Kaur	115,168	67.99	189.88	3,503,435
132	Kab. Seluma	163,859	65.66	185.20	3,479,577
133	Kab. Mukomuko	142,047	69.19	187.10	6,539,505
134	Kab. Lebong	91,142	68.38	184.81	8,715,899
135	Kab. Kepahiang	117,916	66.36	187.95	9,428,031
136	Provinsi Lampung	7,391,128	69.78	180.51	8,357,190
137	Kab. Lampung Barat	383,818	67.74	188.12	4,944,398
138	Kab. Lampung Selatan	1,374,716	68.39	184.27	6,416,666
139	Kab. Lampung Tengah	1,177,967	69.40	186.01	7,923,522
140	Kab. Lampung Utara	567,164	68.97	186.66	8,557,741
141	Kab. Lampung Timur	947,193	69.23	187.73	7,640,427
142	Kab. Tanggamus	830,777	69.62	187.44	5,757,903
143	Kab. Tulang Bawang	787,673	68.63	188.12	10,224,388
144	Kab. Way Kanan	364,778	68.46	185.68	5,596,901
145	Kota Bandar Lampung	822,880	74.29	181.10	12,868,253
146	Kota Metro	134,162	75.31	183.39	5,729,051
147	Provinsi DKI Jakarta	9,146,181	76.59	194.71	62,490,339
148	Provinsi Jawa Barat	40,918,290	70.71	180.81	13,048,168
149	Kab. Bandung	2,816,904	72.97	173.77	11,990,314
150	Kab. Bekasi	2,193,776	71.55	181.14	34,746,338
151	Kab. Bogor	4,029,263	70.08	179.20	12,767,207
152	Kab. Ciamis	1,536,609	70.14	178.24	8,191,998
153	Kab. Cianjur	2,159,020	67.65	174.16	6,339,298
154	Kab. Cirebon	2,107,945	67.30	177.27	6,184,330
155	Kab. Garut	2,282,527	69.99	176.13	7,843,731
156	Kab. Indramayu	1,745,337	66.22	184.61	19,967,093
157	Kab. Karawang	2,010,966	68.45	177.37	18,104,881
158	Kab. Kuningan	1,079,527	69.70	179.26	5,628,502
159	Kab. Majalengka	1,194,198	68.94	175.79	6,102,225
160	Kab. Purwakarta	790,984	69.88	173.88	14,428,811
161	Kab. Subang	1,410,182	70.03	176.75	8,634,690
162	Kab. Sukabumi	2,221,652	69.21	178.64	6,565,538
163	Kab. Sumedang	1,045,605	71.30	174.16	8,698,948
164	Kab. Tasikmalaya	1,690,681	71.24	174.14	5,547,332
165	Kota Bandung	2,400,340	74.86	174.86	21,309,947
166	Kota Bekasi	2,219,708	75.31	180.26	11,838,956

Tabel 1.2. (Lanjutan)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
167	Kota Bogor	996,371	74.73	178.20	8,873,635
168	Kota Cirebon	333,191	73.87	177.59	27,940,411
169	Kota Depok	1,536,282	77.89	177.79	7,022,184
170	Kota Sukabumi	319,981	73.66	179.29	10,186,037
171	Kota Cimahi	621,498	74.42	178.68	15,443,283
172	Kota Tasikmalaya	589,147	72.75	175.22	10,802,829
173	Kota Banjar	167,151	70.17	176.14	7,759,475
174	Kab. Bandung Barat	1,419,445	72.29	174.61	8,772,350
175	Provinsi Banten	9,602,445	69.29	180.46	11,400,592
176	Kab. Lebak	1,234,459	66.74	181.84	4,982,349
177	Kab. Pandeglang	1,092,527	67.39	181.41	5,660,468
178	Kab. Serang	1,826,146	67.45	179.85	7,590,354
179	Kab. Tangerang	3,574,048	70.71	180.36	8,895,893
180	Kota Cilegon	343,599	74.43	179.84	47,447,936
181	Kota Tangerang	1,531,666	74.40	179.44	26,090,042
182	Provinsi Jawa Tengah	32,626,390	70.92	177.71	9,648,737
183	Kab. Banjarnegara	869,777	68.54	175.82	5,446,226
184	Kab. Banyumas	1,503,262	71.23	175.88	4,858,484
185	Kab. Batang	682,561	68.64	181.33	5,713,174
186	Kab. Blora	835,160	69.11	183.28	3,824,446
187	Kab. Boyolali	938,469	69.63	176.34	6,119,949
188	Kab. Brebes	1,788,687	66.57	179.00	5,377,953
189	Kab. Cilacap	1,626,795	70.25	176.10	40,085,430
190	Kab. Demak	1,034,286	71.05	177.87	4,229,704
191	Kab. Grobogan	1,336,322	69.75	182.68	3,436,542
192	Kab. Jepara	1,090,839	71.45	179.61	6,025,264
193	Kab. Karanganyar	812,423	71.59	176.50	8,572,708
194	Kab. Kebumen	1,215,801	69.96	177.57	3,779,937
195	Kab. Kendal	952,011	68.91	181.54	8,195,773
196	Kab. Klaten	1,133,012	72.48	178.29	7,396,234
197	Kab. Kudus	786,269	71.66	181.67	30,421,849
198	Kab. Magelang	1,170,894	71.03	178.20	5,045,345
199	Kab. Pati	1,171,605	71.87	179.65	5,753,422
200	Kab. Pekalongan	851,700	69.69	177.21	6,034,265
201	Kab. Pemasang	1,375,240	67.89	180.57	4,251,058
202	Kab. Purbalingga	828,125	70.38	176.07	4,729,751
203	Kab. Purworejo	722,293	70.68	175.70	6,478,748
204	Kab. Rembang	575,640	70.54	181.03	6,295,341
205	Kab. Semarang	911,223	72.93	177.62	9,080,095
206	Kab. Sragen	860,509	68.98	175.59	5,259,949
207	Kab. Sukoharjo	826,699	72.46	176.09	8,606,628

Tabel 1.2. (Lanjutan)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
208	Kab. Tegal	1,415,625	68.83	178.21	3,529,798
209	Kab. Temanggung	707,707	73.08	178.47	5,201,366
210	Kab. Wonogiri	982,730	70.11	179.82	4,643,993
211	Kab. Wonosobo	757,746	69.22	176.83	3,927,372
212	Kota Magelang	134,615	75.69	178.43	11,183,812
213	Kota Pekalongan	275,241	73.10	177.45	10,952,638
214	Kota Salatiga	178,451	75.37	178.66	7,843,014
215	Kota Semarang	1,511,236	76.11	175.75	20,499,002
216	Kota Surakarta	522,935	76.58	176.87	13,349,437
217	Kota Tegal	240,502	72.72	178.89	7,797,682
218	Provinsi DI Yogyakarta	3,468,502	74.15	180.27	9,584,047
219	Kab. Bantul	909,812	72.78	180.41	7,145,697
220	Kab. Gunung Kidul	686,772	69.68	187.76	7,110,408
221	Kab. Kulon Progo	374,783	72.76	180.78	7,138,195
222	Kab. Sleman	1,040,220	76.70	180.49	9,712,226
223	Kota Yogyakarta	456,915	78.14	178.74	19,062,569
224	Provinsi Jawa Timur	37,094,836	69.78	175.95	14,498,199
225	Kab. Bangkalan	956,996	62.97	184.51	5,652,183
226	Kab. Banyuwangi	1,531,753	67.24	175.95	10,148,858
227	Kab. Blitar	1,070,122	72.28	174.41	8,127,759
228	Kab. Bojonegoro	1,263,551	65.50	172.04	10,075,958
229	Kab. Bondowoso	707,242	60.76	174.75	5,110,477
230	Kab. Gresik	1,194,821	73.00	173.64	20,614,438
231	Kab. Jember	2,320,844	63.27	174.37	7,049,904
232	Kab. Jombang	1,285,739	71.44	172.06	7,667,346
233	Kab. Kediri	1,451,630	70.39	175.09	6,876,050
234	Kab. Lamongan	1,189,087	67.88	171.94	5,878,169
235	Kab. Lumajang	1,024,849	66.20	177.45	9,343,640
236	Kab. Madiun	642,518	68.24	173.89	6,679,230
237	Kab. Magetan	625,424	71.20	176.16	8,094,394
238	Kab. Malang	2,413,779	69.07	175.14	9,036,586
239	Kab. Mojokerto	1,005,486	71.99	172.21	9,655,146
240	Kab. Nganjuk	1,000,132	69.25	173.32	7,267,738
241	Kab. Ngawi	834,847	67.52	175.22	6,042,336
242	Kab. Pacitan	557,029	70.48	180.18	4,105,800
243	Kab. Pamekasan	835,101	62.49	190.02	4,070,637
244	Kab. Pasuruan	1,448,370	65.52	173.32	7,383,729
245	Kab. Ponorogo	895,921	68.55	176.82	5,559,568
246	Kab. Probolinggo	1,043,671	60.97	172.65	9,943,111
247	Kab. Sampang	902,429	56.99	188.57	4,351,491
248	Kab. Sidoarjo	1,781,405	74.87	177.45	22,275,201
249	Kab. Situbondo	623,042	62.64	174.16	9,288,551
250	Kab. Sumenep	1,016,907	63.71	195.47	8,093,210

Tabel 1.2. (Lanjutan)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
251	Kab. Trenggalek	675,380	71.68	179.50	4,423,296
252	Kab. Tuban	1,078,641	66.61	174.96	9,545,949
253	Kab. Tulungagung	988,731	72.00	175.29	11,375,764
254	Kota Blitar	132,278	75.88	174.74	8,315,275
255	Kota Kediri	270,374	74.45	175.05	155,863,466
256	Kota Madiun	178,291	75.42	174.34	10,773,220
257	Kota Malang	816,637	75.72	175.38	25,402,331
258	Kota Mojokerto	113,201	75.66	172.02	16,883,047
259	Kota Pasuruan	174,073	72.20	173.50	10,487,278
260	Kota Probolinggo	226,643	72.76	171.85	14,685,949
261	Kota Surabaya	2,630,079	75.87	171.81	48,779,540
262	Kota Batu	187,813	72.83	172.23	10,799,162
263	Provinsi Kalimantan Barat	4,249,117	67.53	206.92	10,165,998
264	Kab. Bengkayang	205,675	66.32	204.70	8,338,576
265	Kab. Landak	324,976	66.43	203.97	6,699,093
266	Kab. Kapuas Hulu	218,804	69.26	230.00	7,763,815
267	Kab. Ketapang	408,549	66.02	202.73	10,442,144
268	Kab. Pontianak	711,696	67.43	203.29	11,068,304
269	Kab. Sambas	491,077	63.01	207.92	8,552,633
270	Kab. Sanggau	388,909	67.64	210.00	10,127,508
271	Kab. Sintang	365,058	66.89	211.19	7,737,543
272	Kota Pontianak	521,569	71.59	202.06	16,394,775
273	Kota Singkawang	175,198	67.61	204.50	10,357,944
274	Kab. Sekadau	178,129	65.75	210.07	4,935,561
275	Kab. Melawi	168,309	67.61	216.37	4,181,779
276	Kab. Kayong Utara	91,168	64.19	202.49	6,498,917
277	Provinsi Kalimantan Tengah	2,057,305	73.49	211.18	13,765,224
278	Kab. Barito Selatan	127,314	72.56	216.29	12,103,983
279	Kab. Barito Utara	116,538	74.12	205.83	14,042,863
280	Kab. Kapuas	341,109	72.58	204.08	9,474,989
281	Kab. Kotawaringin Barat	223,421	72.14	210.66	15,688,405
282	Kab. Kotawaringin Timur	324,025	72.90	211.59	16,110,218
283	Kota Palangkaraya	189,581	77.47	198.42	12,847,366
284	Kab. Barito Timur	87,491	71.66	212.04	11,929,147
285	Kab. Murung Raya	89,462	71.62	217.63	16,449,488
286	Kab. Pulang Pisau	120,216	70.10	211.74	7,931,198
287	Kab. Gunung Mas	92,046	72.40	216.99	10,428,804
288	Kab. Lamandau	58,706	71.54	219.32	14,050,660
289	Kab. Sukamara	38,524	70.65	219.75	21,455,211
290	Kab. Katingan	136,560	71.59	207.31	14,467,464
291	Kab. Seruyan	112,312	71.62	218.69	16,097,576
292	Provinsi Kalimantan Selatan	3,446,631	68.01	195.02	11,613,224

Tabel 1.2. (Lanjutan)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
293	Kab. Banjar	489,056	69.43	191.26	9,870,197
294	Kab. Barito Kuala	272,332	65.89	198.61	10,631,604
295	Kab. Hulu Sungai Selatan	208,571	69.35	196.01	7,237,238
296	Kab. Hulu Sungai Tengah	244,192	69.29	194.71	5,757,274
297	Kab. Hulu Sungai Utara	216,181	67.01	200.00	4,703,845
298	Kab. Kota Baru	276,574	69.98	200.93	24,713,209
299	Kab. Tabalong	193,082	68.51	199.32	17,776,058
300	Kab. Tanah Laut	270,091	69.85	193.73	10,936,348
301	Kab. Tapin	153,066	69.34	193.35	8,278,880
302	Kota Banjar Baru	167,737	73.58	192.38	7,795,355
303	Kota Banjarmasin	627,245	72.38	190.74	11,213,395
304	Kab. Balangan	102,296	65.13	197.46	18,398,865
305	Kab. Tanah Bumbu	226,208	67.88	200.87	17,545,736
306	Provinsi Kalimantan Timur	3,094,673	73.77	209.57	70,120,040
307	Kab. Berau	168,324	72.12	213.51	26,700,014
308	Kab. Bulungan	114,362	73.33	214.58	18,646,700
309	Kab. Kutai Kartanegara	527,362	71.53	206.14	139,575,005
310	Kab. Kutai Barat	159,816	71.93	215.08	25,228,053
311	Kab. Kutai Timur	190,662	70.46	219.36	97,381,458
312	Kab. Malinau	59,722	71.68	223.83	18,477,081
313	Kab. Nunukan	133,336	72.17	223.42	19,521,011
314	Kab. Paser	182,831	72.70	210.58	33,985,567
315	Kota Balikpapan	512,128	76.62	205.82	56,284,083
316	Kota Bontang	133,512	75.61	214.21	407,105,049
317	Kota Samarinda	602,117	75.62	204.59	26,763,919
318	Kota Tarakan	184,131	75.30	223.32	23,299,822
319	Kab. Penajam Paser Utara	126,370	72.00	211.17	17,660,942
320	Provinsi Sulawesi Utara	2,208,012	74.68	211.49	11,100,201
321	Kab. Bolaang Mongondow	302,393	71.98	192.98	7,308,495
322	Kab. Minahasa	298,179	74.50	193.19	9,375,525
323	Kab. Sangihe	130,290	74.19	264.05	6,891,159
324	Kota Bitung	178,266	74.15	190.46	16,268,891
325	Kota Manado	429,149	76.76	191.07	17,186,018
326	Kab. Kepulauan Talaud	74,892	73.77	280.68	7,411,815
327	Kab. Minahasa Selatan	182,292	73.32	193.76	9,594,297
328	Kota Tomohon	83,200	75.12	192.30	10,140,249
329	Kab. Minahasa Utara	174,455	74.90	191.31	10,186,179
330	Kota Kotamubagu	117,965	73.90	195.60	5,402,002
331	Kab. Bolaang Mongondow Utara	80,134	71.30	197.16	6,082,514
332	Kab. Kep. Siau Tagulandang Biaro	61,652	72.10	264.81	5,933,355
333	Kab. Minahasa Tenggara	95,145	71.45	199.57	12,189,349
334	Provinsi Gorontalo	972,208	68.83	196.14	4,957,328

Tabel 1.2. (Lanjutan)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
335	Kab. Boalemo	127,639	67.24	199.87	4,198,519
336	Kab. Gorontalo	339,620	67.77	195.87	3,557,039
337	Kota Gorontalo	165,175	71.64	194.54	6,037,490
338	Kab. Pohuwato	114,572	68.81	210.42	6,330,440
339	Kab. Bone Bolango	130,025	69.97	193.86	4,737,602
340	Kab. Gorontalo Utara	95,177	67.48	196.41	3,159,425
341	Provinsi Sulawesi Tengah	2,438,373	69.34	195.39	9,074,112
342	Kab. Banggai	295,555	69.33	191.21	7,970,905
343	Kab. Banggai Kepulauan	155,728	65.93	215.19	5,856,224
344	Kab. Buol	117,028	68.17	196.62	7,066,216
345	Kab. Toli-Toli	198,441	66.88	193.16	8,469,139
346	Kab. Donggala	471,492	68.09	183.95	9,017,329
347	Kab. Morowali	177,720	69.23	197.05	12,158,687
348	Kab. Poso	160,830	68.47	192.79	9,156,483
349	Kota Palu	309,032	75.14	181.88	12,582,428
350	Kab. Parigi Moutong	372,286	67.15	188.50	10,967,213
351	Kab. Tojo Una Una	180,261	67.28	193.02	3,844,690
352	Provinsi Sulawesi Selatan	7,805,024	69.62	185.79	8,996,056
353	Kab. Bantaeng	172,849	68.33	183.39	6,020,354
354	Kab. Barru	161,732	68.97	182.60	6,298,624
355	Kab. Bone	705,717	68.34	185.88	6,310,992
356	Kab. Bulukumba	390,543	69.27	186.87	5,699,441
357	Kab. Enrekang	188,070	73.32	187.65	6,103,457
358	Kab. Gowa	605,876	68.87	181.93	4,802,864
359	Kab. Jeneponto	332,334	63.42	183.11	3,908,755
360	Kab. Luwu	324,229	72.46	187.62	7,039,735
361	Kab. Luwu Utara	313,674	72.55	194.25	6,103,675
362	Kab. Maros	303,211	69.22	182.23	5,033,997
363	Kab. Pangkajene Kepulauan	295,137	67.73	184.24	10,817,285
364	Kab. Pinrang	346,988	71.43	182.70	8,886,852
365	Kab. Selayar	119,811	67.74	203.79	5,429,604
366	Kab. Sidenreng Rappang	250,666	71.18	184.43	7,896,586
367	Kab. Sinjai	225,943	68.24	187.10	7,141,520
368	Kab. Soppeng	229,502	70.26	184.69	6,972,591
369	Kab. Takalar	255,154	66.95	182.81	5,070,562
370	Kab. Tana Toraja	461,012	70.18	187.90	3,939,262
371	Kab. Wajo	378,512	68.04	186.61	8,690,771
372	Kota Pare-pare	117,591	76.47	182.71	9,143,191
373	Kota Makassar	1,253,656	77.33	181.42	16,834,573
374	Kota Palopo	141,996	75.37	187.03	8,411,540
375	Kab. Luwu Timur	230,821	71.67	195.06	29,004,788

Tabel 1.2. (Lanjutan)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
376	Provinsi Sulawesi Barat	1,032,256	67.72	194.52	6,091,286
377	Kab. Majene	133,183	69.12	193.38	6,095,355
378	Kab. Mamuju	305,473	67.60	197.06	6,496,802
379	Kab. Polewali Mandar	361,342	64.77	193.37	5,032,233
380	Kab. Mamasa	125,309	69.16	204.32	5,428,454
381	Kab. Mamuju Utara	106,949	68.84	198.75	7,936,027
382	Provinsi Sulawesi Tenggara	2,074,974	68.32	199.33	8,837,210
383	Kab. Buton	279,546	67.08	204.21	4,315,419
384	Kab. Konawe	228,706	67.96	197.69	7,051,867
385	Kab. Kolaka	281,450	69.76	194.12	15,494,613
386	Kab. Muna	246,004	65.93	200.14	6,888,137
387	Kota Kendari	254,236	74.55	191.04	11,330,240
388	Kota Bau-bau	127,743	71.56	204.79	10,067,416
389	Kab. Konawe Selatan	240,053	68.37	200.31	6,290,070
390	Kab. Bombana	109,883	65.35	197.26	6,380,004
391	Kab. Wakatobi	101,475	65.54	209.05	4,623,903
392	Kab. Kolaka Utara	111,418	67.57	195.36	13,267,121
393	Kab. Konawe Utara	45,760	66.83	200.32	13,650,780
394	Kab. Buton Utara	48,700	66.89	208.51	10,899,175
395	Provinsi Bali	3,515,990	72.47	180.52	12,166,391
396	Kab. Badung	416,194	73.64	182.89	21,560,045
397	Kab. Bangli	217,101	69.01	177.35	7,475,898
398	Kab. Buleleng	625,530	69.15	187.62	8,105,847
399	Kab. Gianyar	437,231	71.66	175.51	11,008,643
400	Kab. Jembrana	256,292	71.40	185.54	9,745,538
401	Kab. Karangasem	385,335	65.11	183.50	7,114,922
402	Kab. Klungkung	167,198	69.01	185.97	11,050,496
403	Kab. Tabanan	412,181	73.11	181.44	8,470,189
404	Kota Denpasar	598,928	76.59	173.96	13,410,214
405	Provinsi Nusa Tenggara Barat	4,363,756	63.71	188.97	7,808,657
406	Kab. Bima	416,446	63.86	185.12	4,989,577
407	Kab. Dompu	213,185	64.04	192.94	6,660,785
408	Kab. Lombok Barat	816,523	59.34	184.80	4,693,651
409	Kab. Lombok Tengah	844,105	59.02	192.72	3,649,728
410	Kab. Lombok Timur	1,068,486	61.12	187.05	4,095,600
411	Kab. Sumbawa	413,869	64.99	196.06	6,500,168
412	Kota Mataram	362,243	70.71	184.74	8,668,928
413	Kota Bima	129,843	67.13	186.11	5,313,029
414	Kab. Sumbawa Barat	99,056	65.52	196.81	131,172,404
415	Provinsi Nusa Tenggara Timur	4,534,319	65.36	209.37	4,301,535
416	Kab. Alor	180,487	67.31	215.63	3,276,138
417	Kab. Belu	441,451	62.82	206.55	3,006,916

Tabel 1.2. (Lanjutan)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
418	Kab. Ende	238,127	65.39	211.02	4,619,220
419	Kab. Flores Timur	234,076	66.74	213.74	3,969,850
420	Kab. Kupang	383,896	64.57	205.83	4,267,604
421	Kab. Lembata	106,312	66.10	215.06	2,291,327
422	Kab. Manggarai	512,065	65.78	211.22	2,774,004
423	Kab. Ngada	133,406	67.95	213.55	4,446,096
424	Kab. Sikka	278,628	66.04	208.78	4,373,516
425	Kab. Sumba Barat	106,524	60.82	209.75	4,181,780
426	Kab. Sumba Timur	228,351	60.26	210.08	4,379,050
427	Kab. Timor Tengah Selatan	417,942	64.43	205.76	3,504,896
428	Kab. Timor Tengah Utara	213,153	65.84	204.72	2,992,814
429	Kota Kupang	292,922	75.91	204.21	10,616,156
430	Kab. Rote Ndao	114,236	64.61	207.68	3,508,606
431	Kab. Manggarai Barat	206,367	63.99	210.40	3,202,138
432	Kab. Nagekeo	124,992	65.32	213.34	3,760,673
433	Kab. Sumba Barat Daya	261,211	59.29	209.59	2,266,307
434	Kab. Sumba Tengah	60,173	58.63	214.72	2,672,998
435	Provinsi Maluku	1,320,749	69.96	233.83	4,377,086
436	Kab. Maluku Tenggara Barat	156,246	67.14	244.76	4,259,733
437	Kab. Maluku Tengah	330,433	69.06	227.88	2,547,973
438	Kab. Maluku Tenggara	138,840	71.04	244.56	3,696,313
439	Kab. Pulau Buru	132,363	67.49	228.49	3,195,142
440	Kota Ambon	265,003	77.46	223.54	9,106,110
441	Kab. Seram Bagian Barat	143,137	68.28	229.98	3,013,300
442	Kab. Seram Bagian Timur	82,693	66.18	230.56	2,532,815
443	Kab. Kepulauan Aru	72,034	68.91	244.61	4,145,517
444	Provinsi Maluku Utara	959,598	67.82	227.54	3,346,523
445	Kab. Halmahera Tengah	34,410	67.61	236.04	7,351,036
446	Kab. Halmahera Barat	97,424	65.56	227.47	2,466,065
447	Kota Ternate	170,016	74.93	222.97	3,517,349
448	Kab. Halmahera Timur	66,965	66.68	236.64	4,351,229
449	Kota Tidore Kepulauan	81,921	68.13	224.99	3,551,621
450	Kab. Kepulauan Sula	129,871	66.46	227.87	2,952,814
451	Kab. Halmahera Selatan	188,156	66.93	228.29	3,208,079
452	Kab. Halmahera Utara	190,835	66.58	227.47	2,974,685
453	Provinsi Papua	2,056,517	63.41	405.16	27,468,415
454	Kab. Biak Numfor	109,292	68.55	300.54	10,042,021
455	Kab. Jayapura	99,586	69.97	307.07	11,792,354
456	Kab. Jayawijaya	228,187	52.97	497.68	4,407,025
457	Kab. Merauke	172,478	64.03	426.95	13,546,980
458	Kab. Mimika	143,486	67.84	351.17	282,272,448
459	Kab. Nabire	173,793	65.60	287.75	8,616,426
460	Kab. Paniai	122,708	58.74	526.66	5,007,366

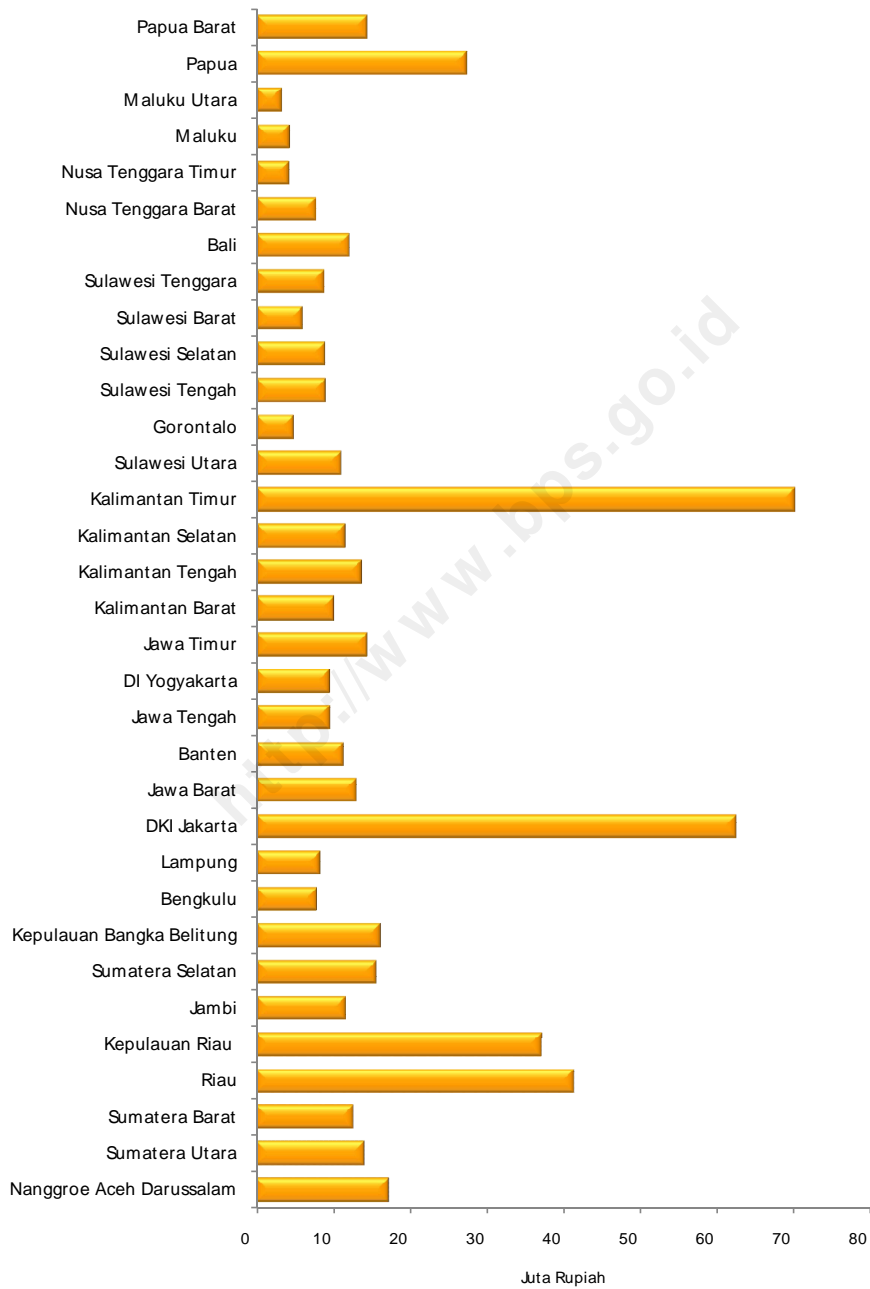
Tabel 1.2. (Lanjutan)

No.	Kabupaten/ Kota	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
461	Kab. Puncak Jaya	122,866	67.20	702.41	4,557,037
462	Kab. Yapen Waropen	77,778	68.06	288.44	6,413,776
463	Kota Jayapura	220,109	73.84	285.79	18,618,314
464	Kab. Sarmi	23,258	65.90	348.93	18,169,578
465	Kab. Keerom	44,402	67.99	328.33	11,673,934
466	Kab. Yahukimo	151,139	48.31	496.49	1,124,400
467	Kab. Pegunungan Bintang	96,511	47.38	669.72	2,469,029
468	Kab. Tolikara	49,270	50.38	533.61	4,438,380
469	Kab. Boven Digoel	34,786	48.65	363.69	25,681,951
470	Kab. Mappi	71,009	49.04	401.01	5,671,519
471	Kab. Asmat	67,898	49.53	477.84	5,354,856
472	Kab. Waropen	15,397	61.97	341.54	10,938,965
473	Kab. Supiori	12,642	66.92	290.35	11,378,219
474	Kab. Mamberamo Raya	19,922	57.31	346.00	5,865,217
475	Provinsi Papua Barat	729,962	67.28	291.52	14,483,032
476	Kab. Sorong	98,091	67.21	282.93	34,515,326
477	Kab. Manokwari	173,382	64.17	283.72	9,943,055
478	Kab. Fak Fak	66,864	69.58	303.08	13,898,522
479	Kota Sorong	169,278	75.59	244.29	11,267,966
480	Kab. Sorong Selatan	61,463	65.38	302.06	5,422,815
481	Kab. Raja Ampat	41,170	62.47	319.37	19,584,627
482	Kab. Teluk Bintuni	54,528	64.40	305.80	12,135,605
483	Kab. Teluk Wondama	23,140	63.40	287.43	7,606,327
484	Kab. Kaimana	42,046	68.80	295.55	12,925,864

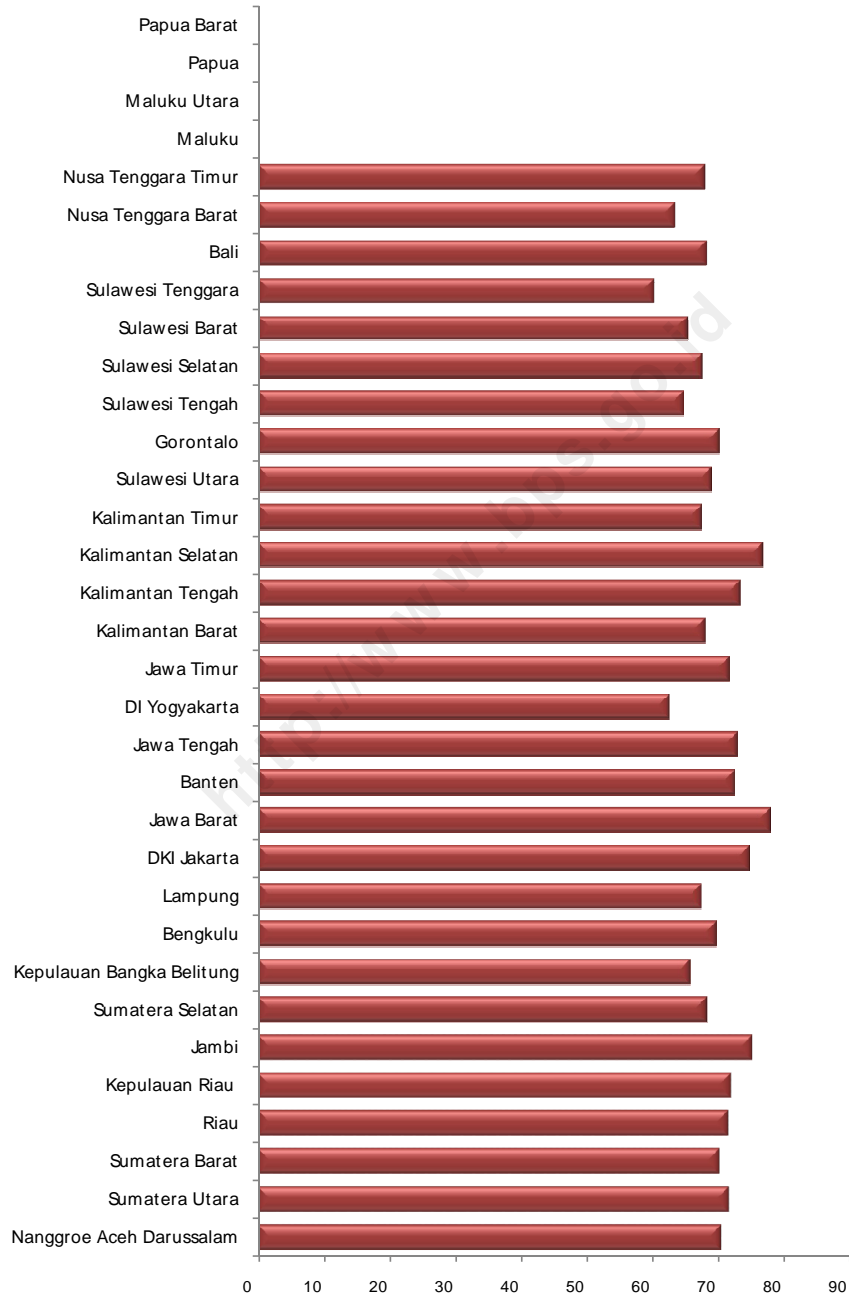
TABEL 1.2: DATA DASAR PENGHITUNGAN DAU 33 PROVINSI, TAHUN 2009

No.	Provinsi	Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008 (ribu org)	IPM 2007	IKK 2008	PDRB per kapita 2007 dengan Migas (Juta Rp.)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Nanggroe Aceh Darussalam	4,294	70.35	197.60	17.33
2	Sumatera Utara	13,042	71.43	179.46	14.17
3	Sumatera Barat	4,763	70.29	174.98	12.73
4	Riau	5,189	71.13	198.81	41.41
5	Kepulauan Riau	1,453	71.33	189.34	37.21
6	Jambi	2,738	75.07	182.21	11.70
7	Sumatera Selatan	11,221	68.17	185.74	15.65
8	Kepulauan Bangka Belitung	1,123	65.66	185.20	16.17
9	Bengkulu	1,642	69.62	187.44	7.93
10	Lampung	7,391	67.30	177.27	8.36
11	DKI Jakarta	9,146	74.73	178.20	62.49
12	Jawa Barat	40,918	77.89	177.79	13.05
13	Banten	9,602	72.48	178.29	11.40
14	Jawa Tengah	32,626	72.93	177.62	9.65
15	DI Yogyakarta	3,469	62.49	190.02	9.58
16	Jawa Timur	37,095	71.68	179.50	14.50
17	Kalimantan Barat	4,249	68.01	195.02	10.17
18	Kalimantan Tengah	2,057	73.33	214.58	13.77
19	Kalimantan Selatan	3,447	76.76	191.07	11.61
20	Kalimantan Timur	3,095	67.48	196.41	70.12
21	Sulawesi Utara	2,208	68.97	182.60	11.10
22	Gorontalo	972	70.18	187.90	4.96
23	Sulawesi Tengah	2,438	64.77	193.37	9.07
24	Sulawesi Selatan	7,805	67.57	195.36	9.00
25	Sulawesi Barat	1,032	65.39	211.02	6.09
26	Sulawesi Tenggara	2,075	60.26	210.08	8.84
27	Bali	3,516	68.28	229.98	12.17
28	Nusa Tenggara Barat	4,364	63.41	405.16	7.81
29	Nusa Tenggara Timur	4,534	67.99	328.33	4.30
30	Maluku	1,321	0.00	0.00	4.38
31	Maluku Utara	960	0.00	0.00	3.35
32	Papua	2,057	0.00	0.00	27.47
33	Papua Barat	730	0.00	0.00	14.48

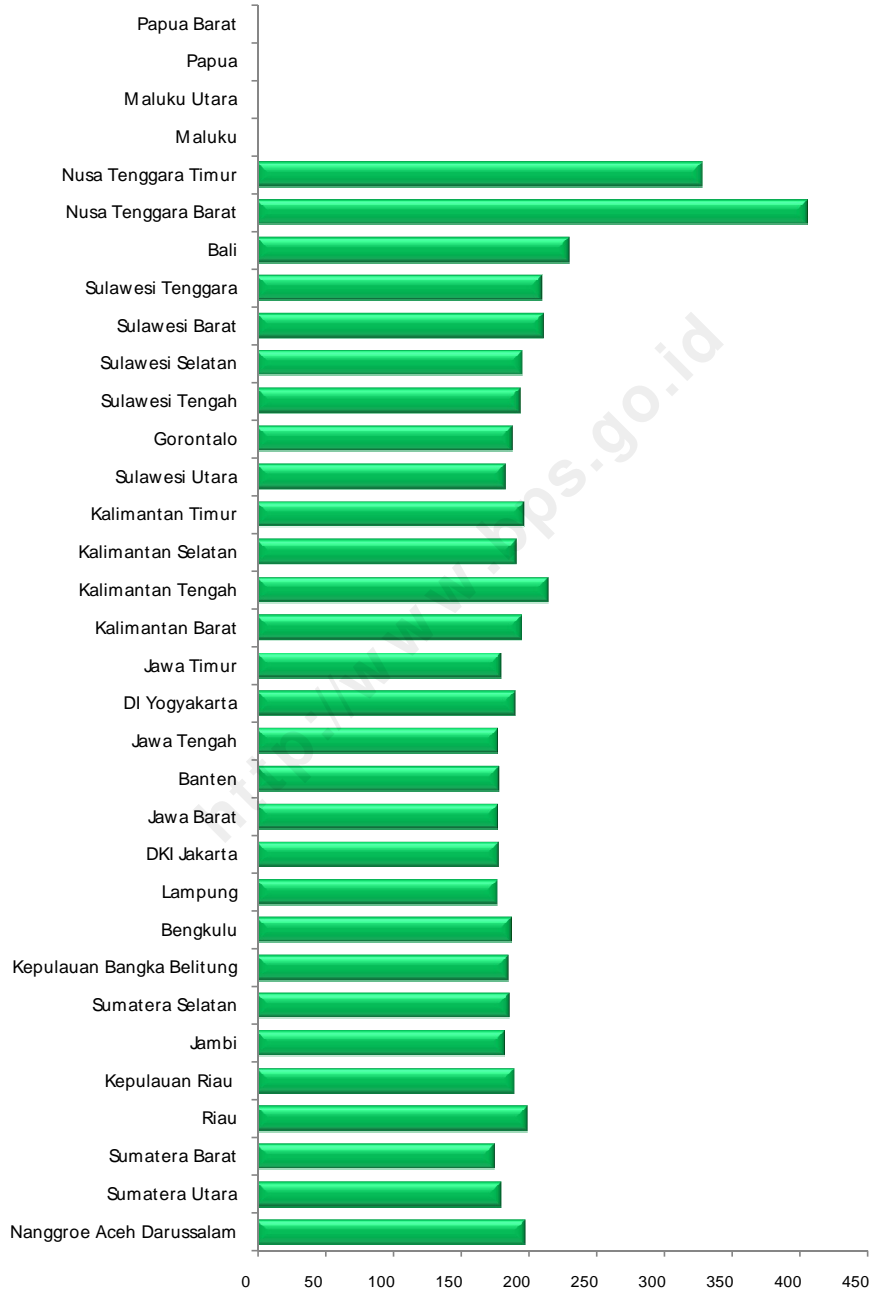
Grafik 1.a. PDRB per Kapita
Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2007



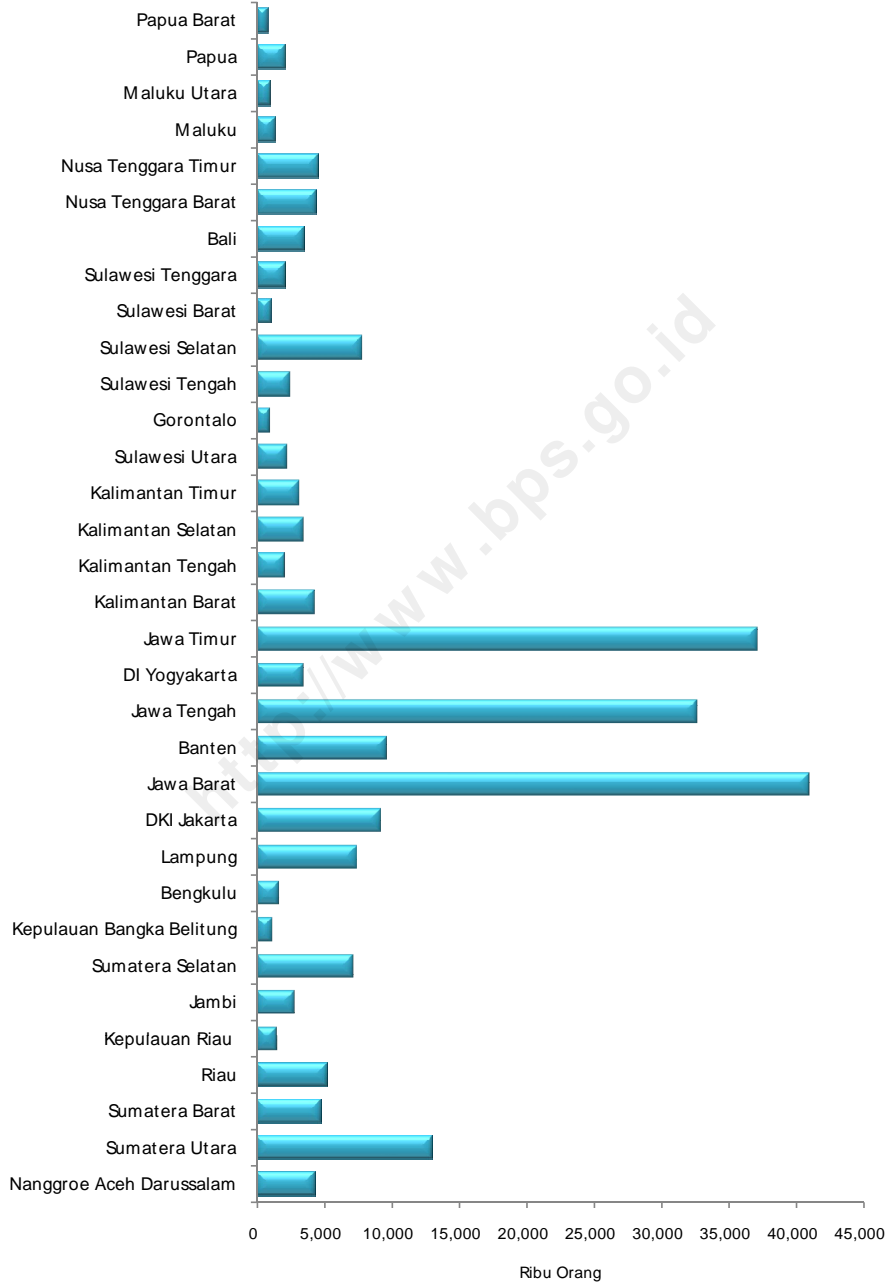
**Grafik 1.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi-Provinsi di Indonesia Tahun 2007**



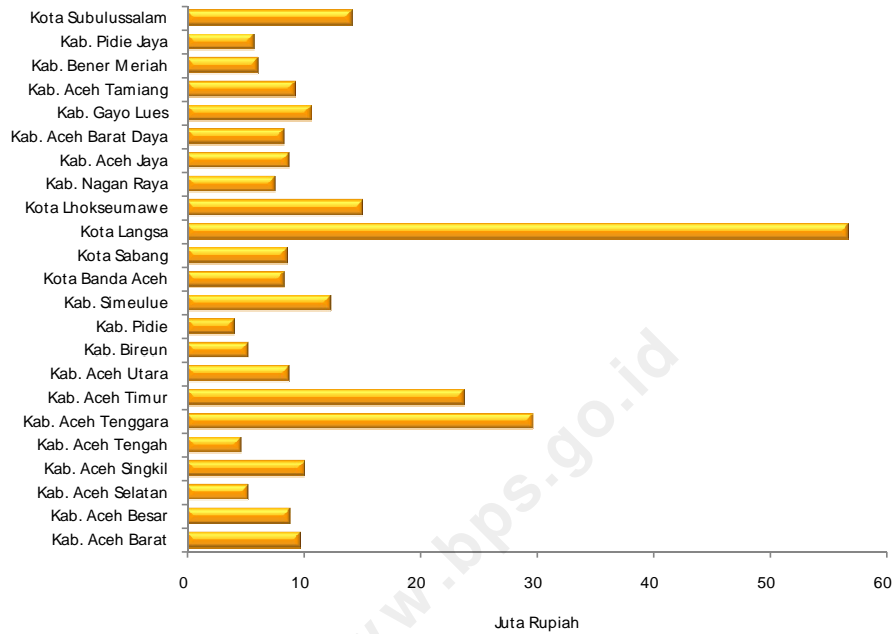
**Grafik 1.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi-Provinsi di Indonesia**



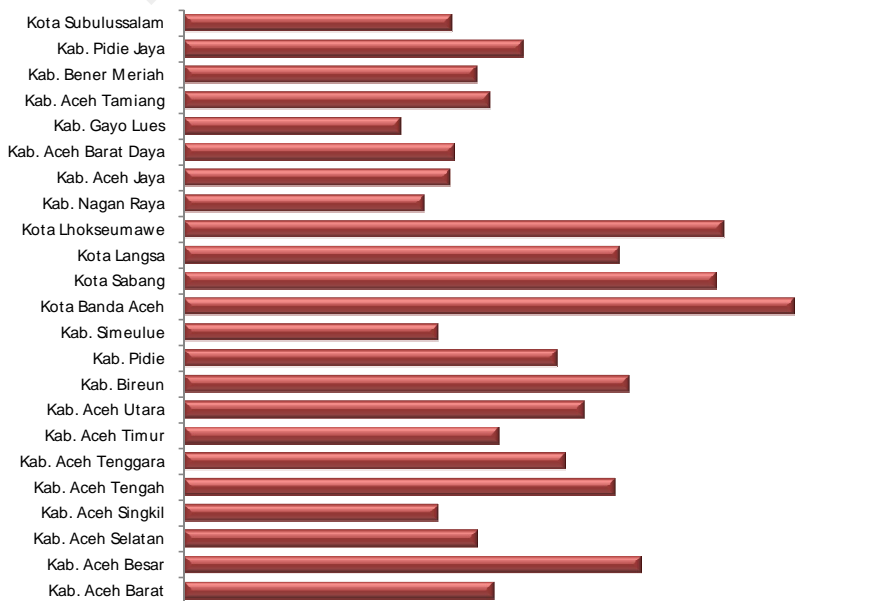
**Grafik 1.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi-Provinsi di Indonesia**



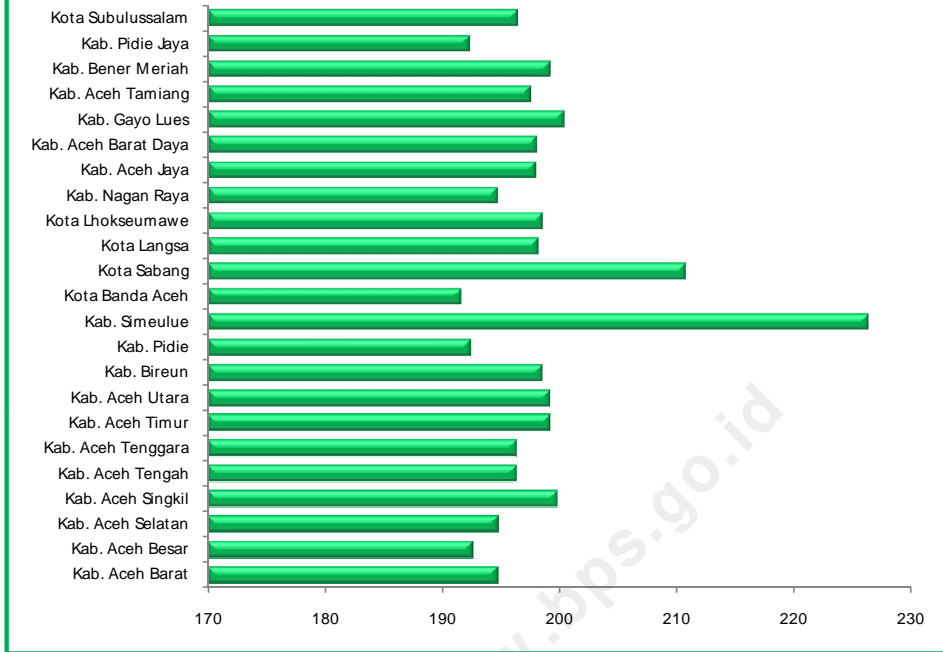
**Grafik 2.a. PDRB per Kapita
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007**



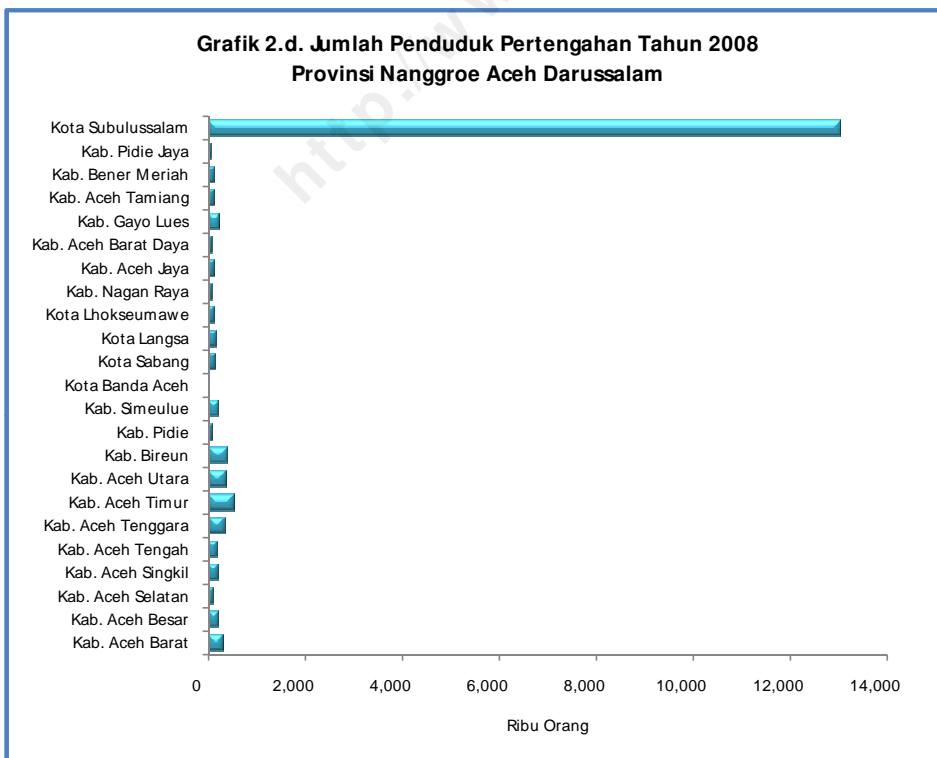
**Grafik 2.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007**



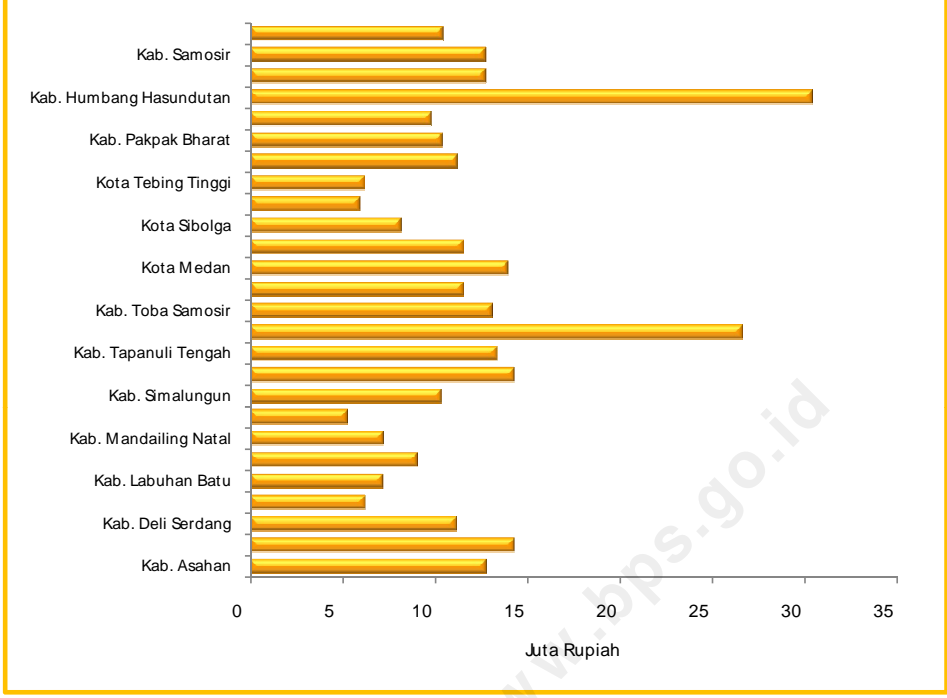
**Grafik 2.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**



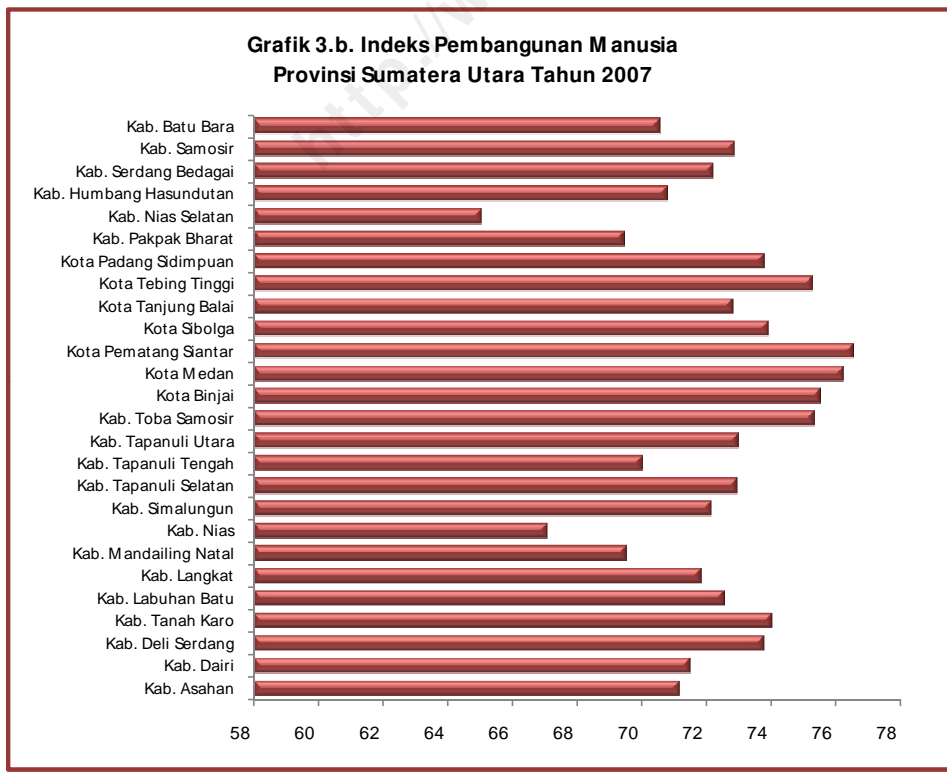
**Grafik 2.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam**



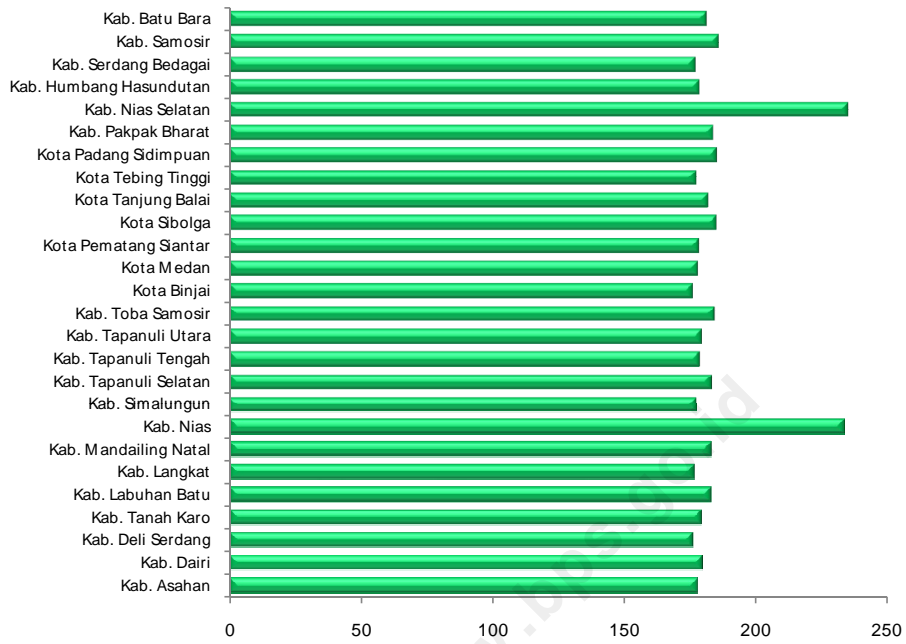
**Grafik 3.a. PDRB per Kapita
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007**



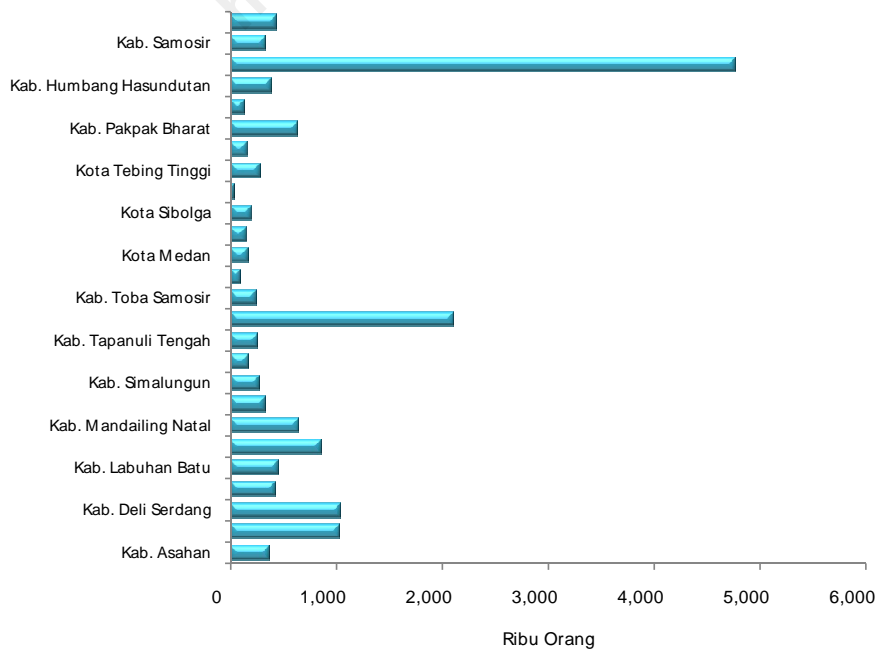
**Grafik 3.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Sumatera Utara Tahun 2007**

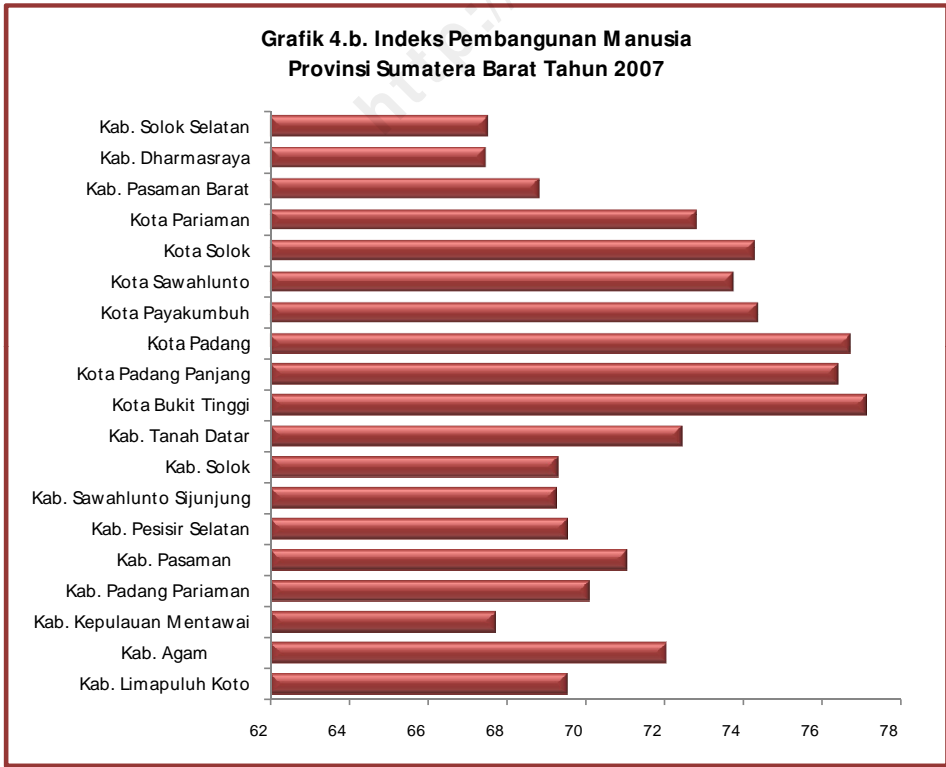
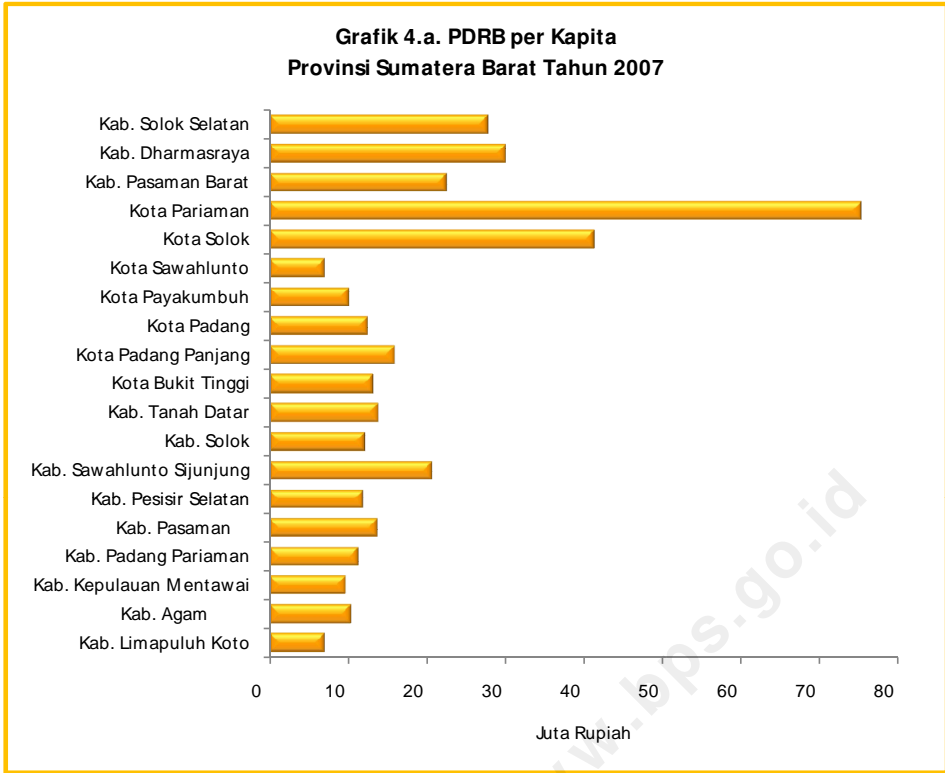


**Grafik 3.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Sumatera Utara**

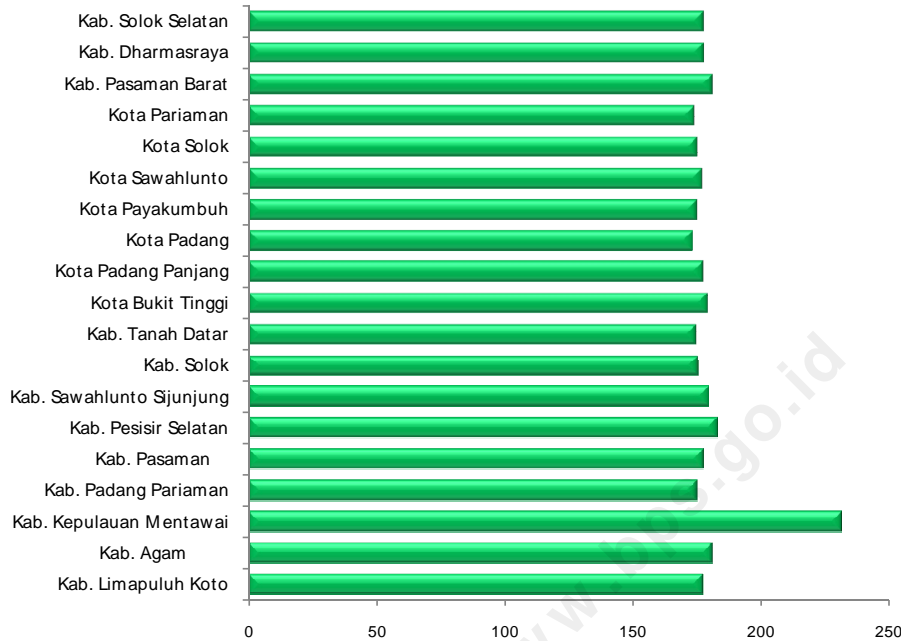


**Grafik 3.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Sumatera Utara**

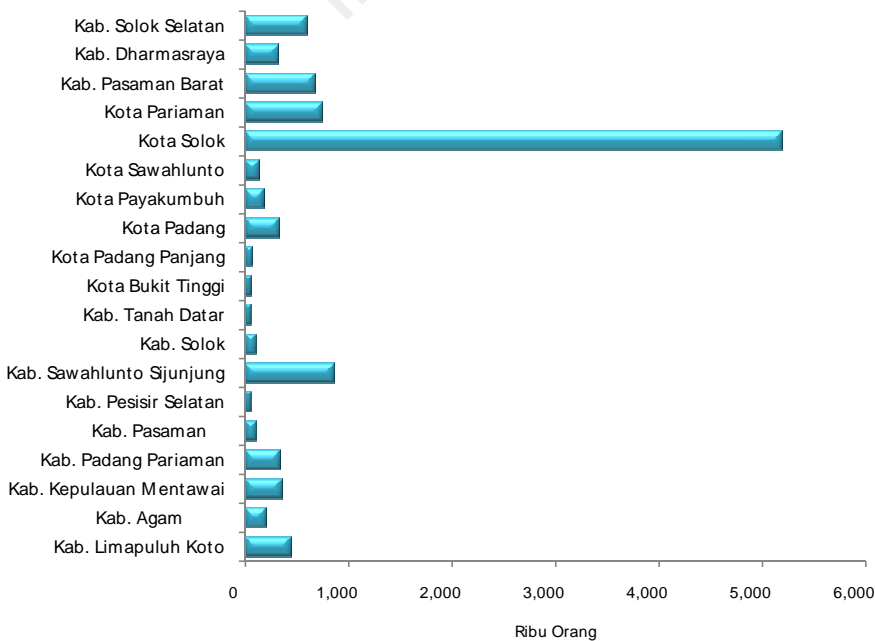


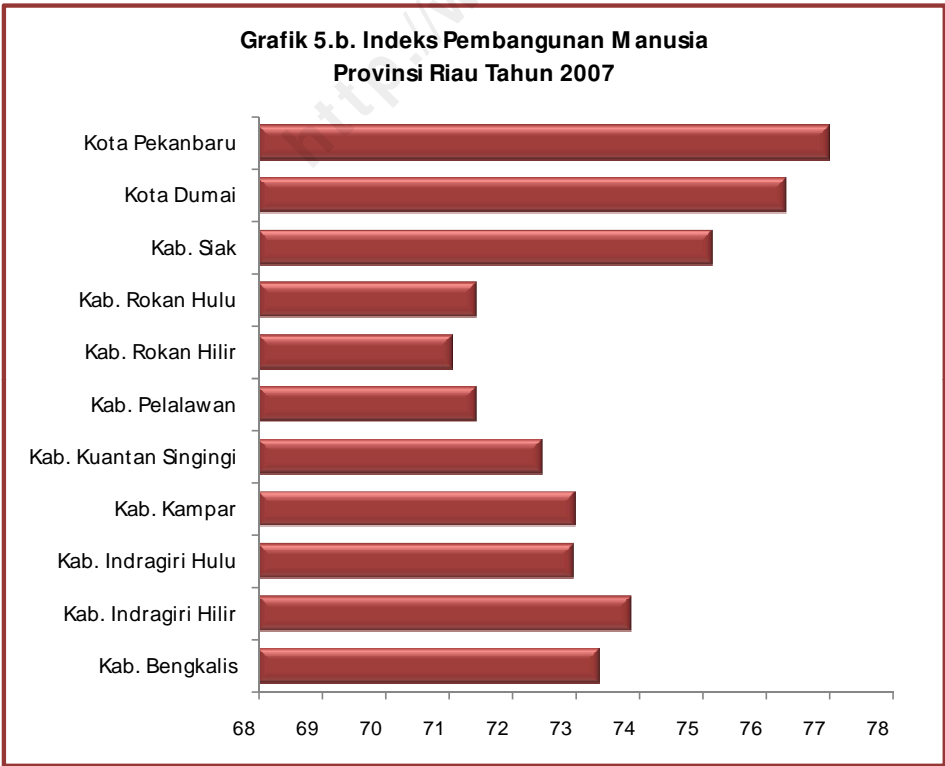
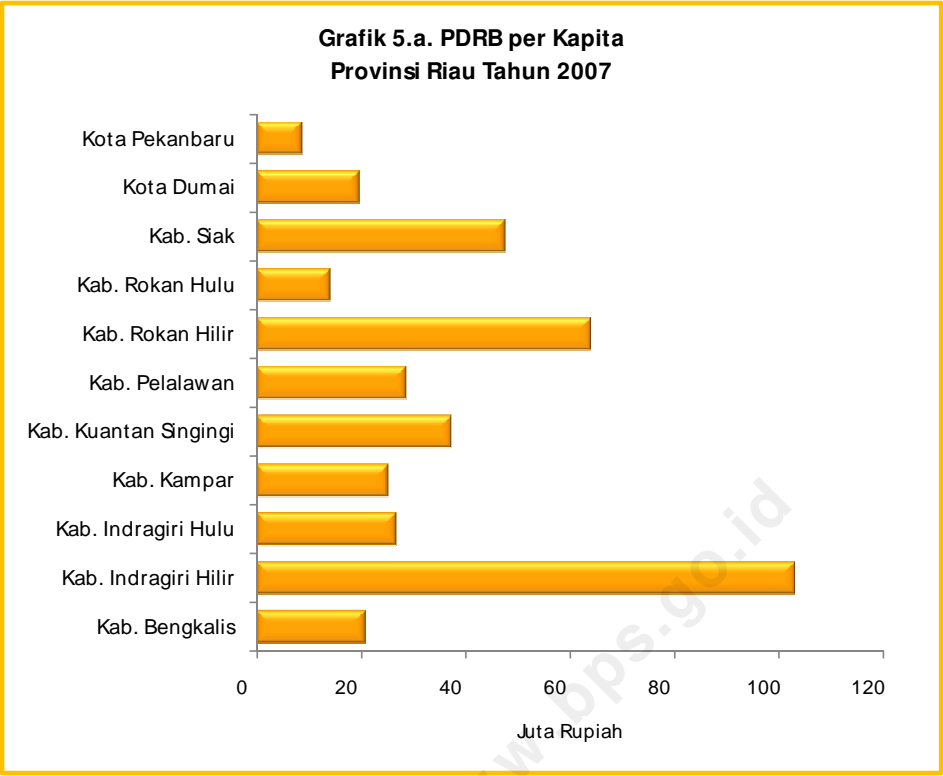


**Grafik 4.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Sumatera Barat**

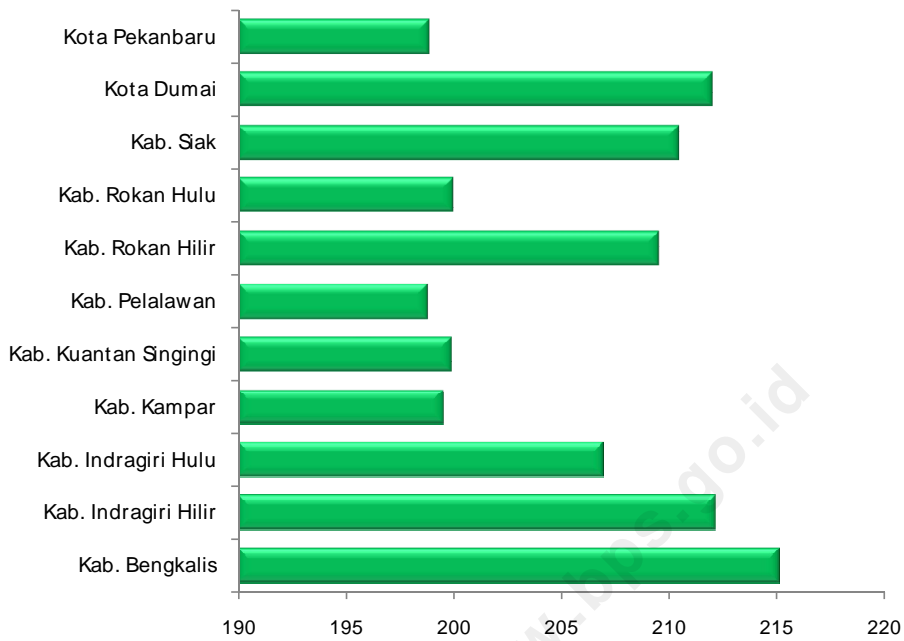


**Grafik 4.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Sumatera Barat**

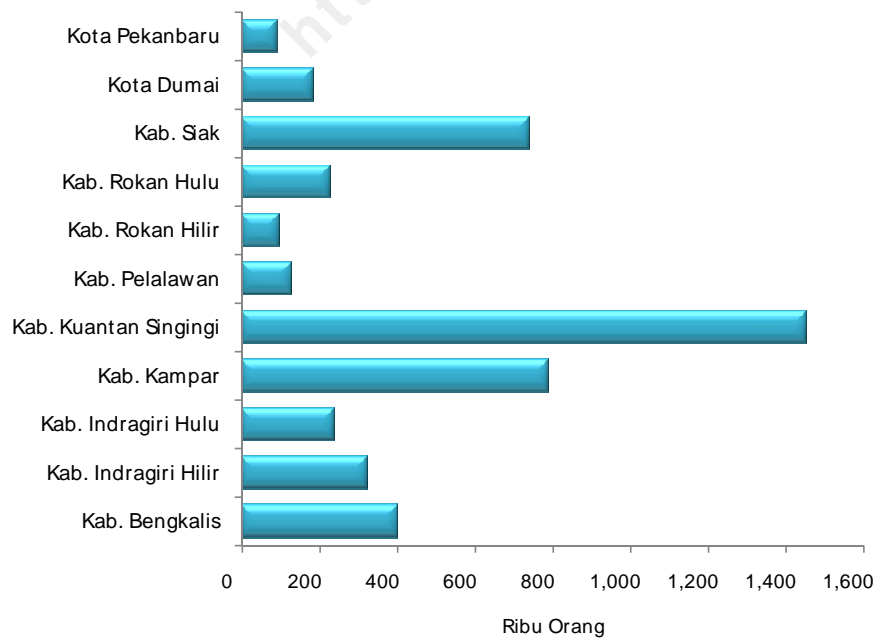


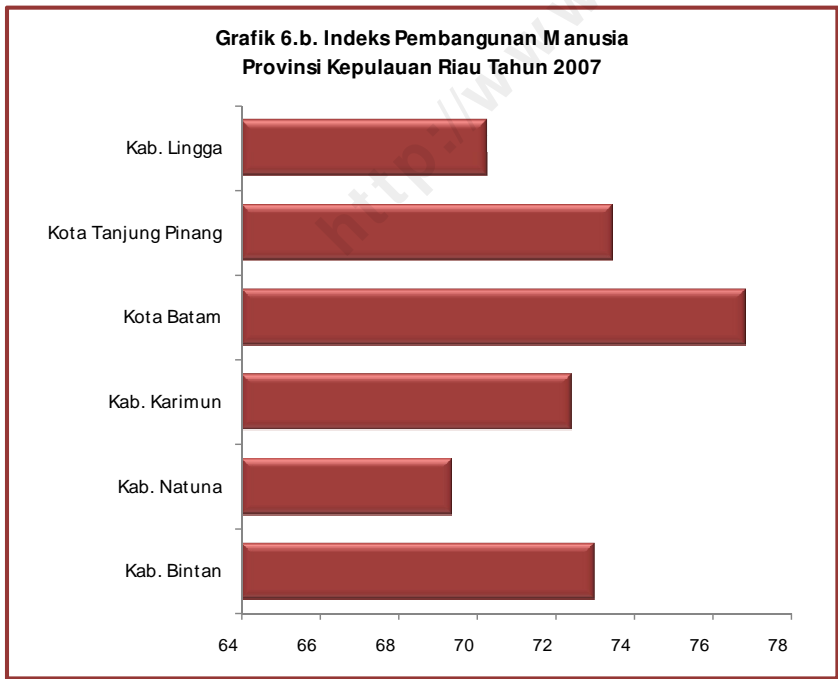
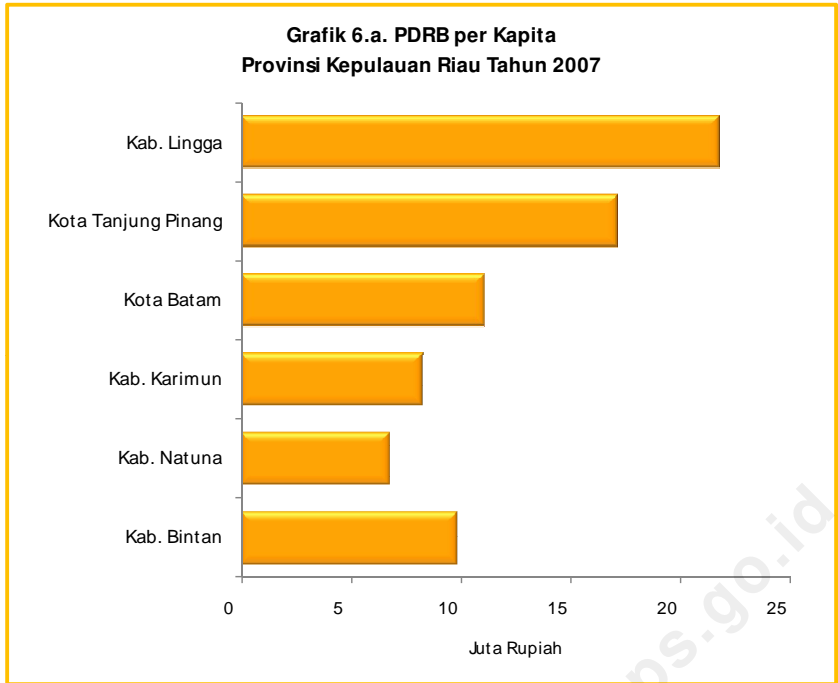


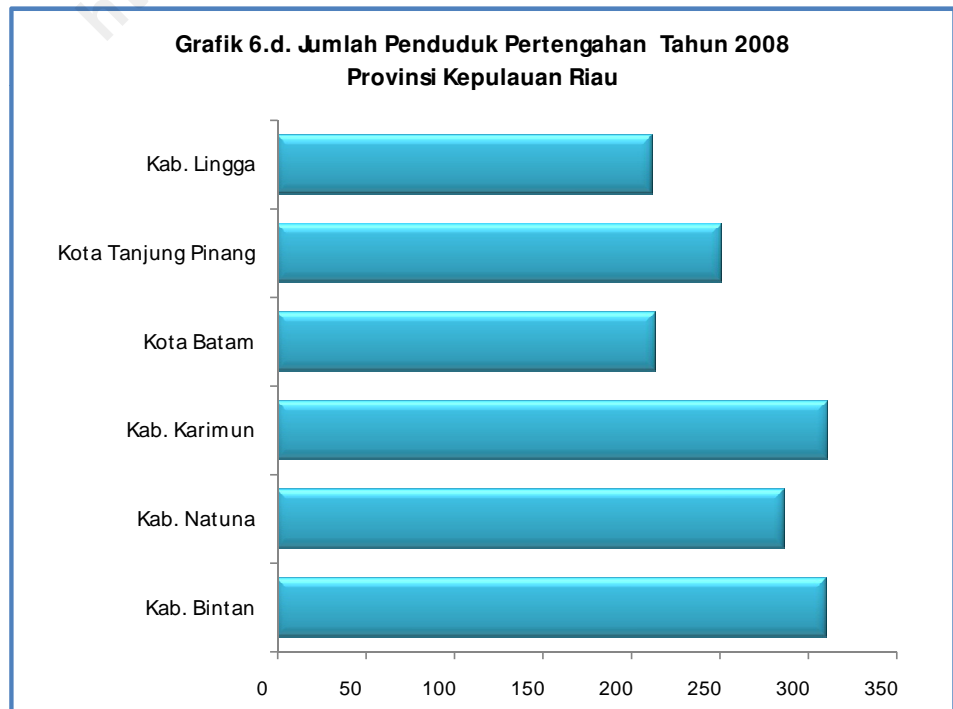
**Grafik 5.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Riau**



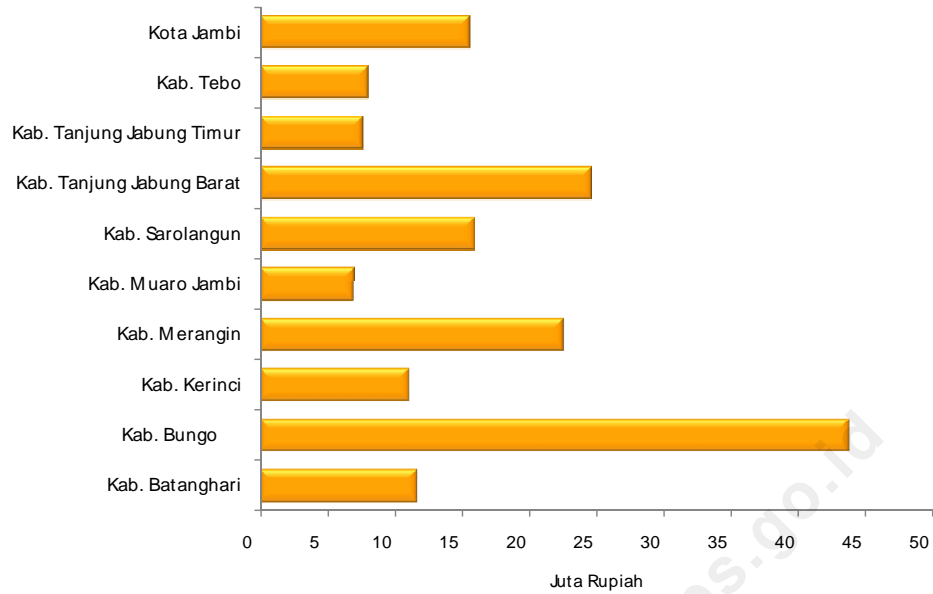
**Grafik 5.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Riau**



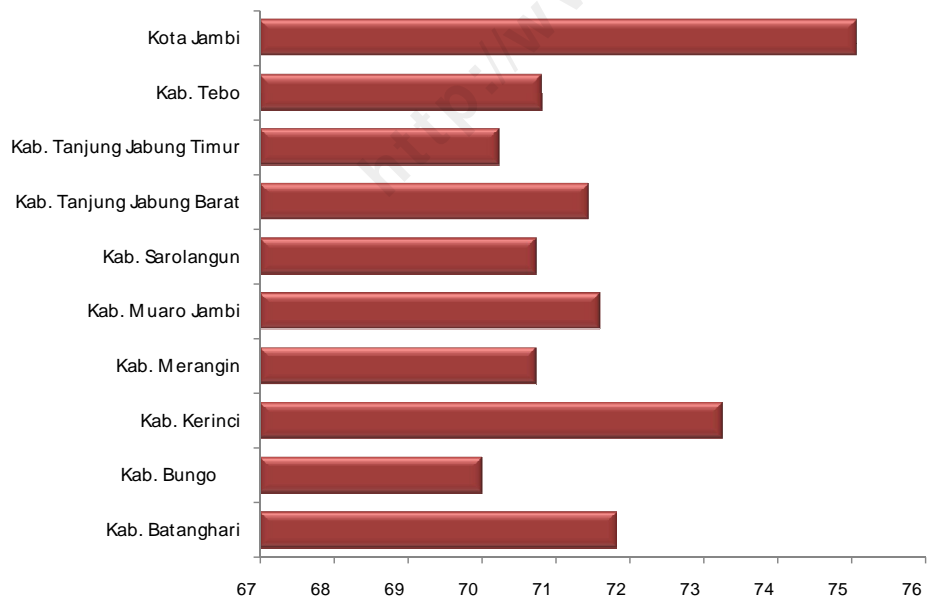




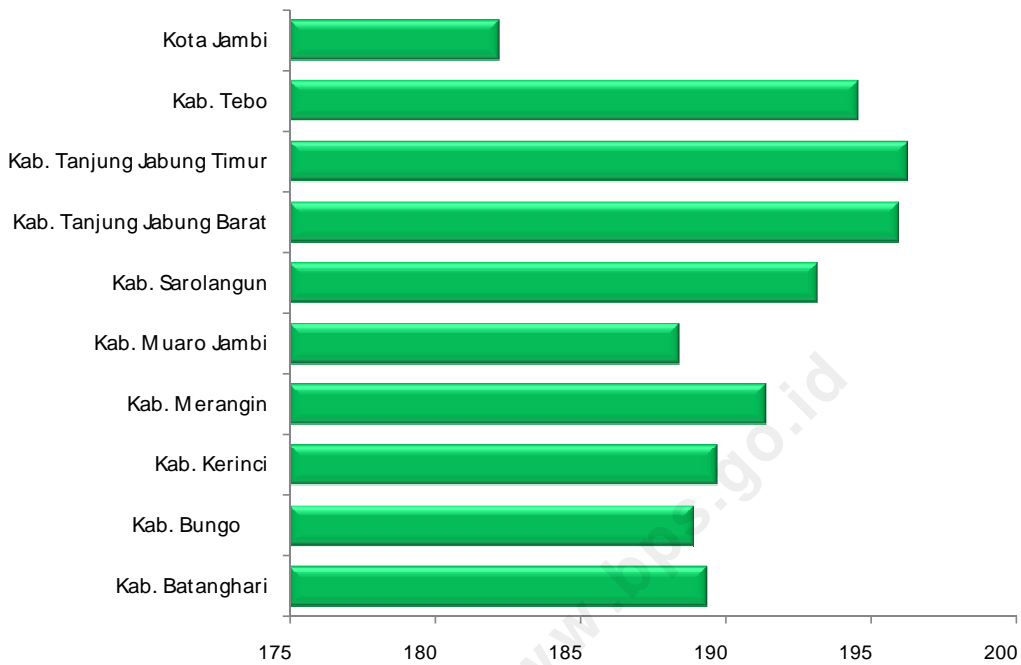
**Grafik 7.a. PDRB per Kapita
Provinsi Jambi Tahun 2007**



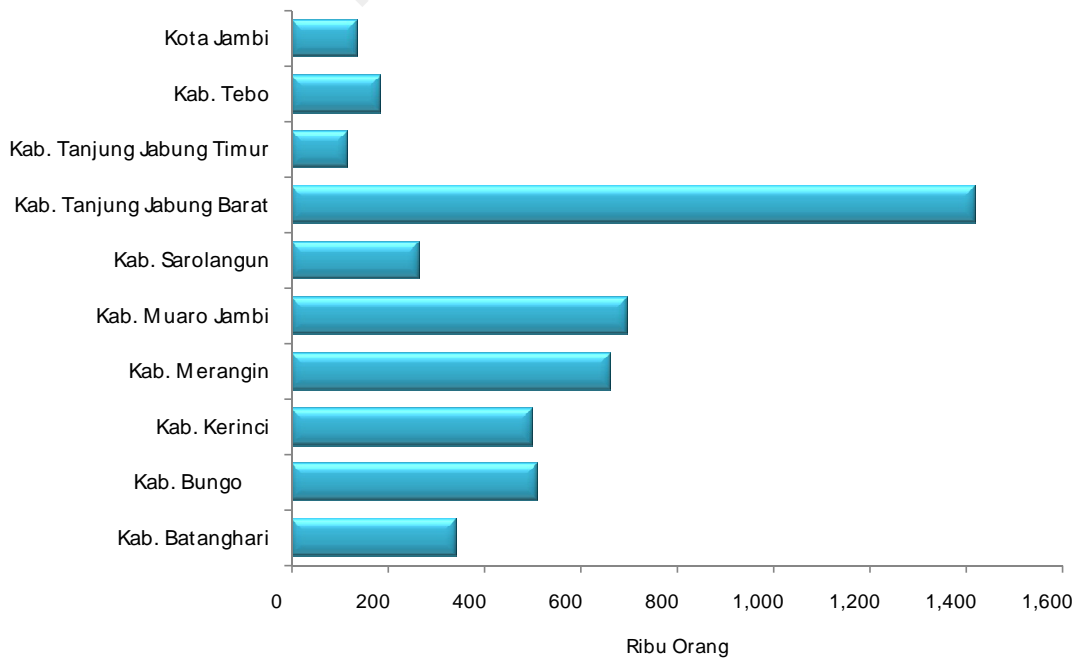
**Grafik 7.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Jambi Tahun 2007**

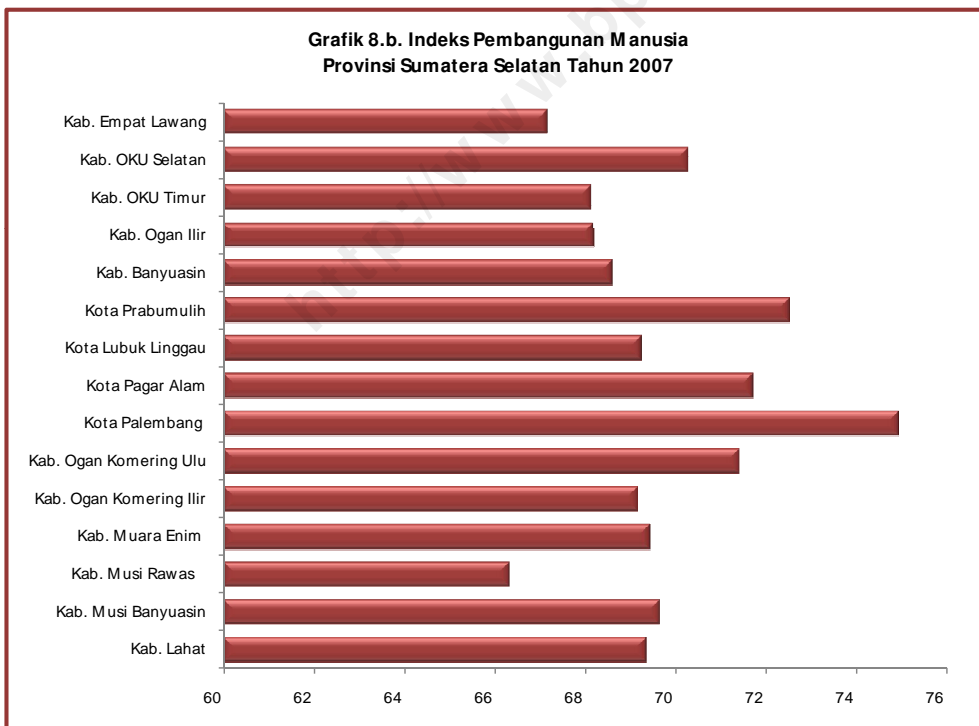
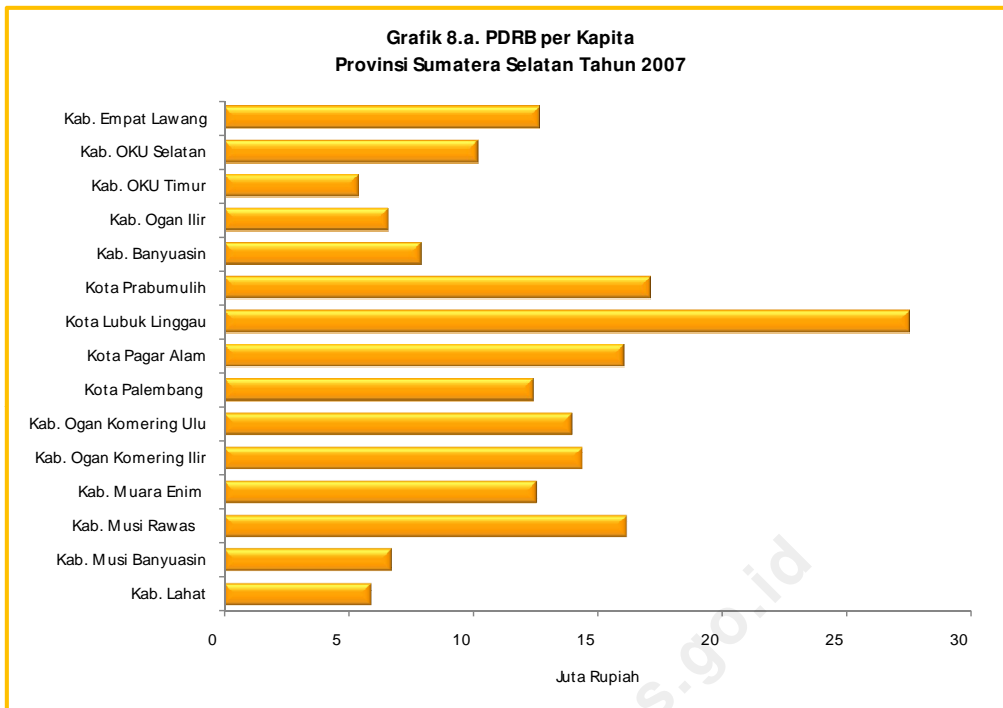


**Grafik 7.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Jambi**

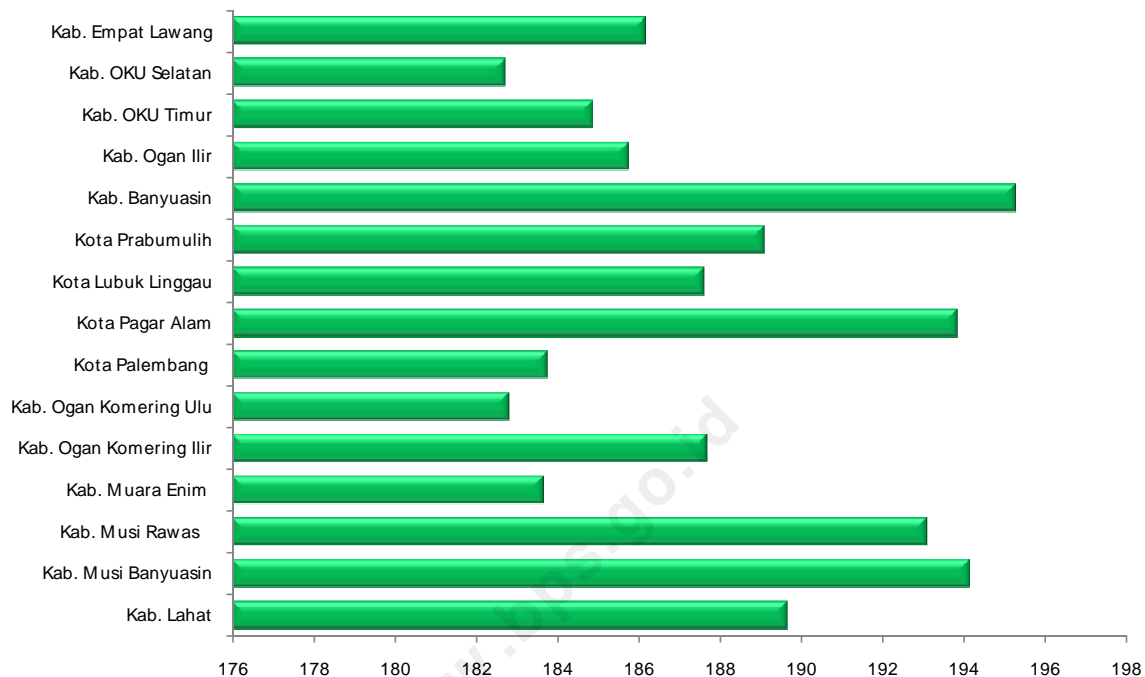


**Grafik 7.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Jambi**

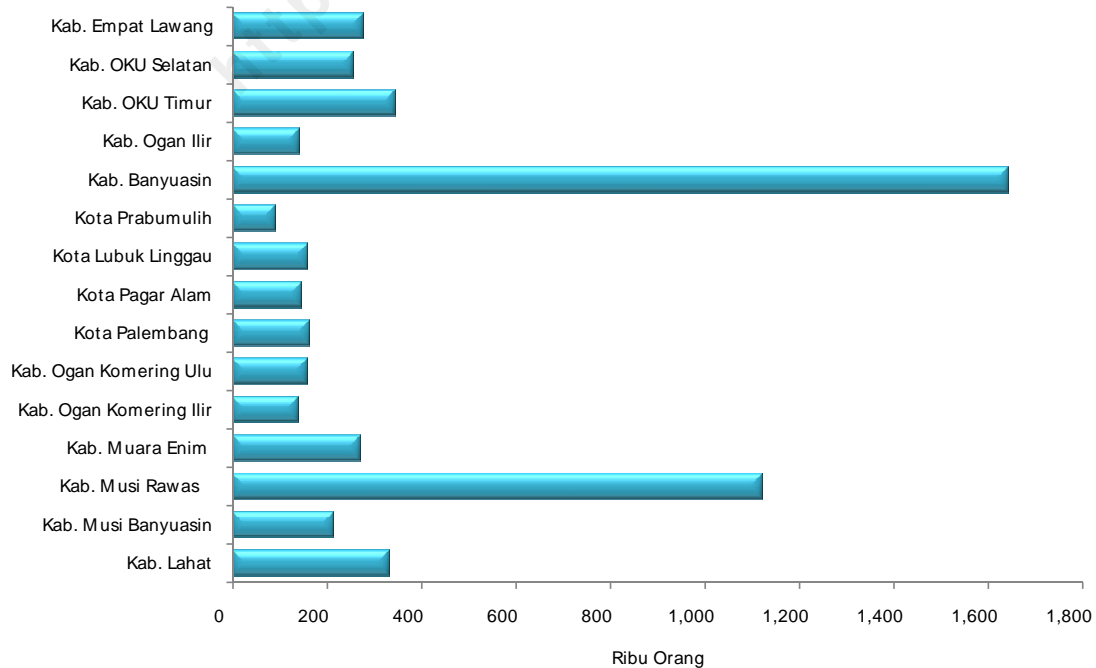




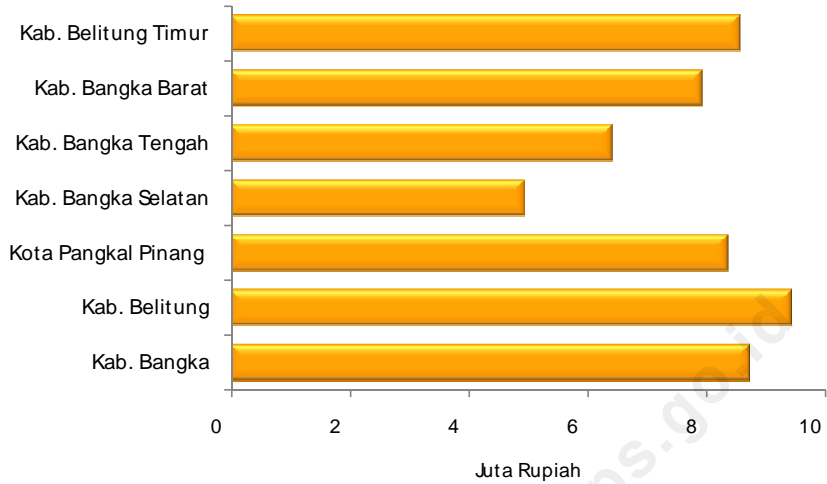
**Grafik 8.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Sumatera Selatan**



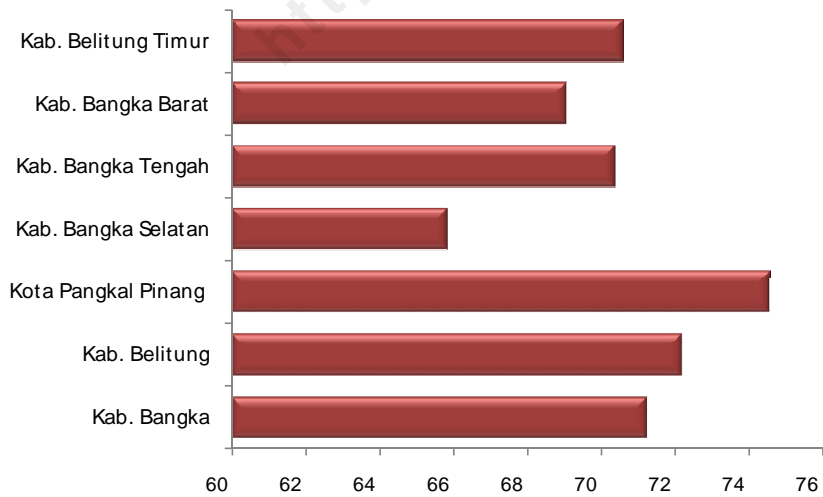
**Grafik 8.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Sumatera Selatan**



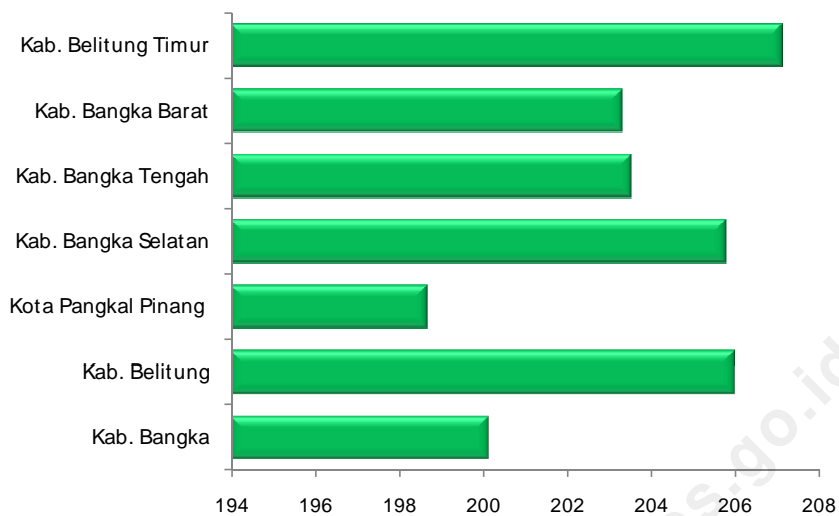
**Grafik 9.a. PDRB per Kapita
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007**



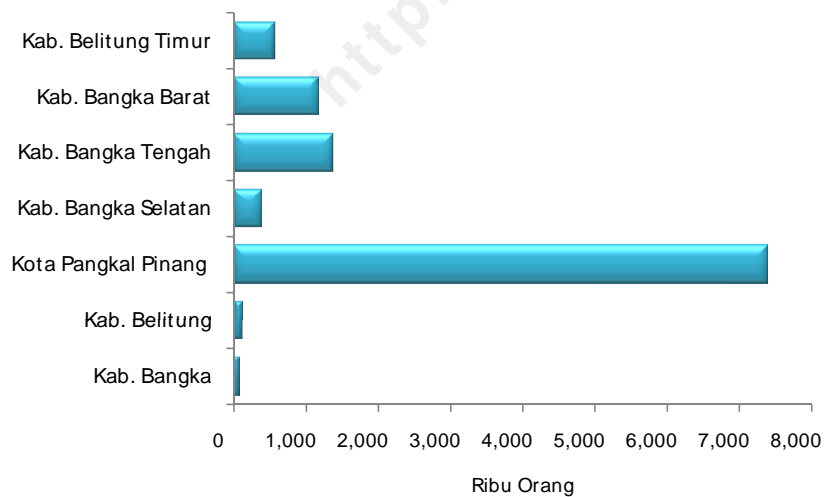
**Grafik 9.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2007**



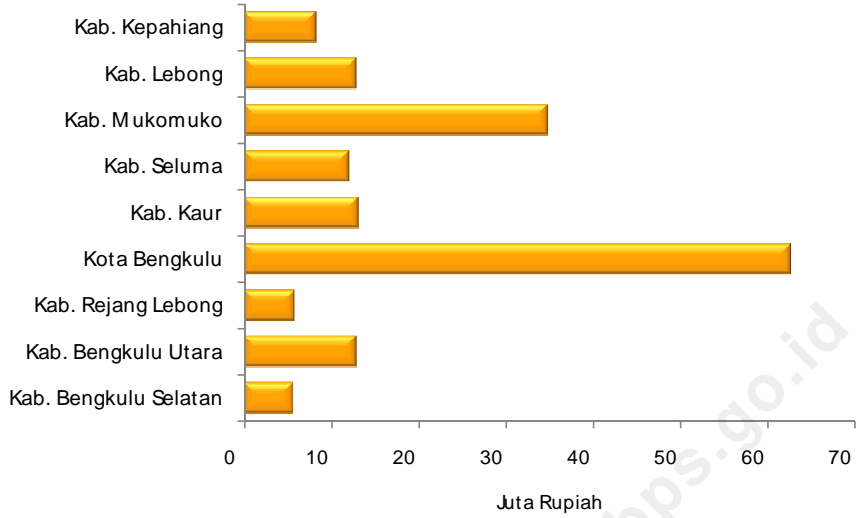
**Grafik 9.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



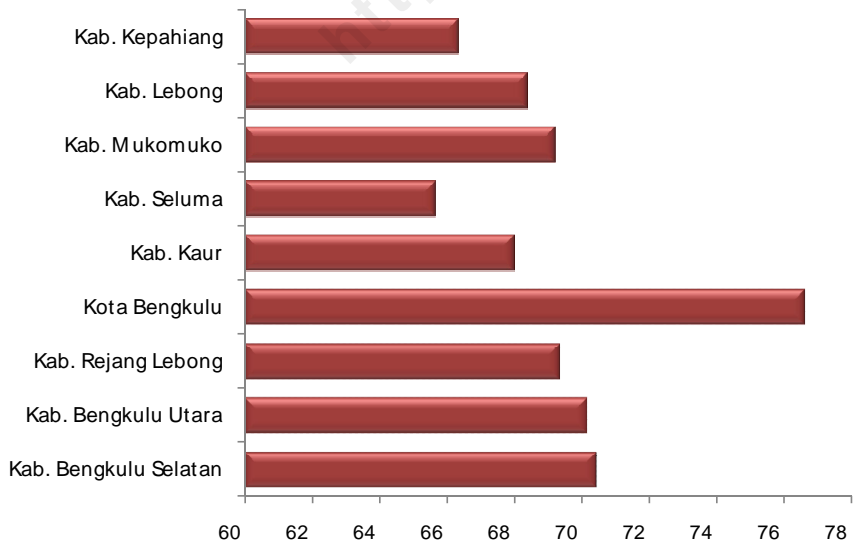
**Grafik 9.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung**



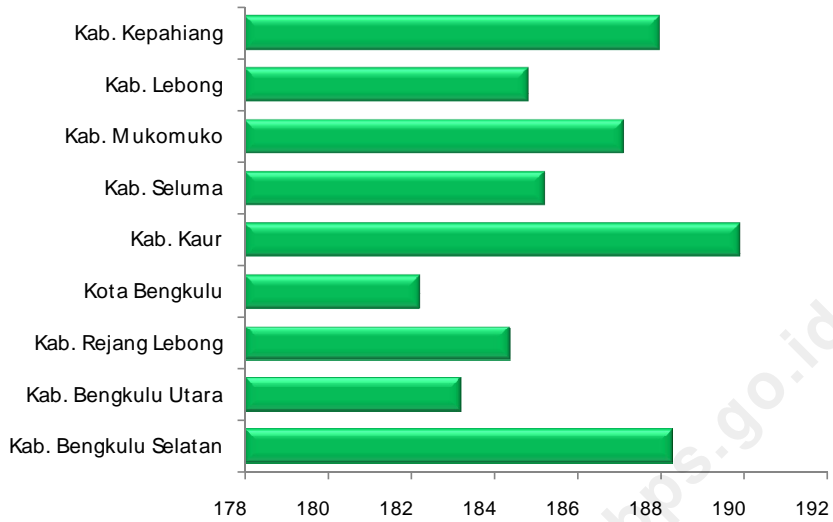
**Grafik 10.a. PDRB per Kapita
Provinsi Bengkulu Tahun 2007**



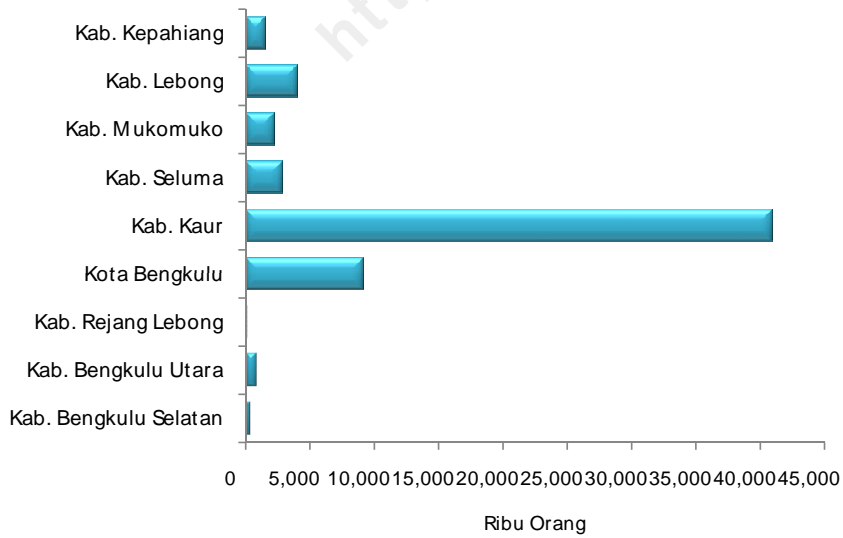
**Grafik 10.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Bengkulu Tahun 2007**

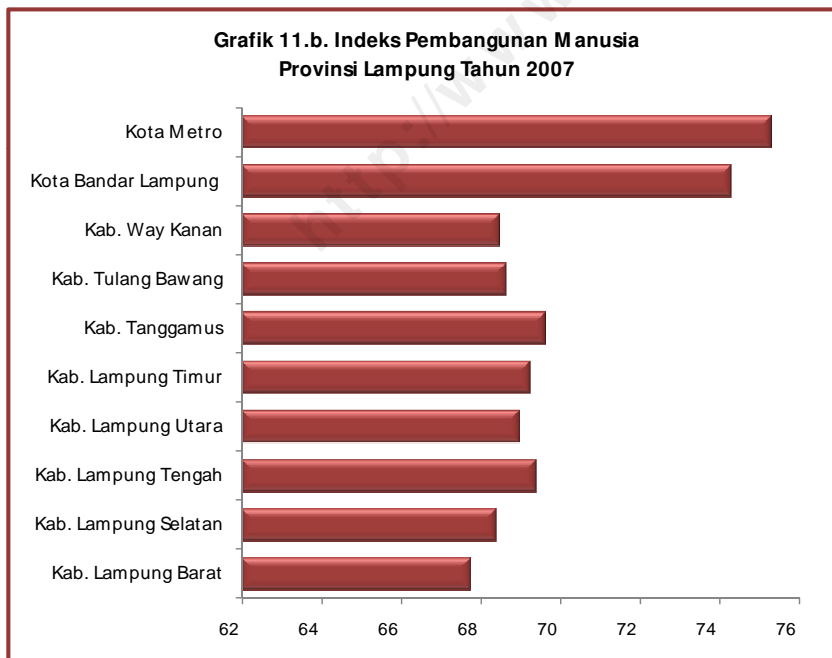
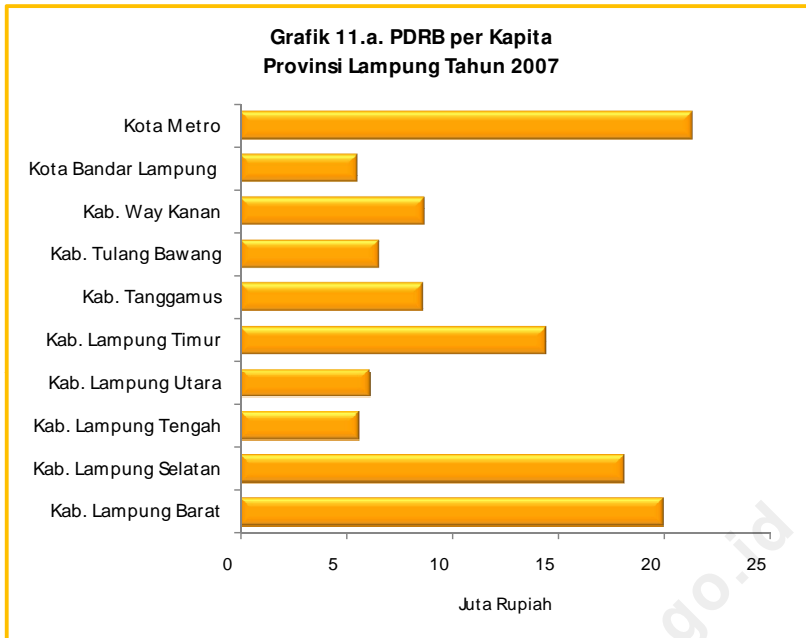


**Grafik 10.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Bengkulu**

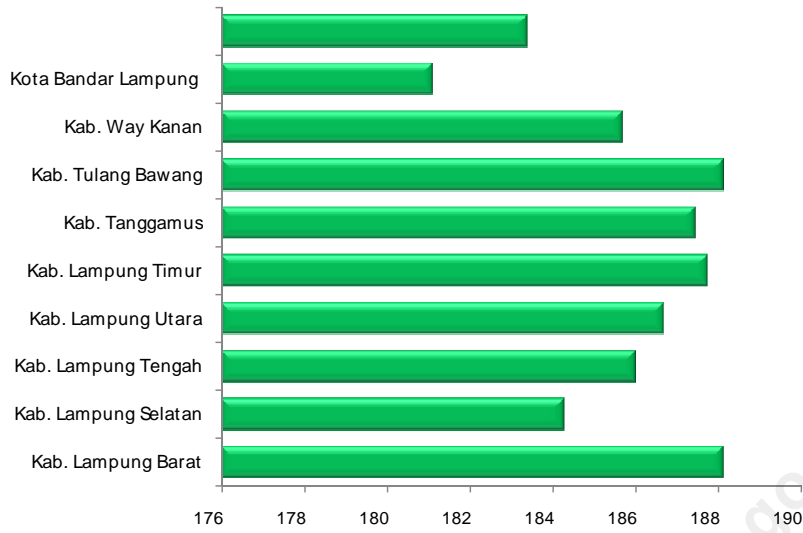


**Grafik 10.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Bengkulu**

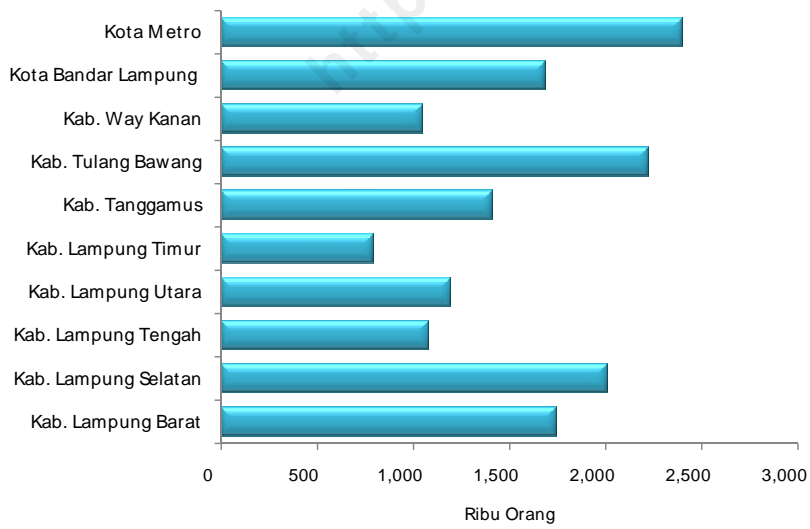




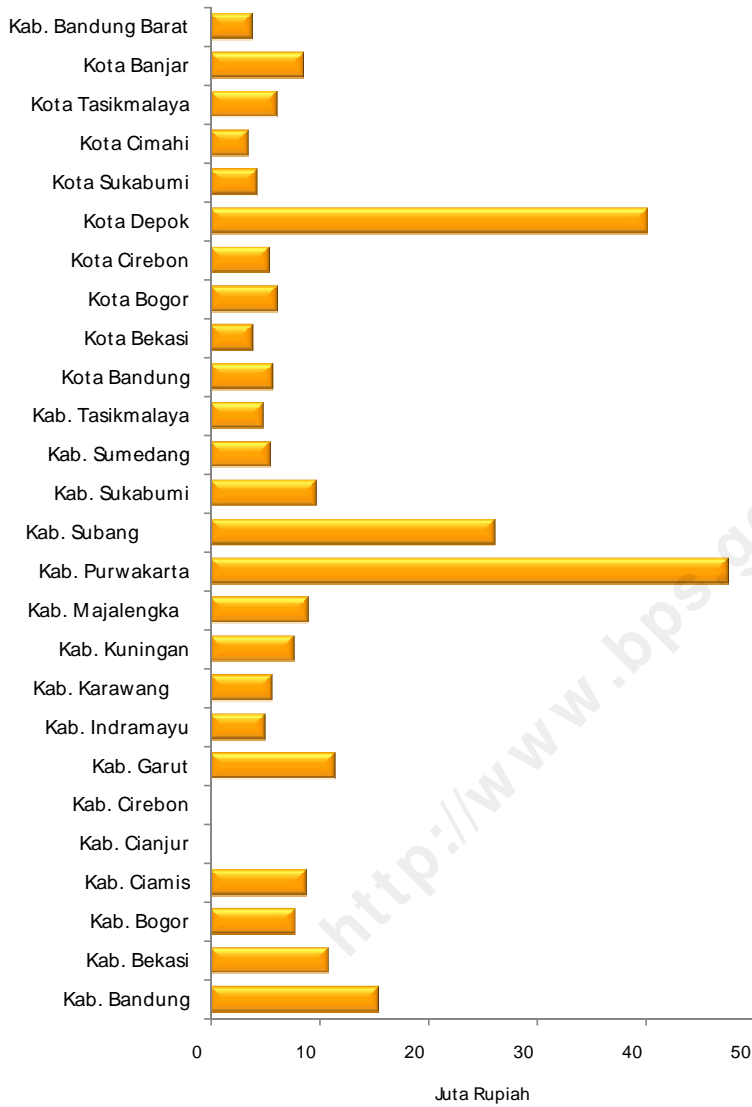
**Grafik 11.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Lampung**



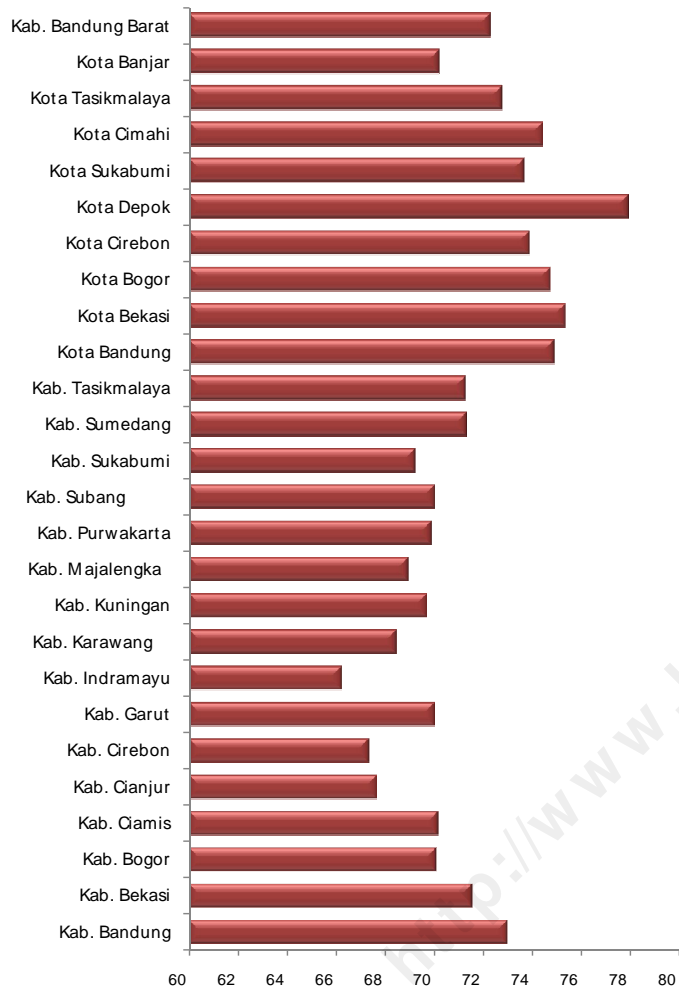
**Grafik 11.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Lampung**



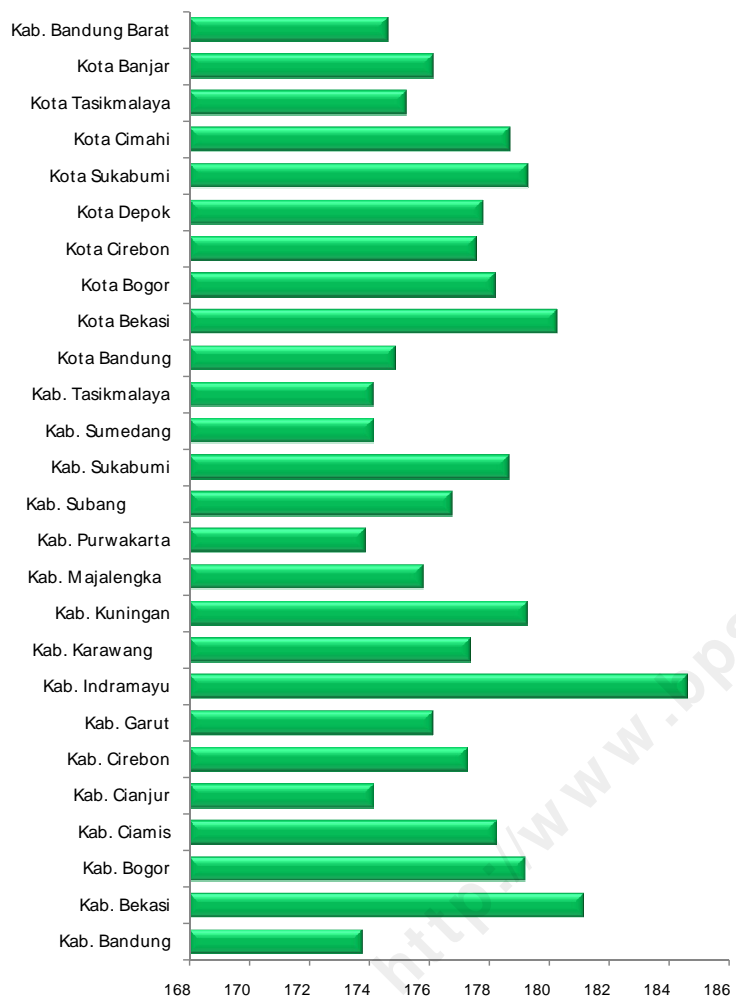
**Grafik 12.a. PDRB per Kapita
Provinsi Jawa Barat Tahun 2007**



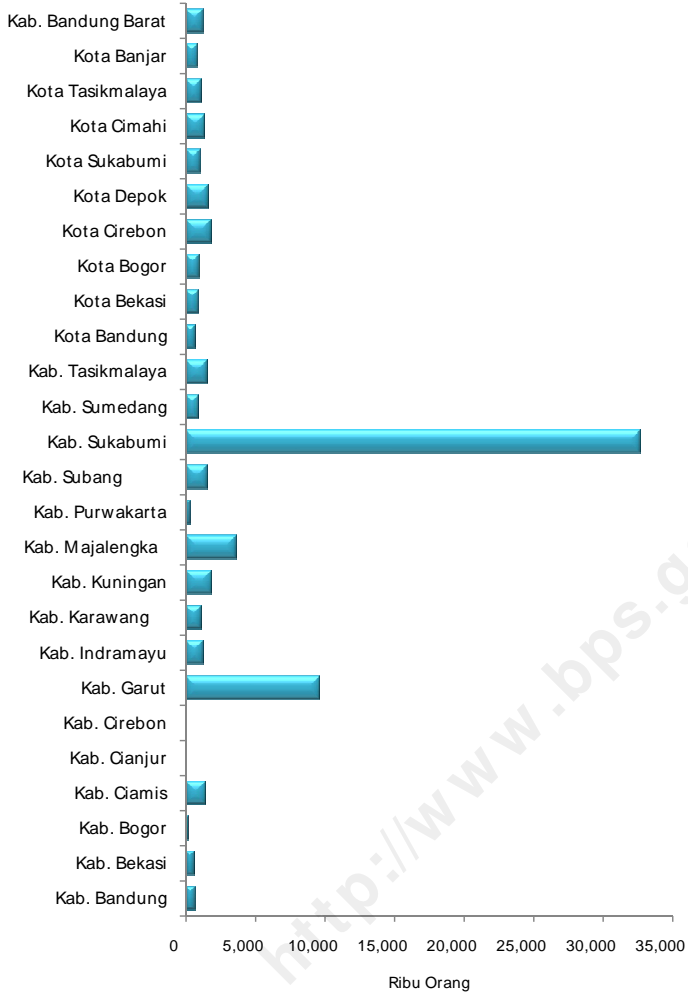
**Grafik 12.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi- Jawa Barat Tahun 2007**

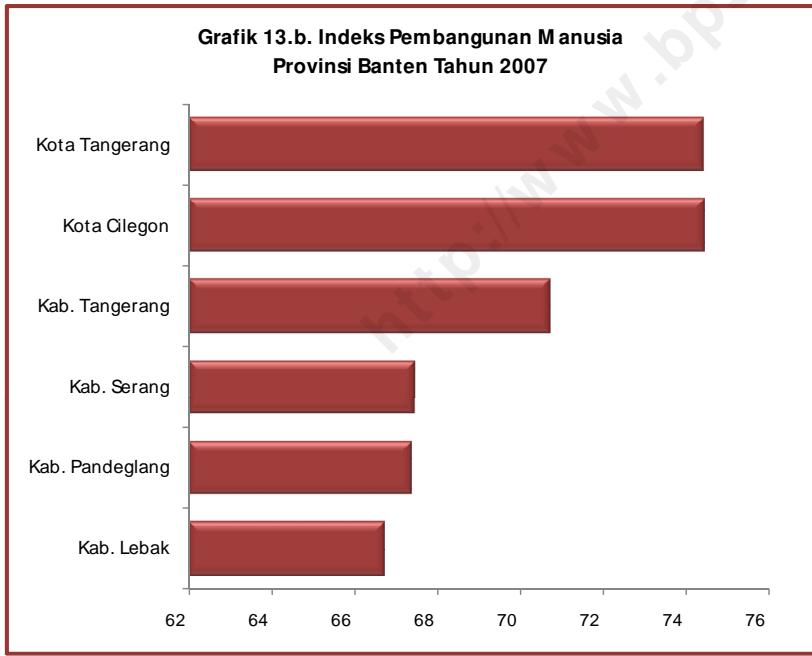
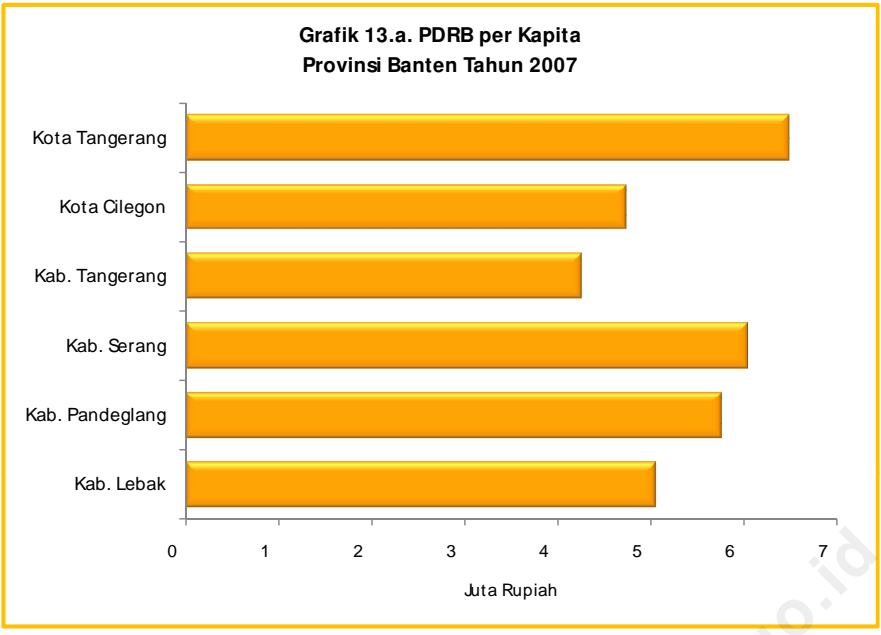


Grafik 12.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Jawa Barat

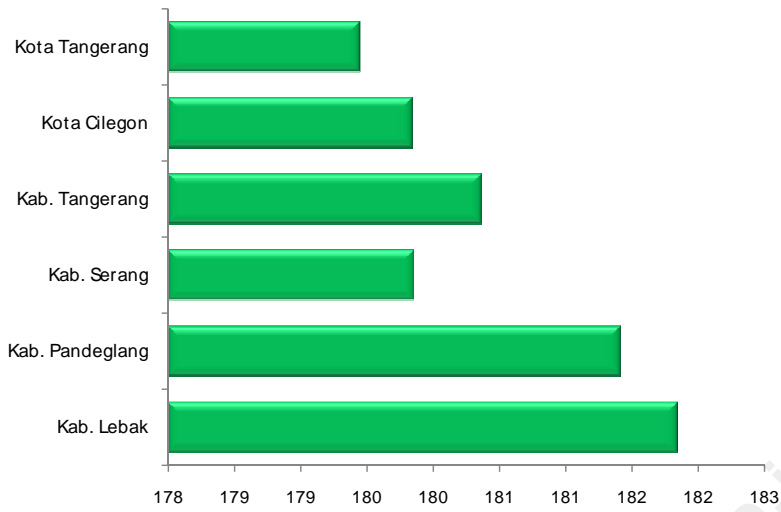


**Grafik 12.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Jawa Barat**

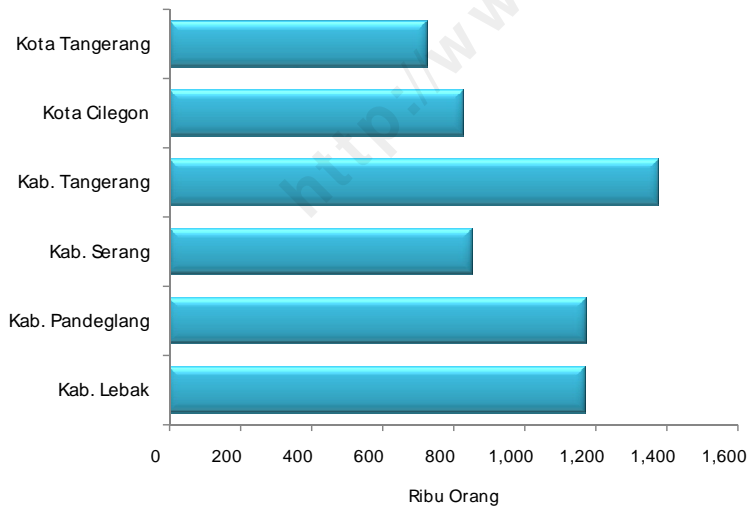




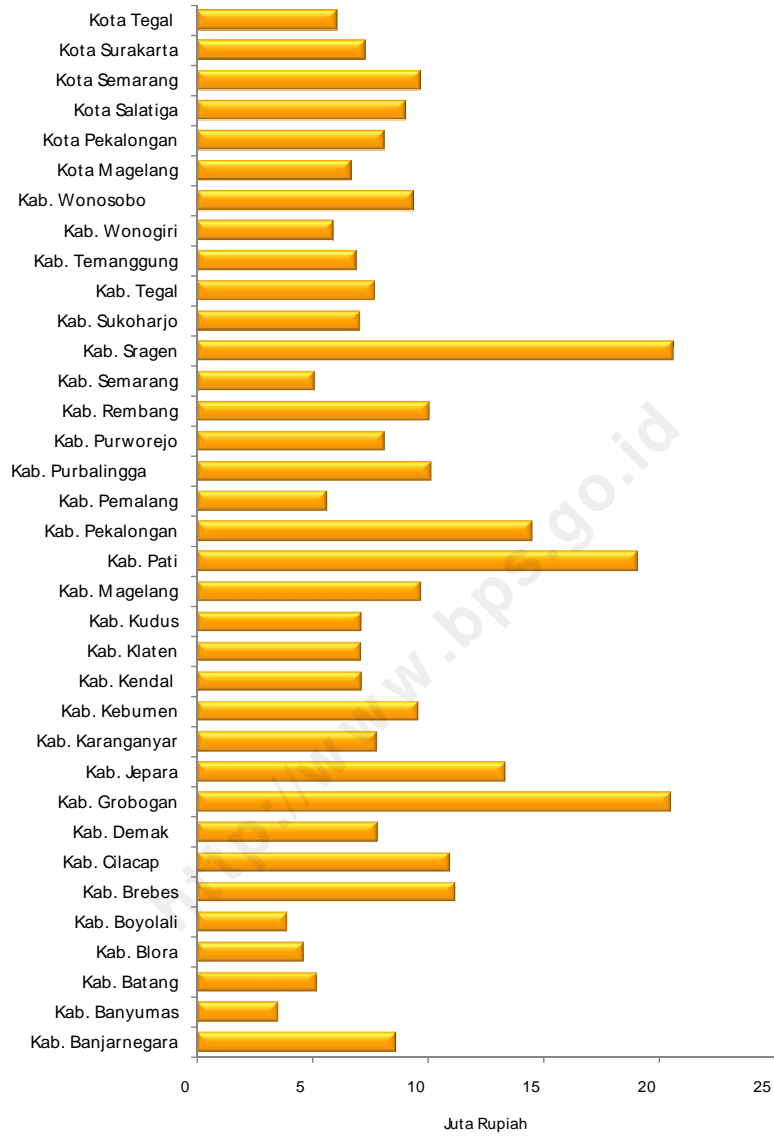
**Grafik 13.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Banten**



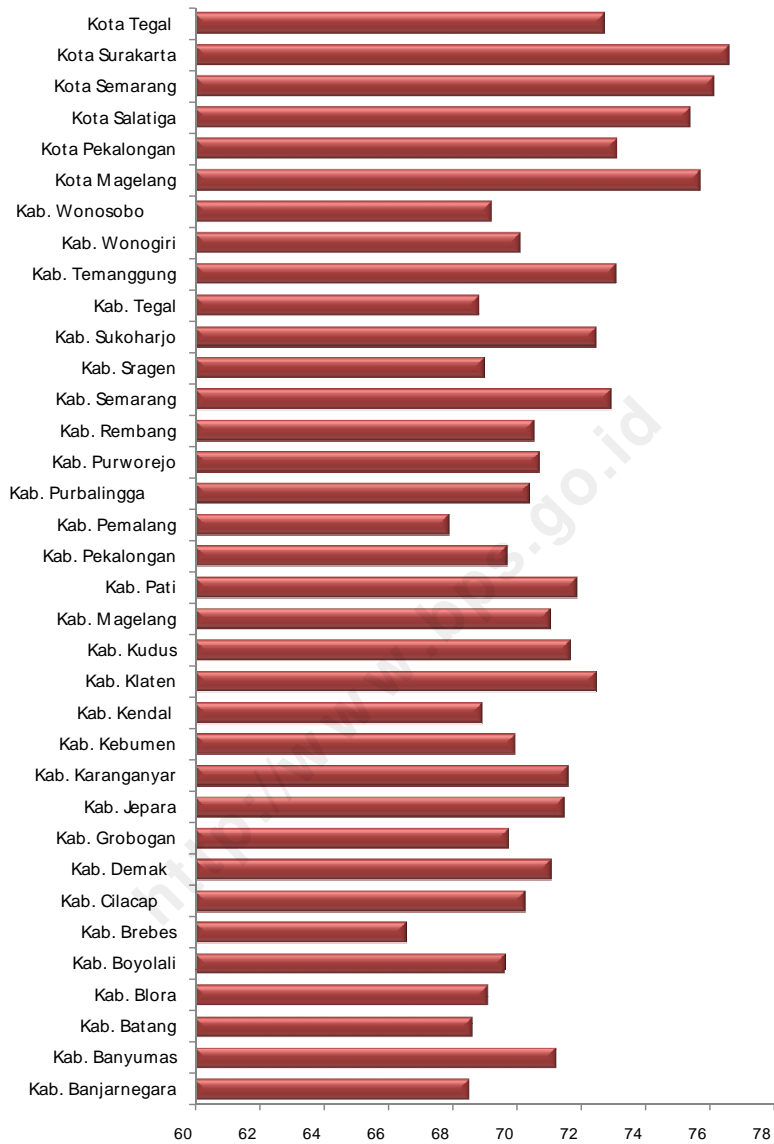
**Grafik 13.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Banten**



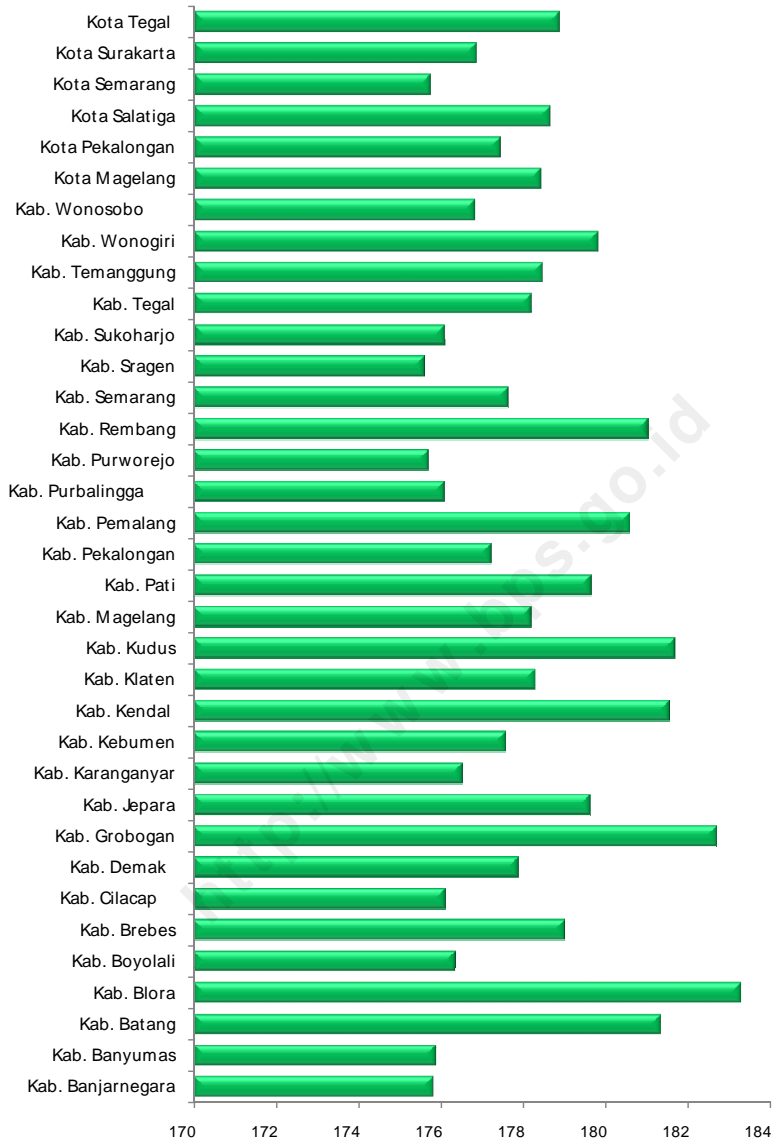
Grafik 14.a. PDRB per Kapita
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007



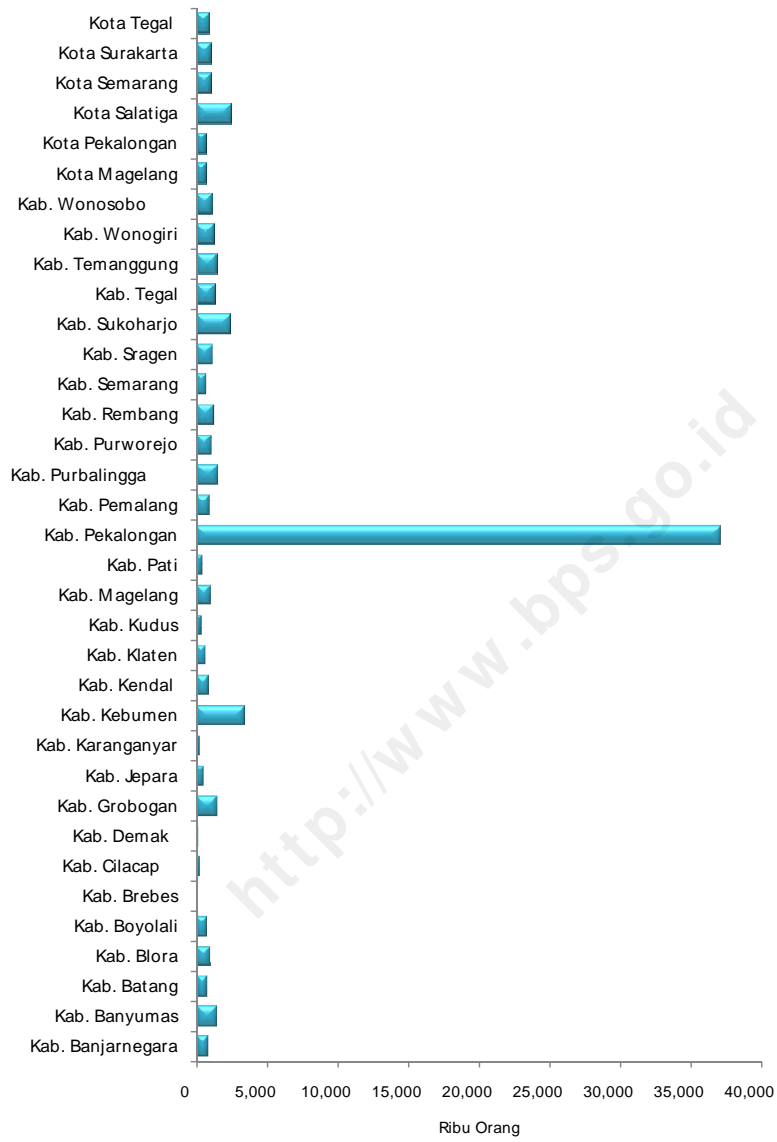
**Grafik 14.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007**



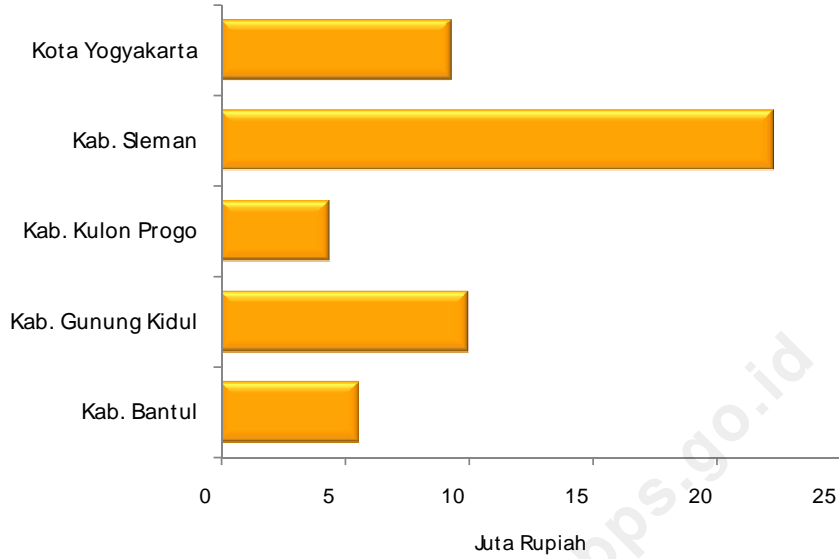
**Grafik 14.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Jawa Tengah**



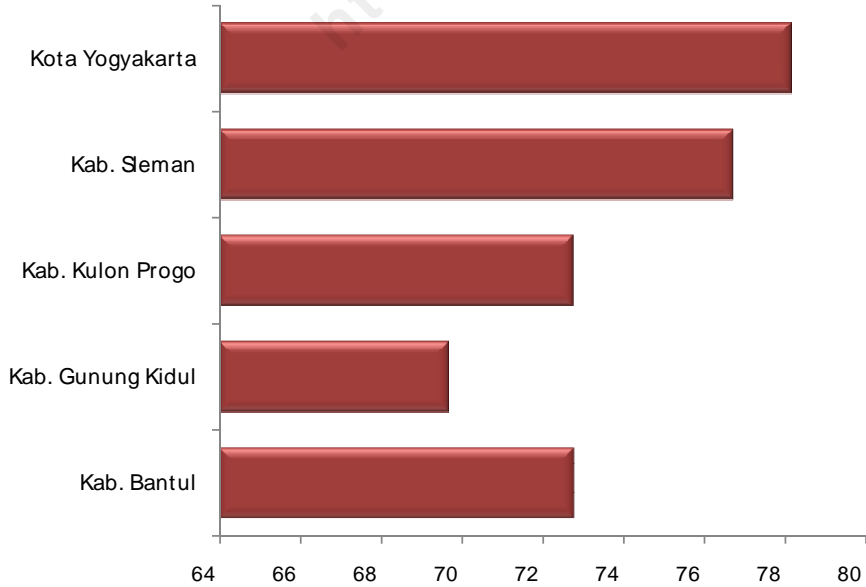
Grafik 14.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Jawa Tengah

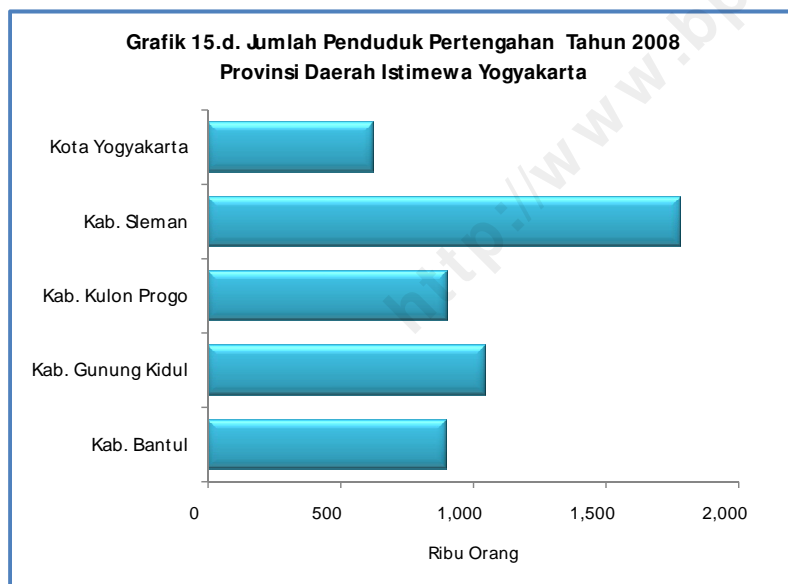
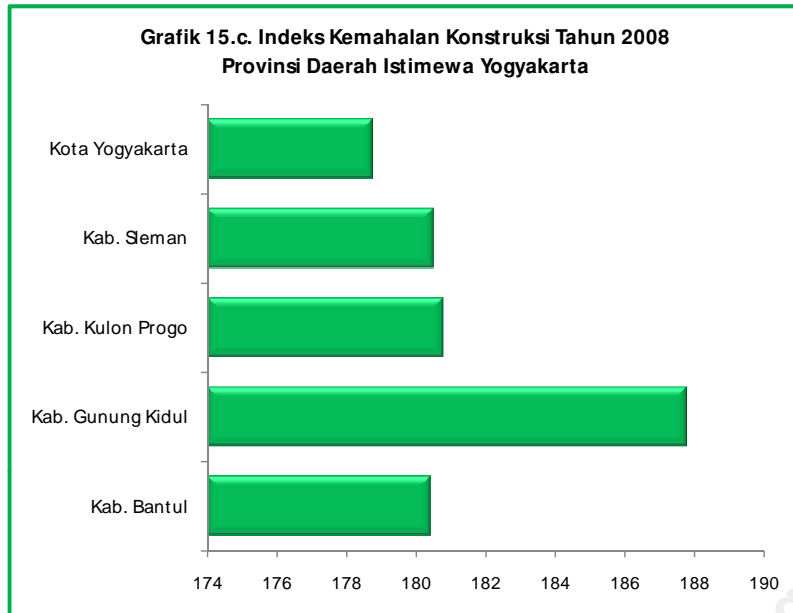


**Grafik 15.a. PDRB per Kapita
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007**

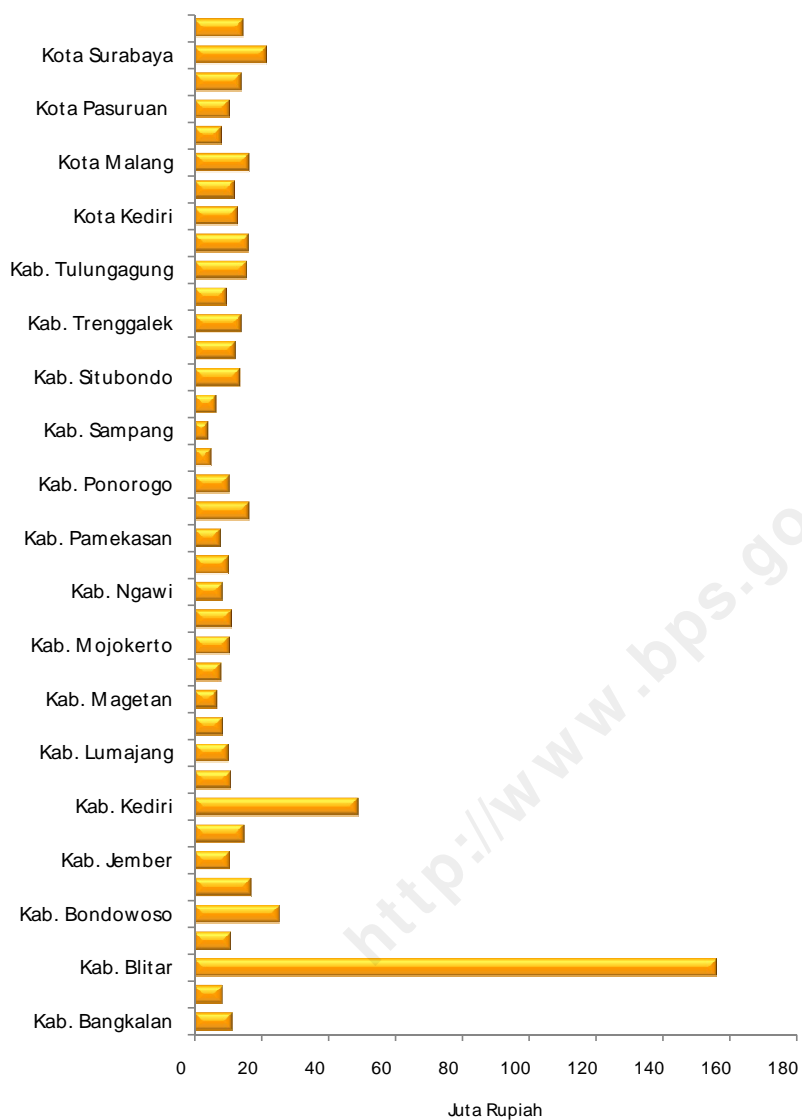


**Grafik 15.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta Tahun 2007**

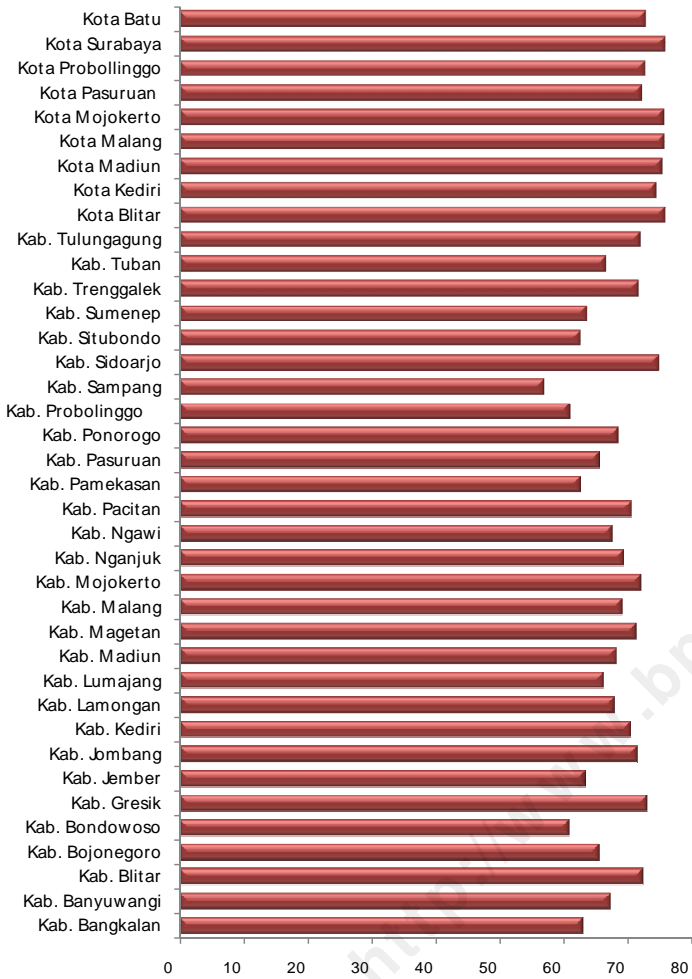




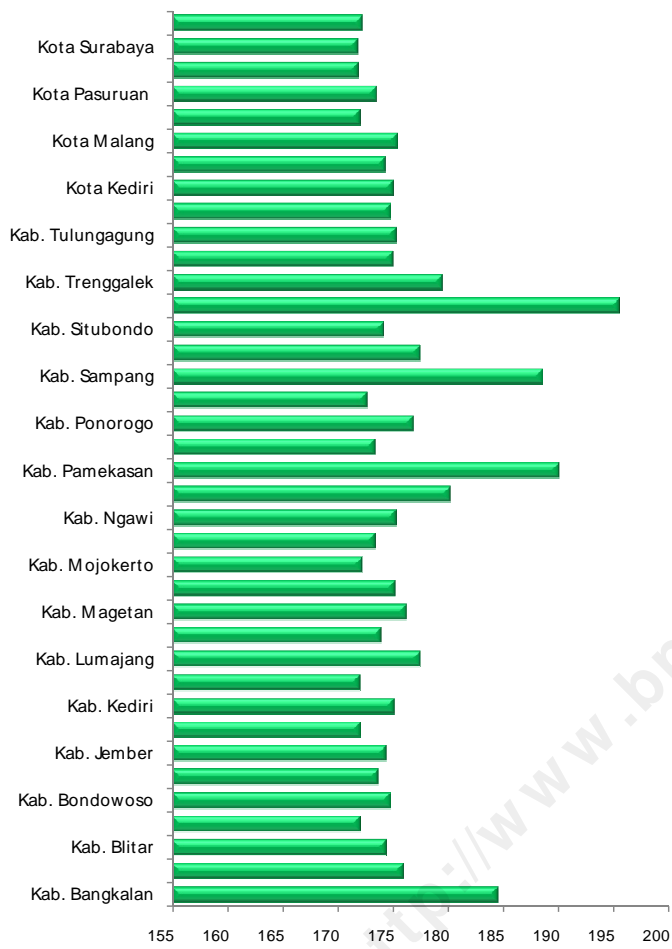
Grafik 16.a. PDRB per Kapita
Provinsi Jawa Timur Tahun 2007



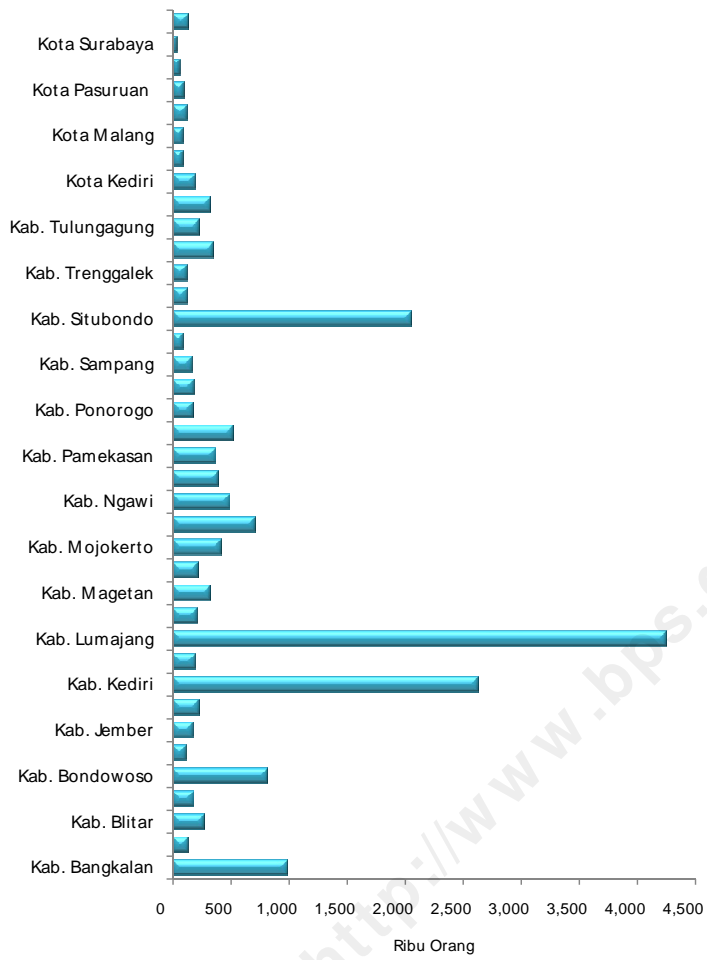
**Grafik 16.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Jawa Timur Tahun 2007**



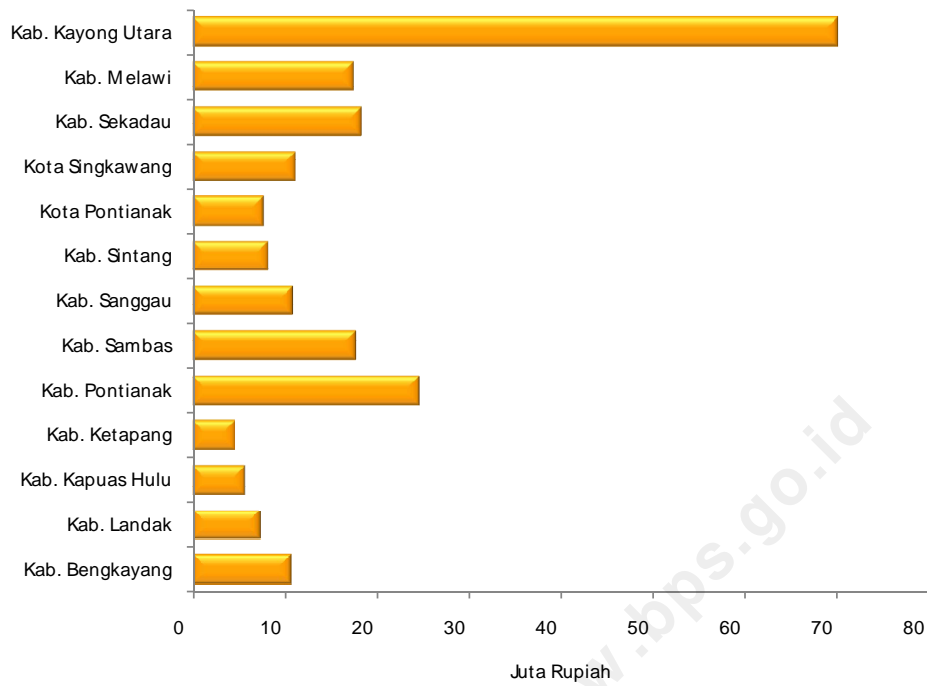
**Grafik 16.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Jawa Timur**



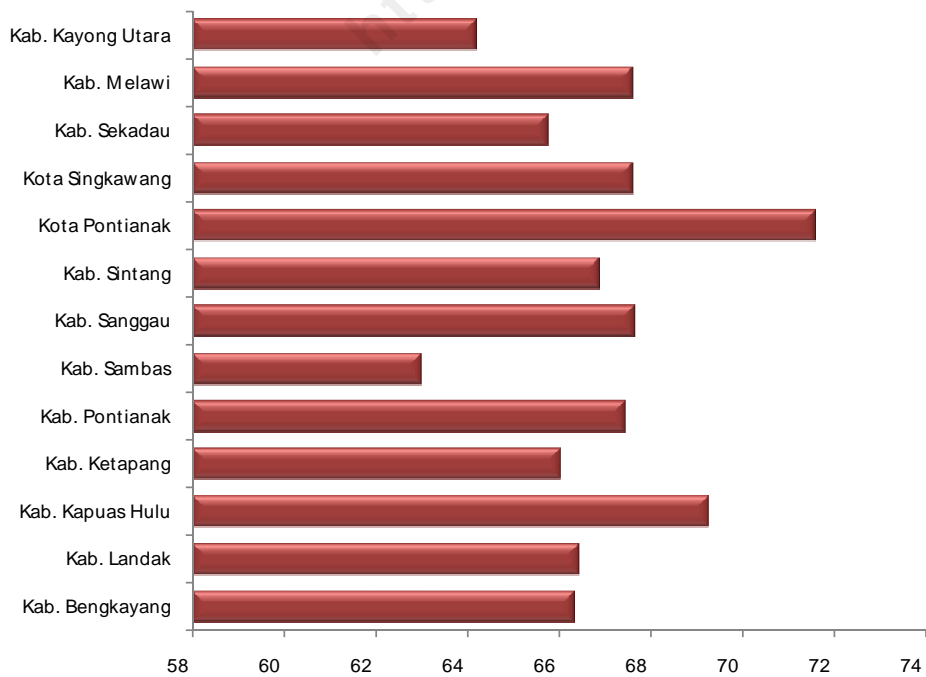
Grafik 16.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Jawa Timur



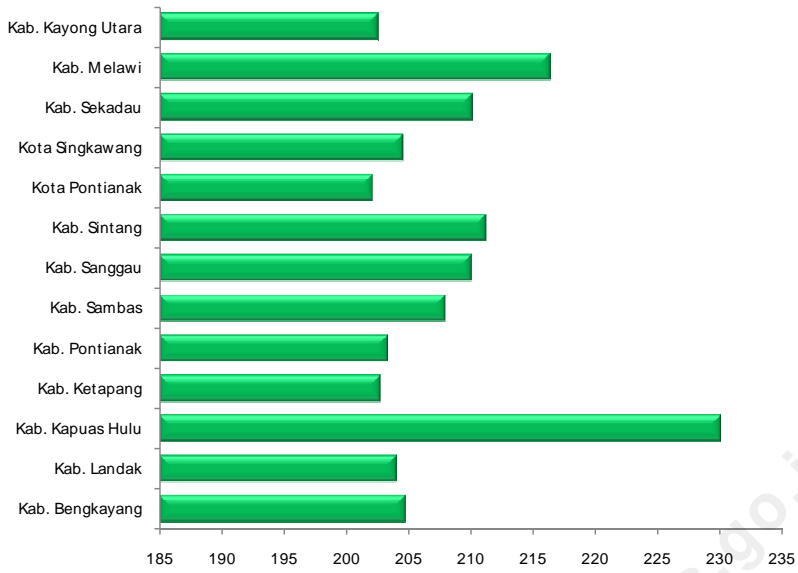
**Grafik 17.a. PDRB per Kapita
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007**



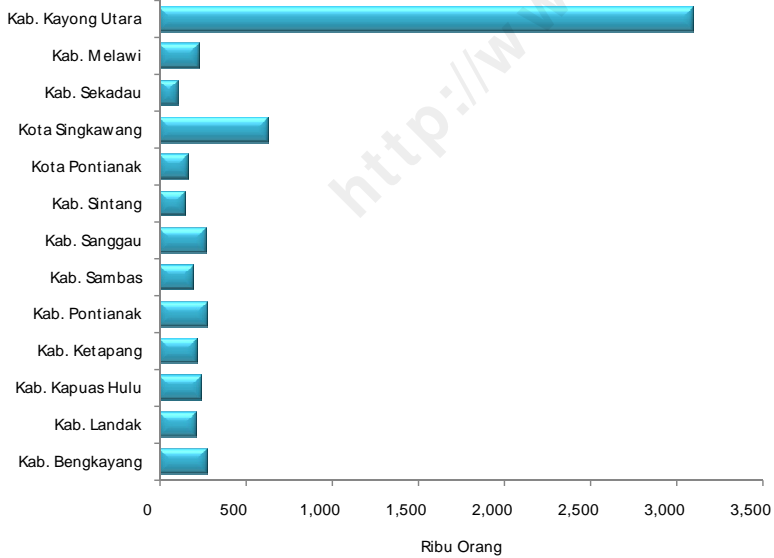
**Grafik 17.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2007**



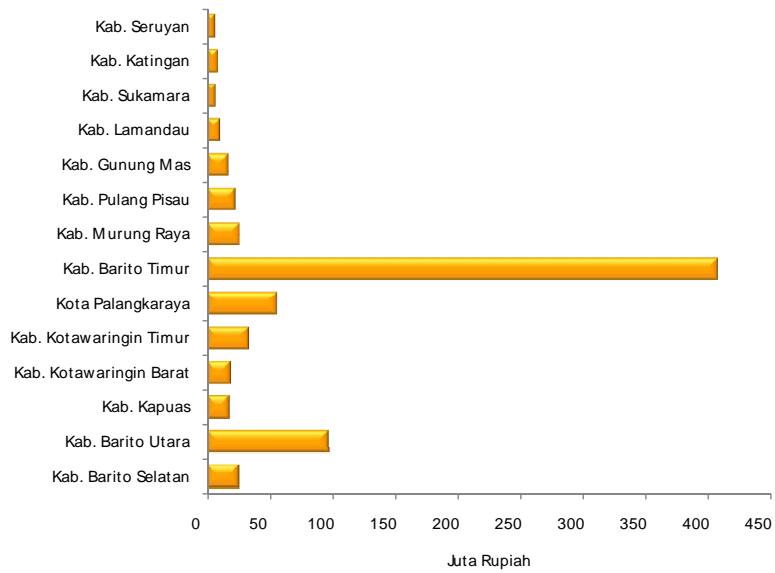
**Grafik 17.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Kalimantan Barat**



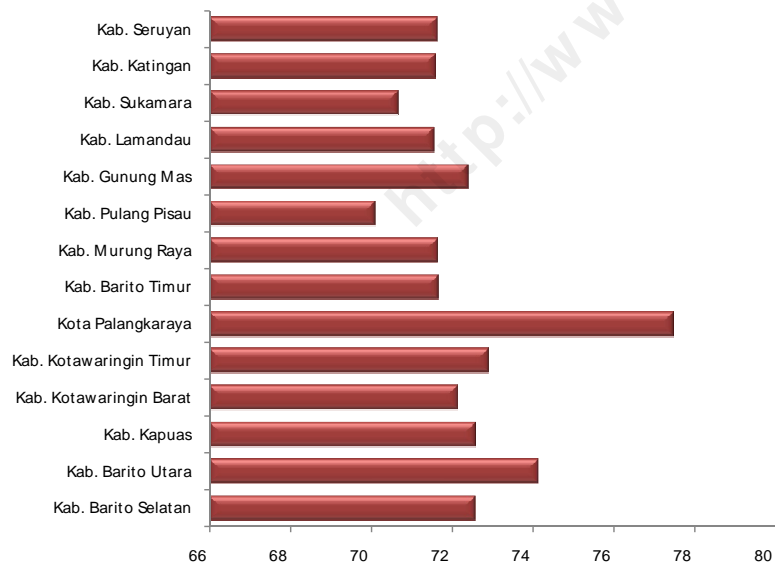
**Grafik 17.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Kalimantan Barat**



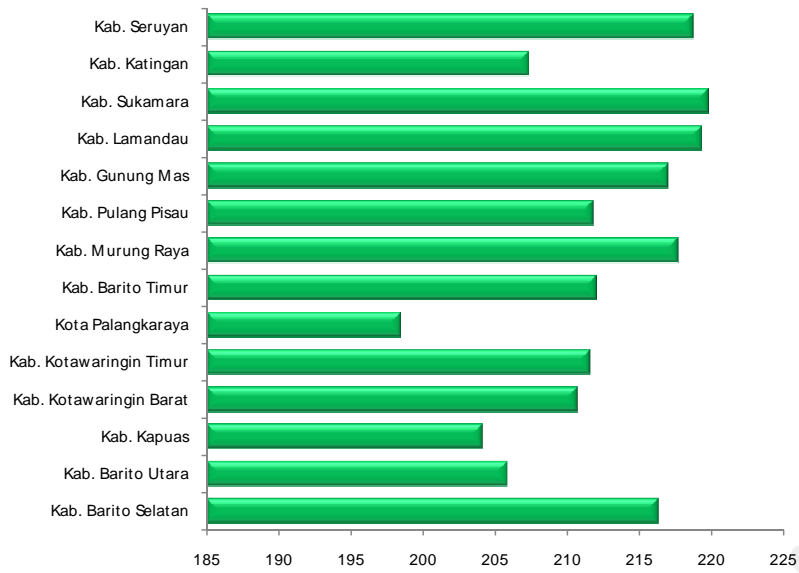
**Grafik 18.a. PDRB per Kapita
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007**



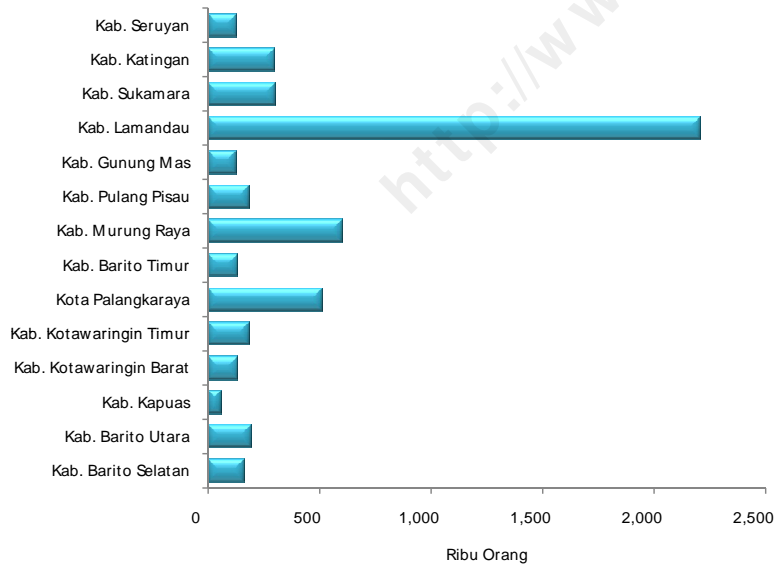
**Grafik 18.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2007**



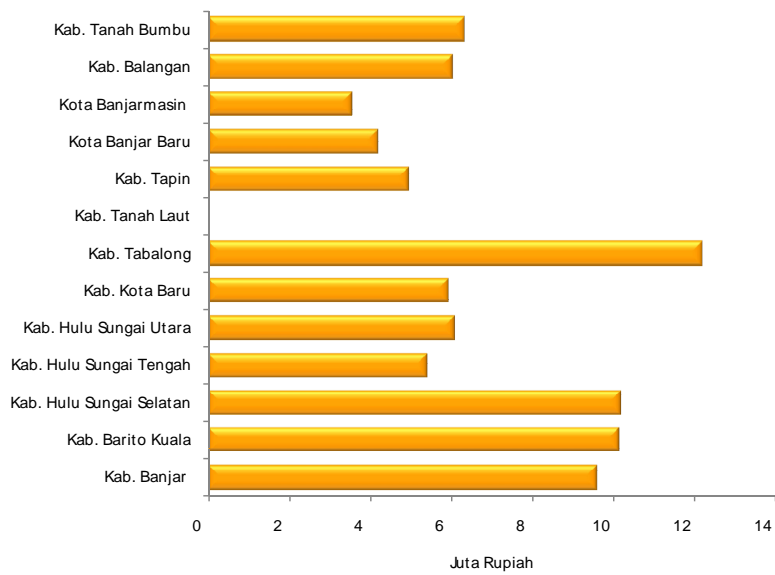
**Grifik 18.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Kalimantan Tengah**



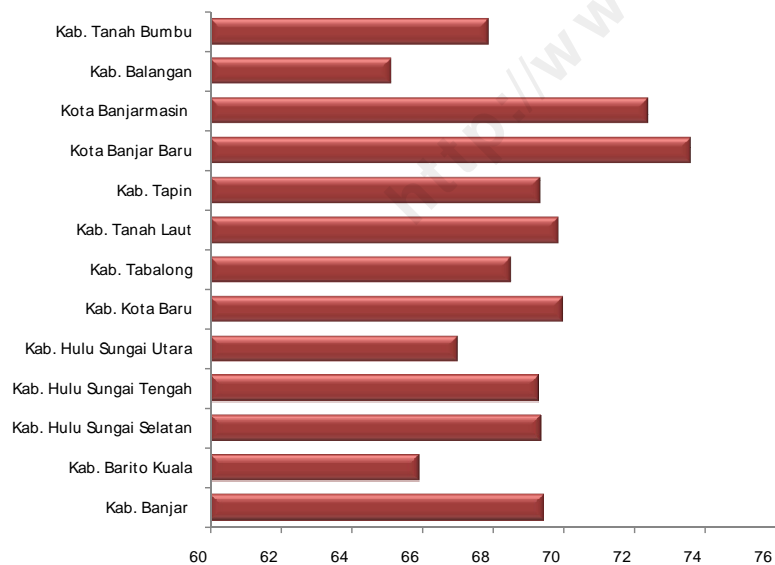
**Grifik 18.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Kalimantan Tengah**



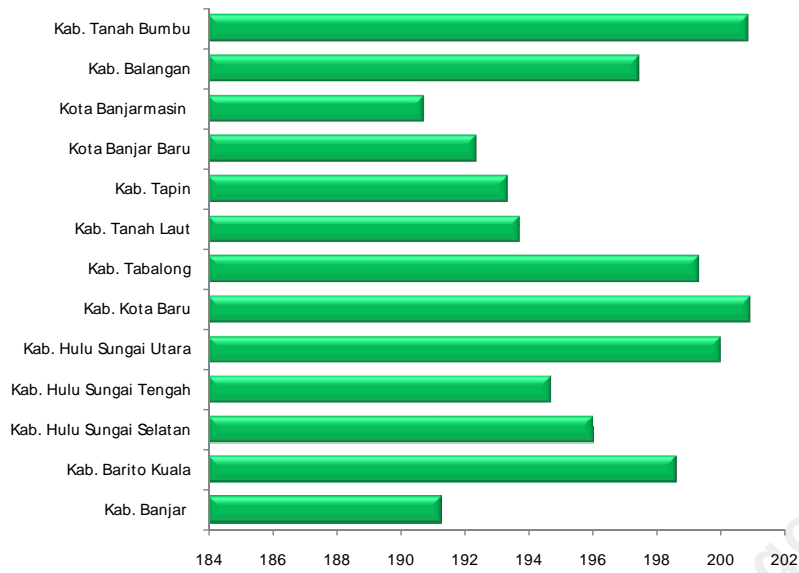
**Grafik 19.a. PDRB per Kapita
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007**



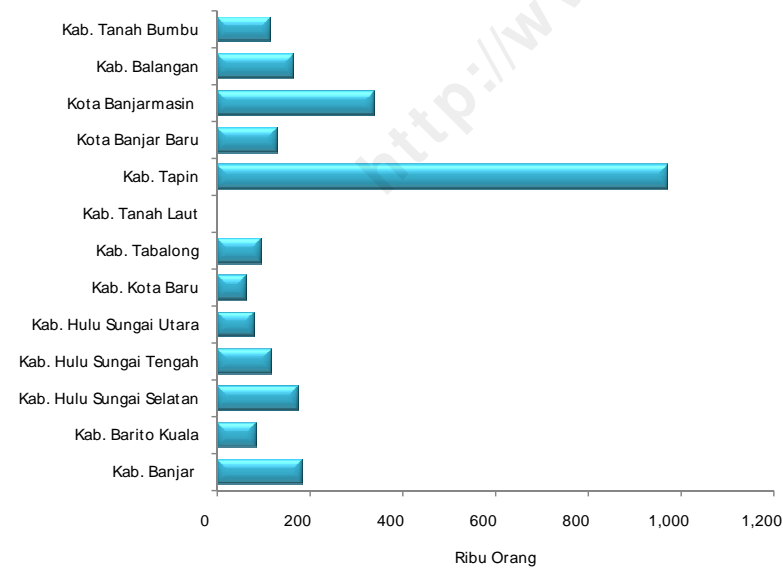
**Grafik 19.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007**



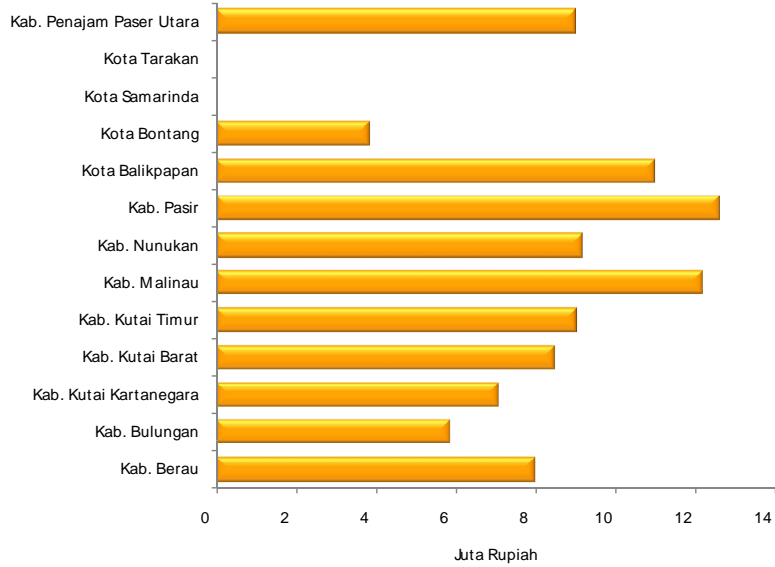
**Grafik 19.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Kalimantan Selatan**



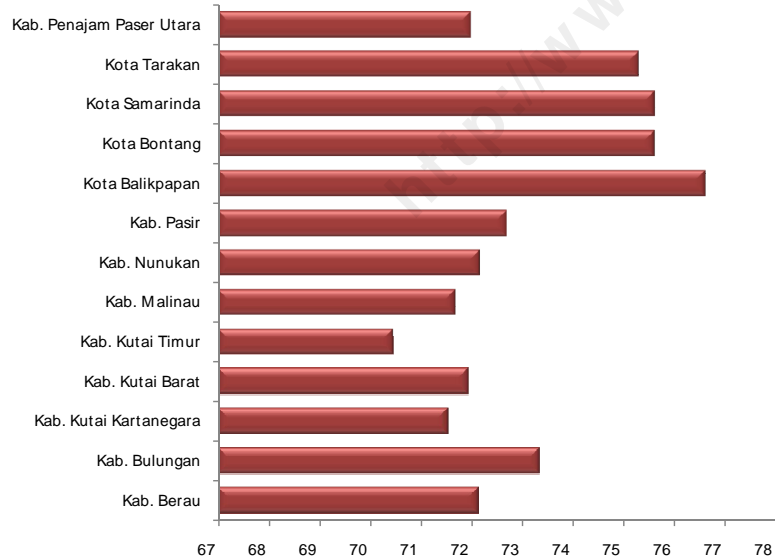
**Grafik 19.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Kalimantan Selatan**



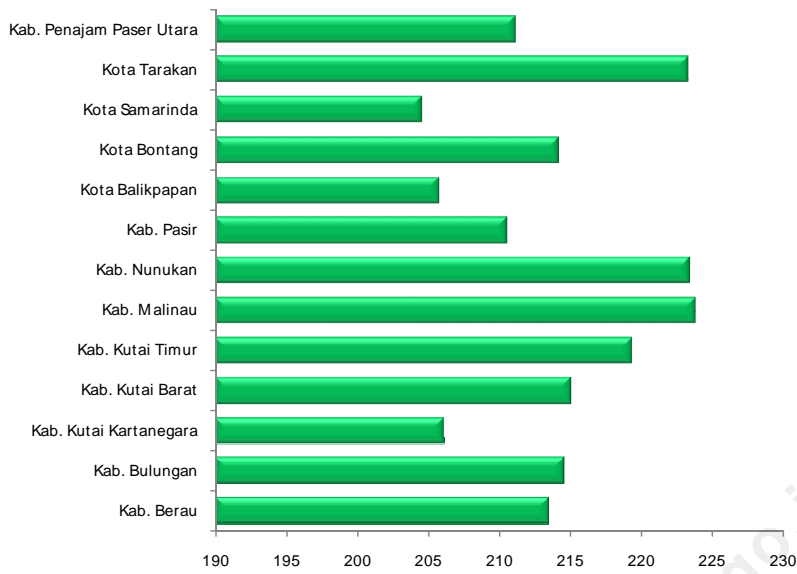
**Grafik 20.a. PDRB per Kapita
Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2007**



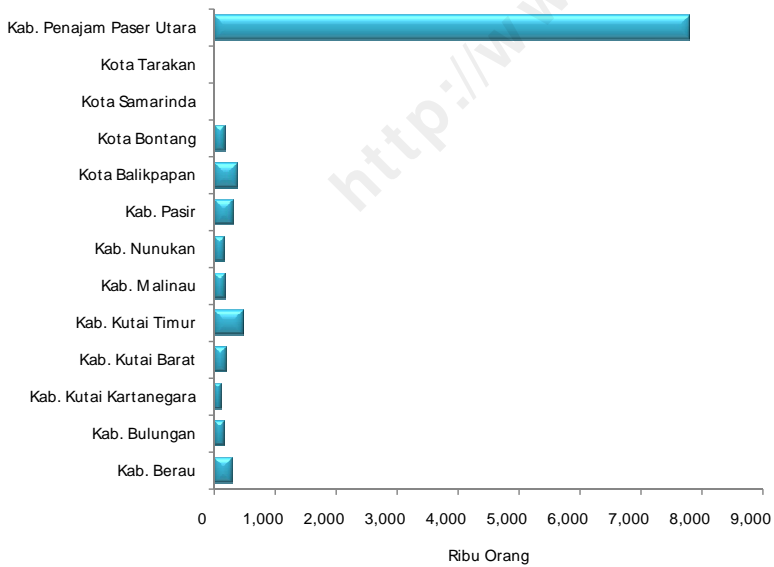
**Grafik 20.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2007**



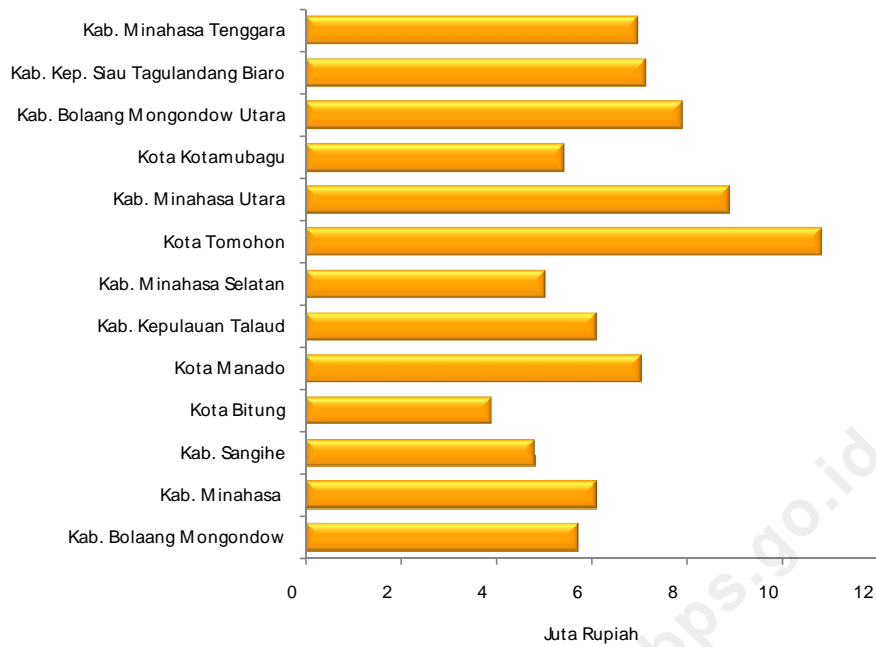
**Grafik 20.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Kalimantan Timur**



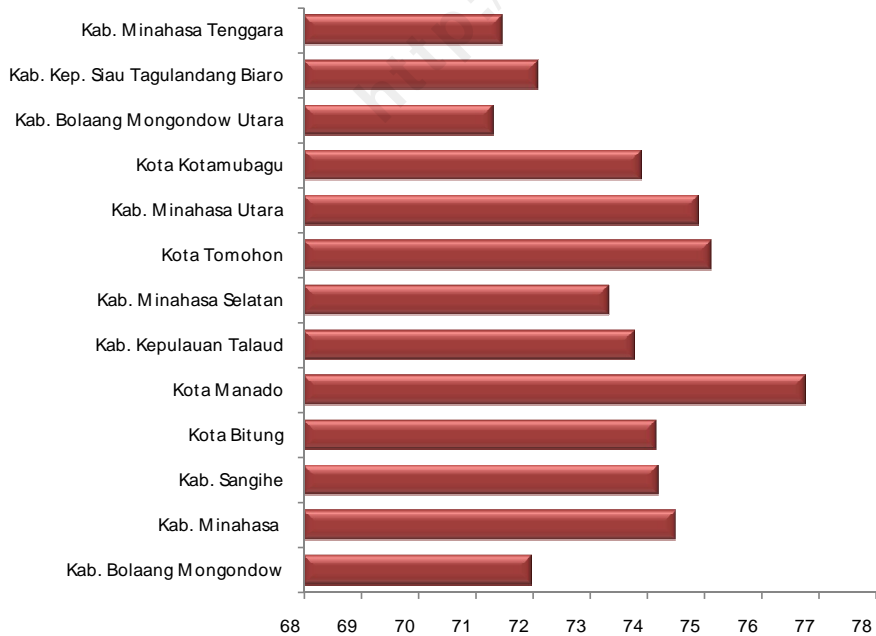
**Grafik 20.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Kalimantan Selatan**



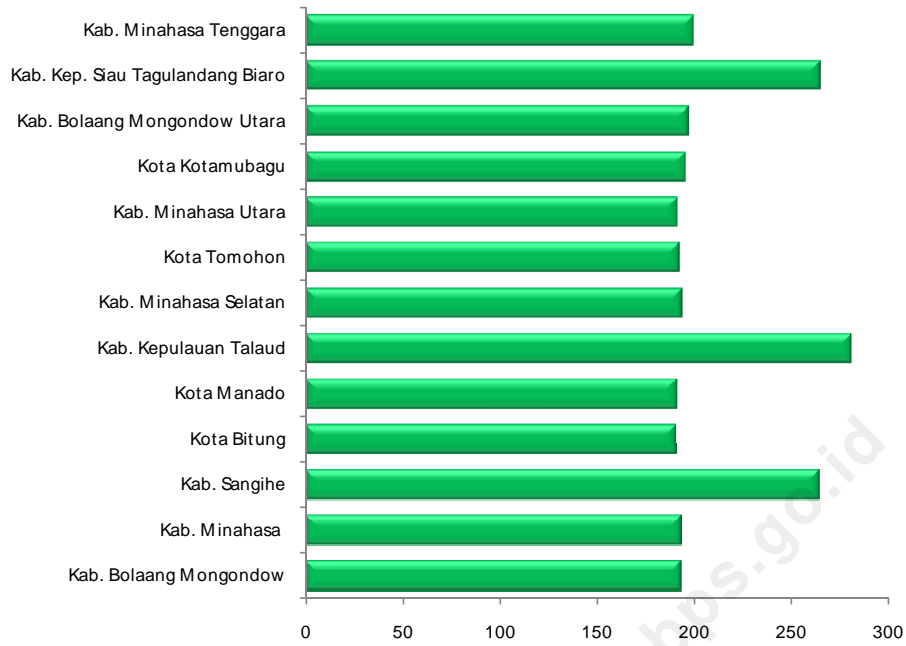
**Grafik 21.a. PDRB per Kapita
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007**



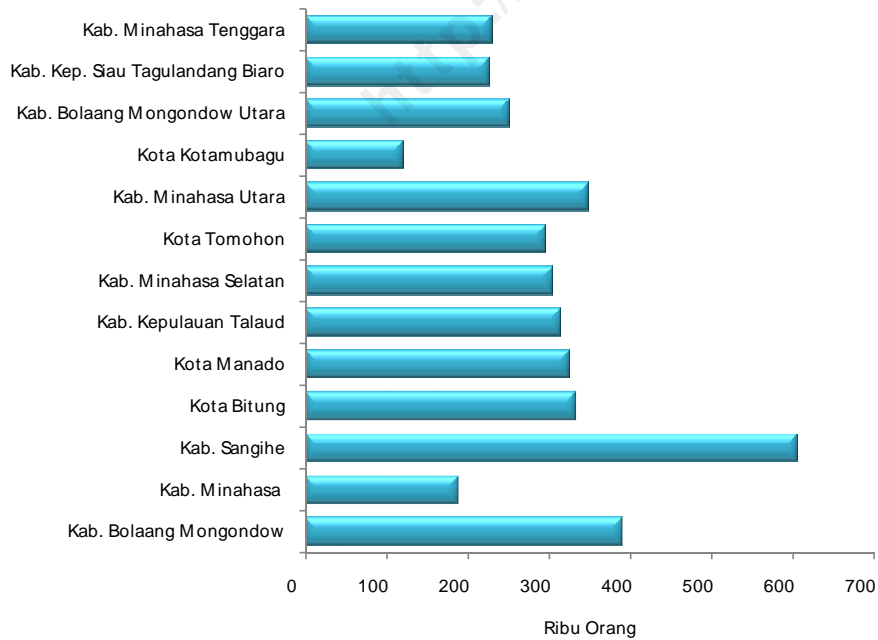
**Grafik 21.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2007**



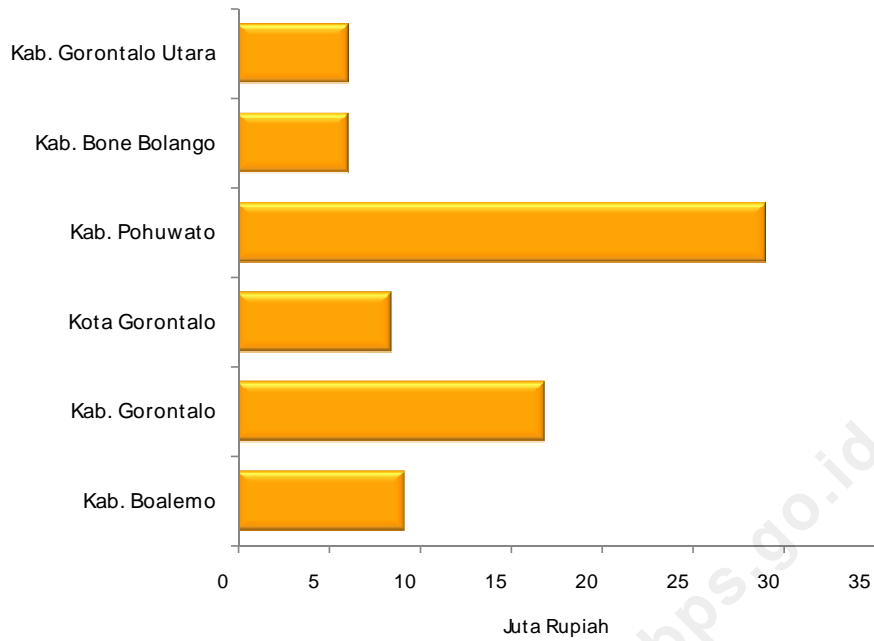
**Grafik 21.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Sulawesi Utara**



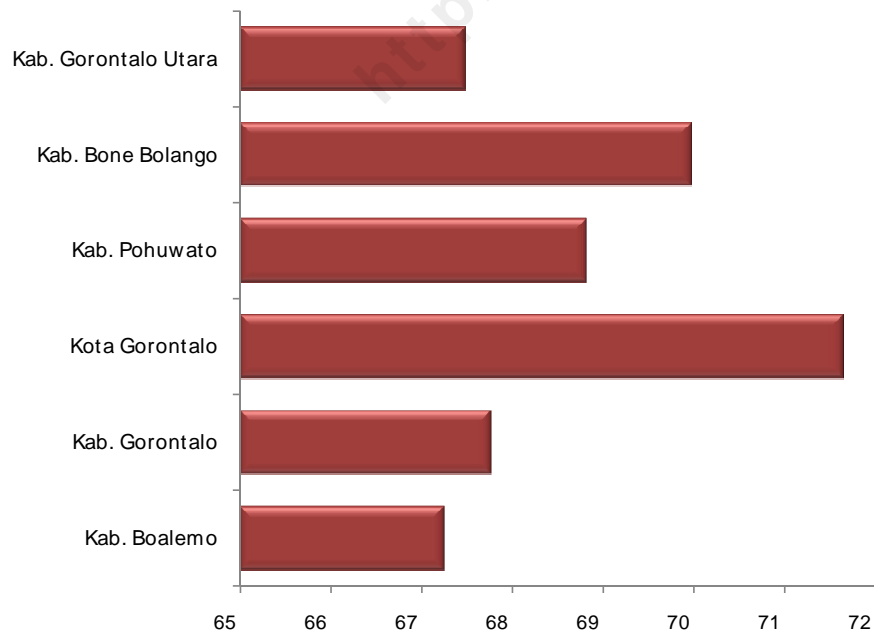
**Grafik 21.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Sulawesi Utara**



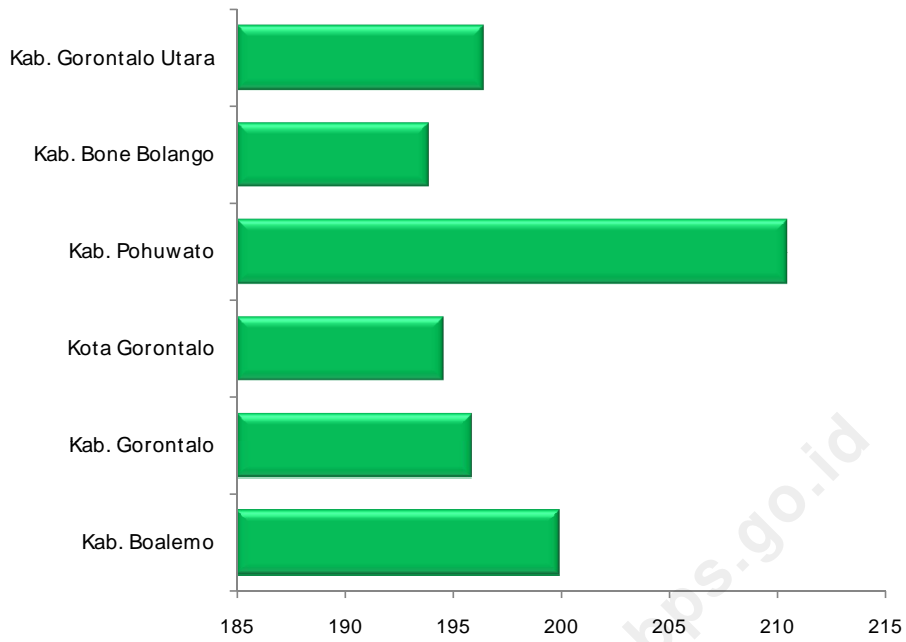
**Grafik 22.a. PDRB per Kapita
Provinsi Gorontalo Tahun 2007**



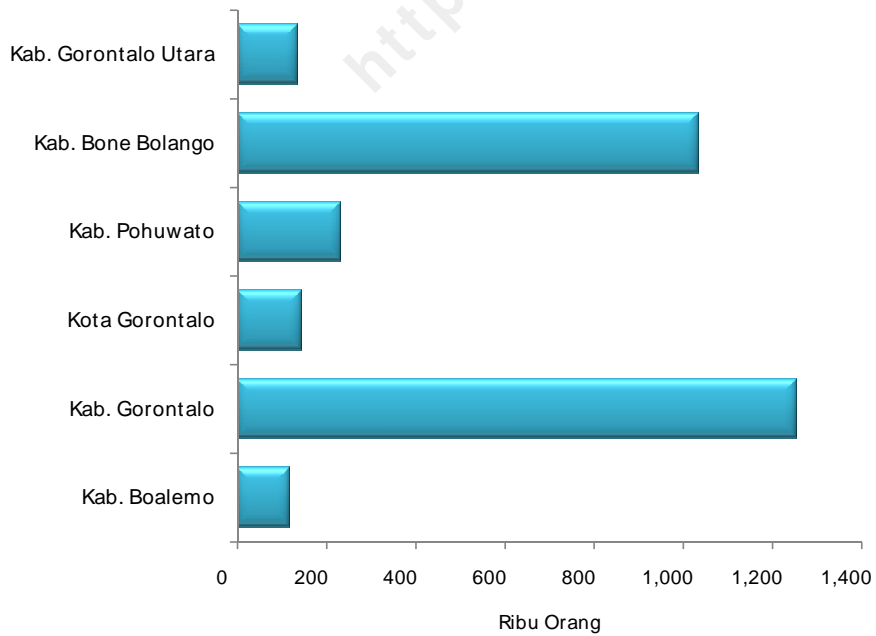
**Grafik 5.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Gorontalo Tahun 2007**



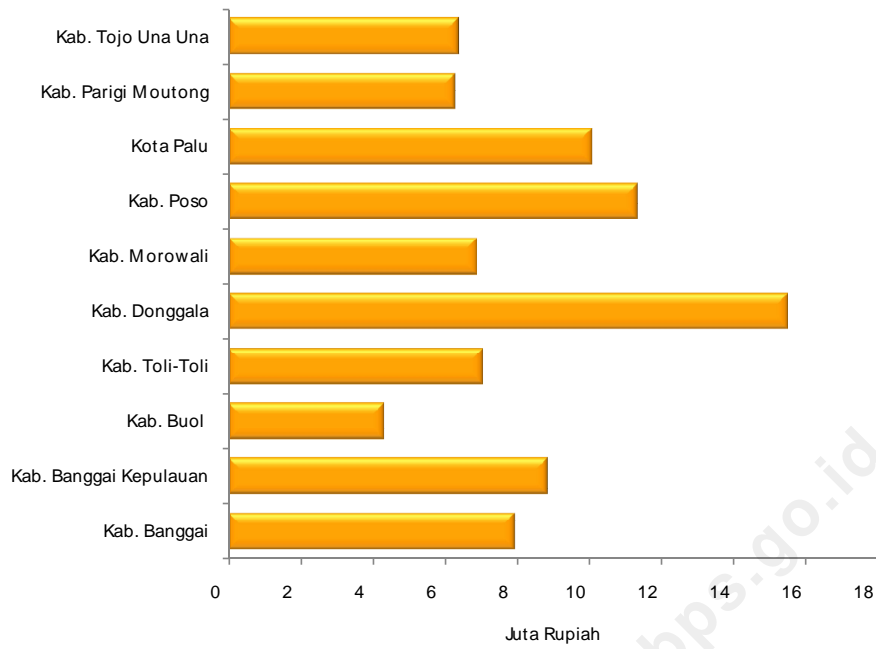
**Grafik 5.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Gorontalo**



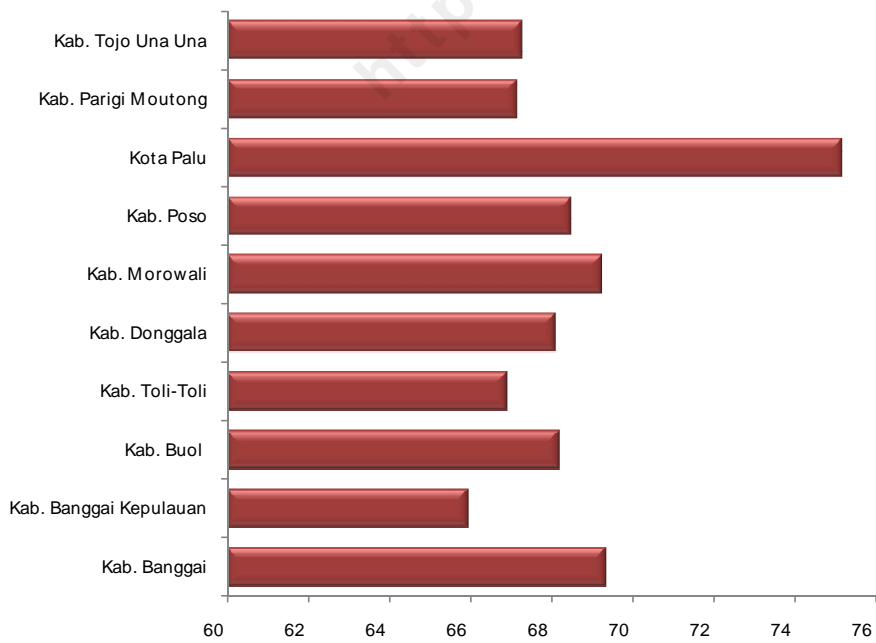
**Grafik 5.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Gorontalo**



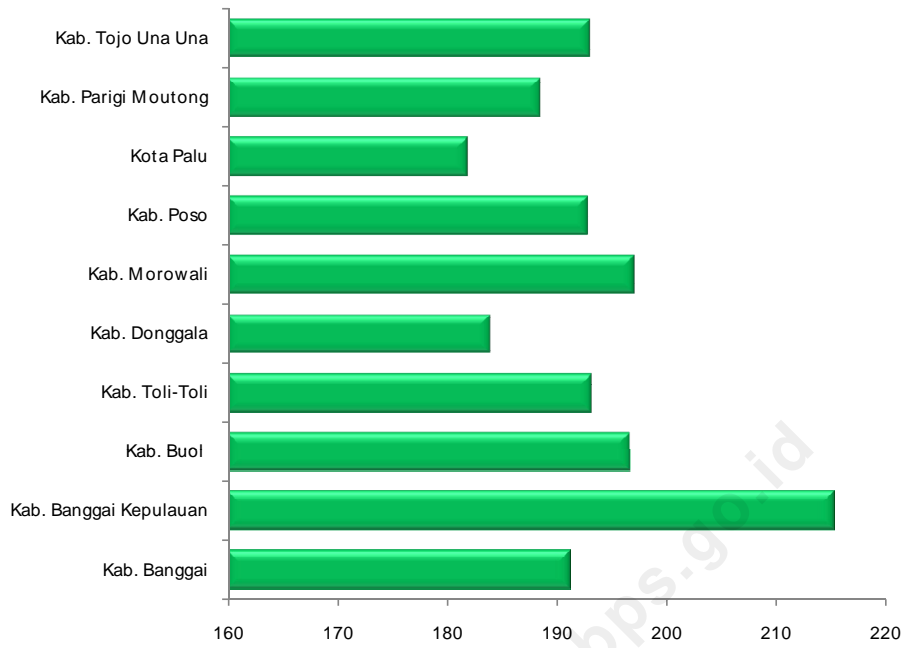
**Grafik 23.a. PDRB per Kapita
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007**



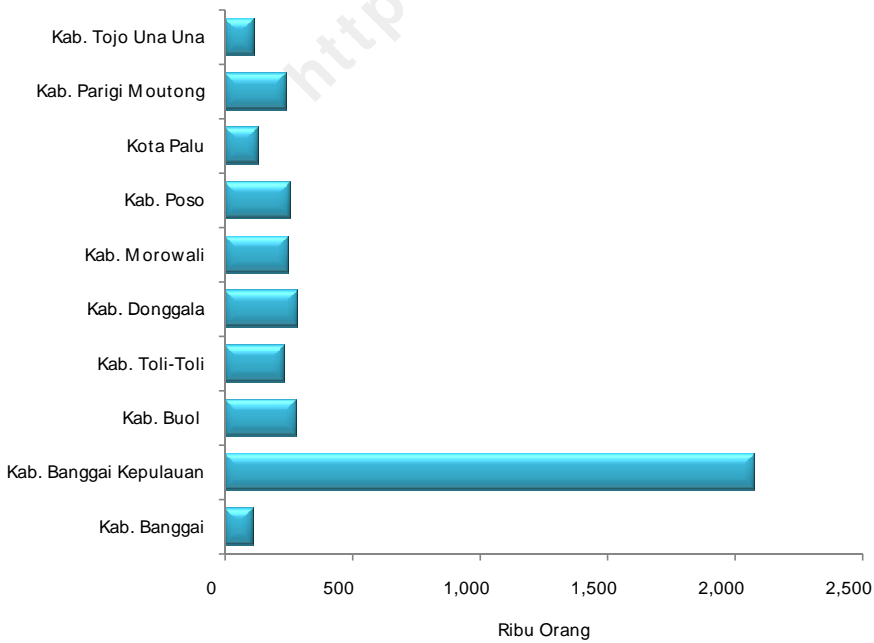
**Grafik 23.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2007**



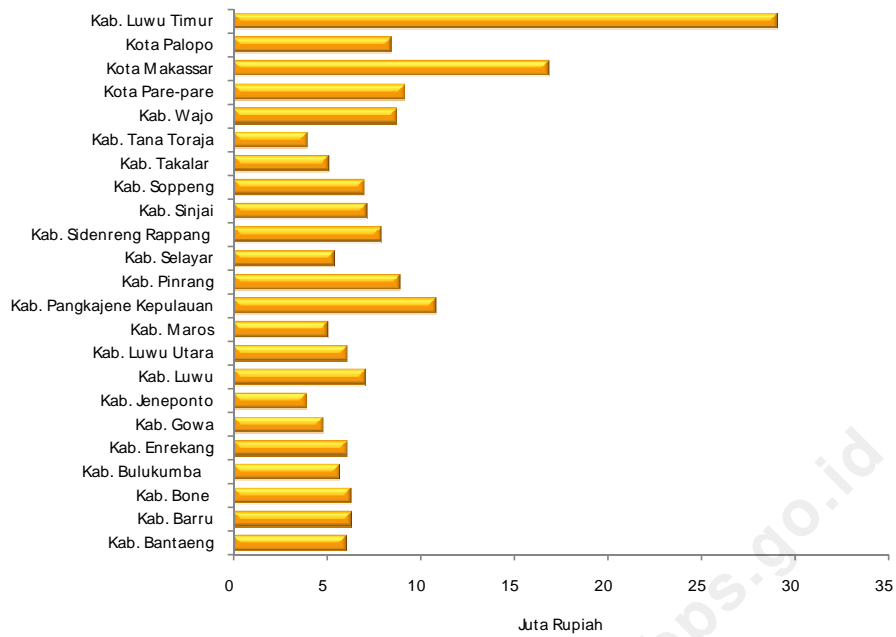
**Grafik 23.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Sulawesi Tengah**



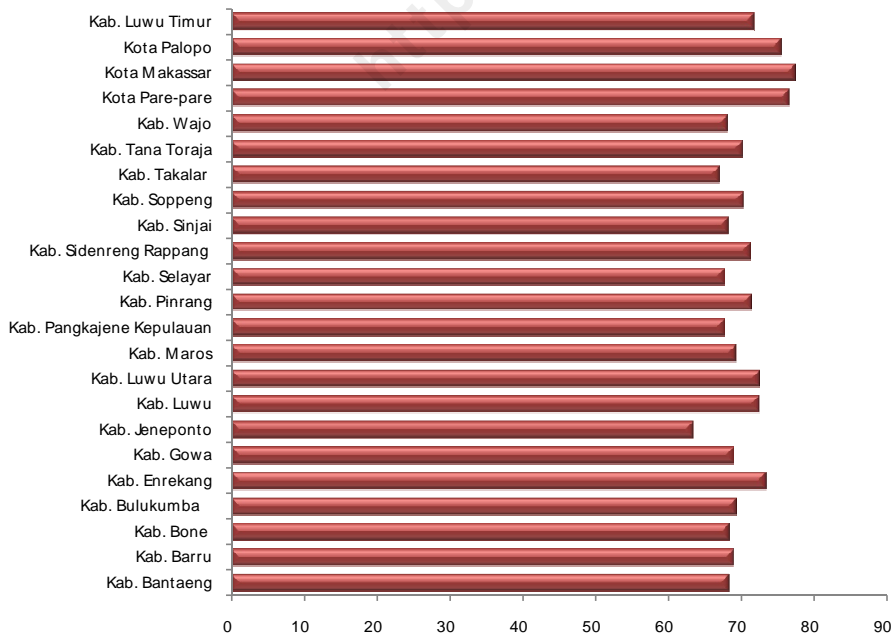
**Grafik 23.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Sulawesi Tengah**



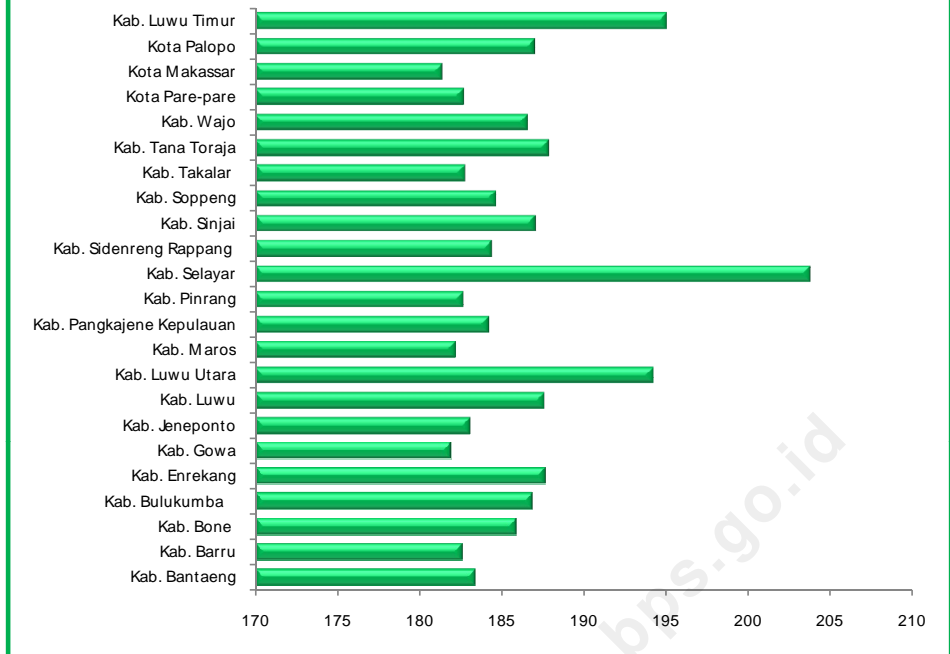
**Grafik 24.a. PDRB per Kapita
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007**



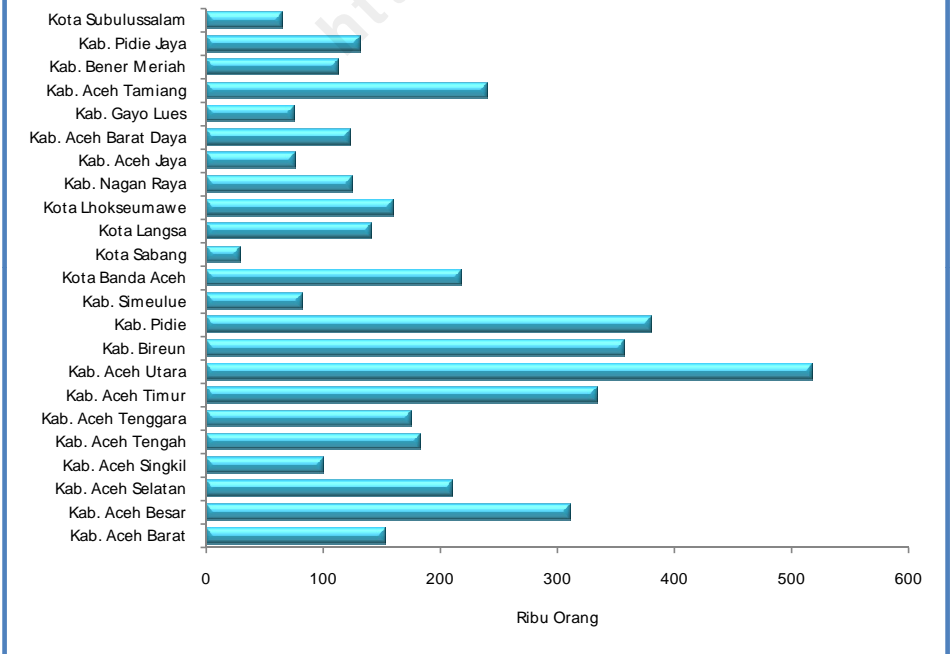
**Grafik 24.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2007**



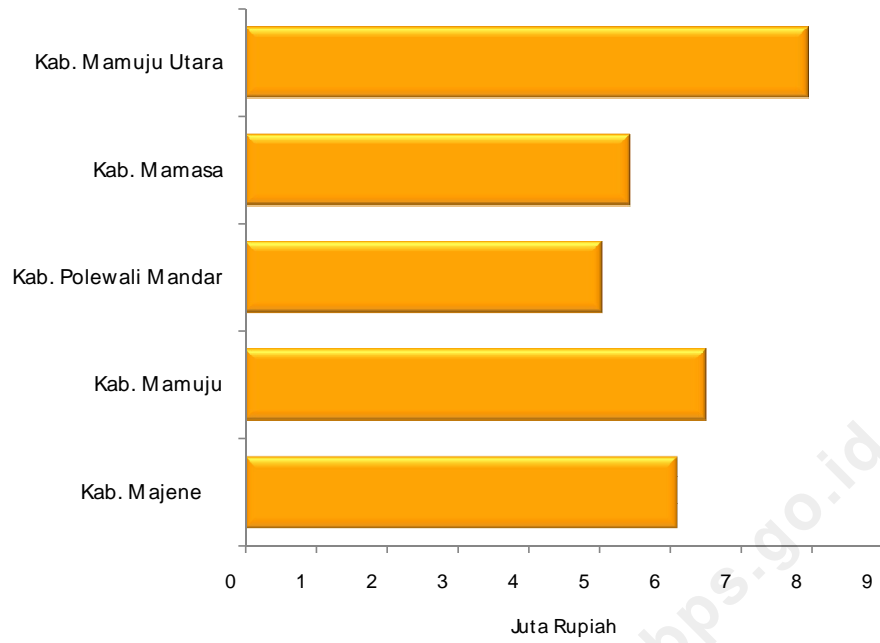
**Grafik 24.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Sulawesi Selatan**



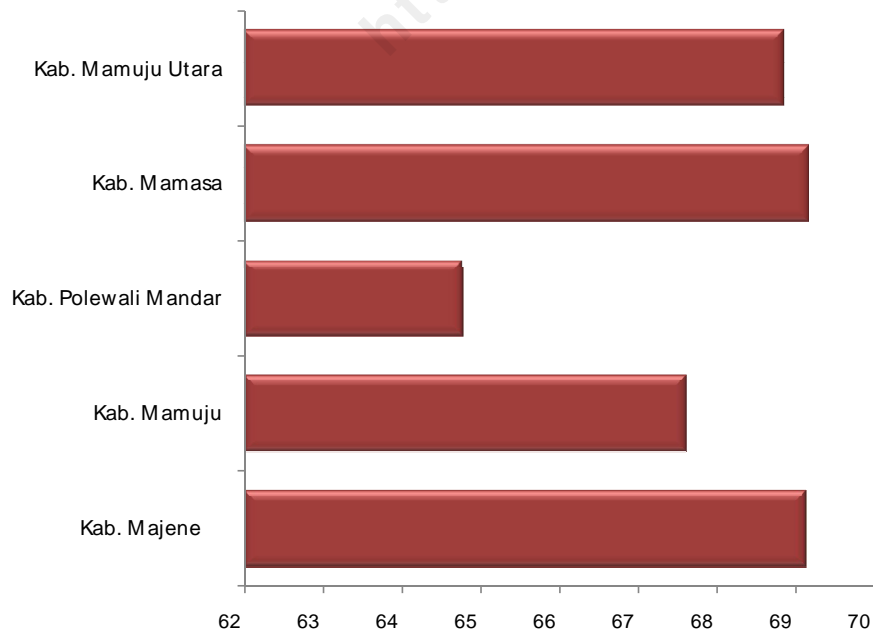
**Grafik 24.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Sulawesi Selatan**



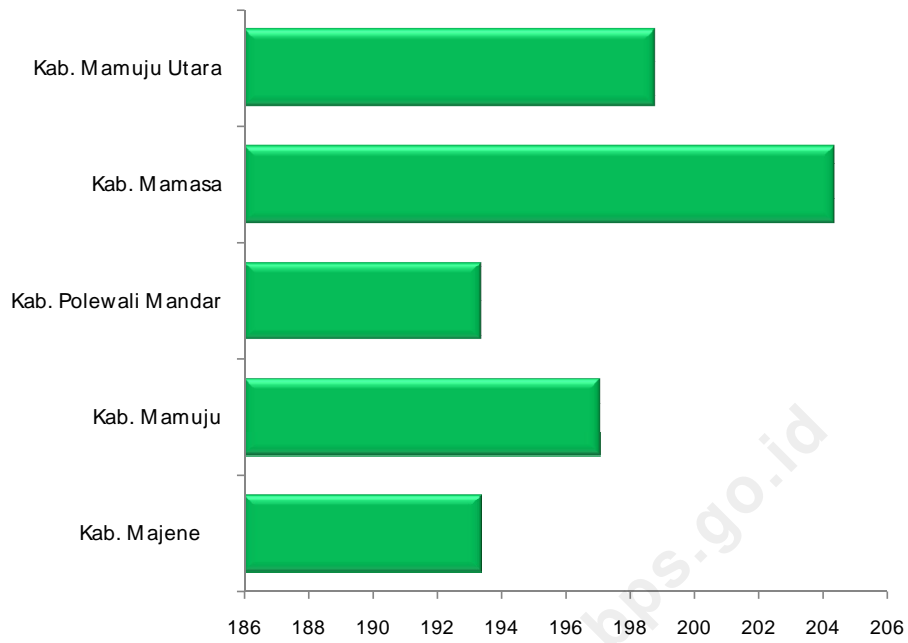
**Grafik 25.a. PDRB per Kapita
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007**



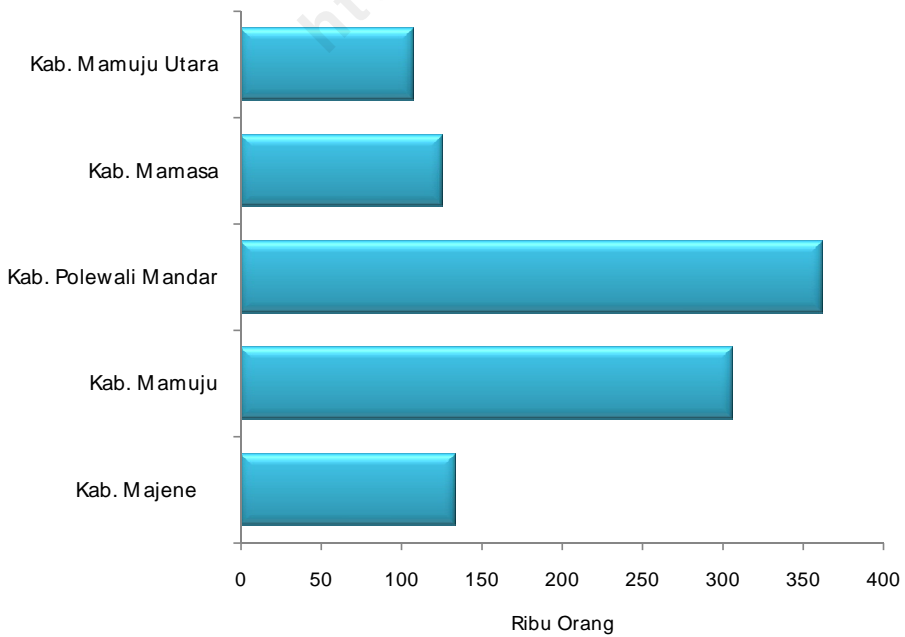
**Grafik 25.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2007**



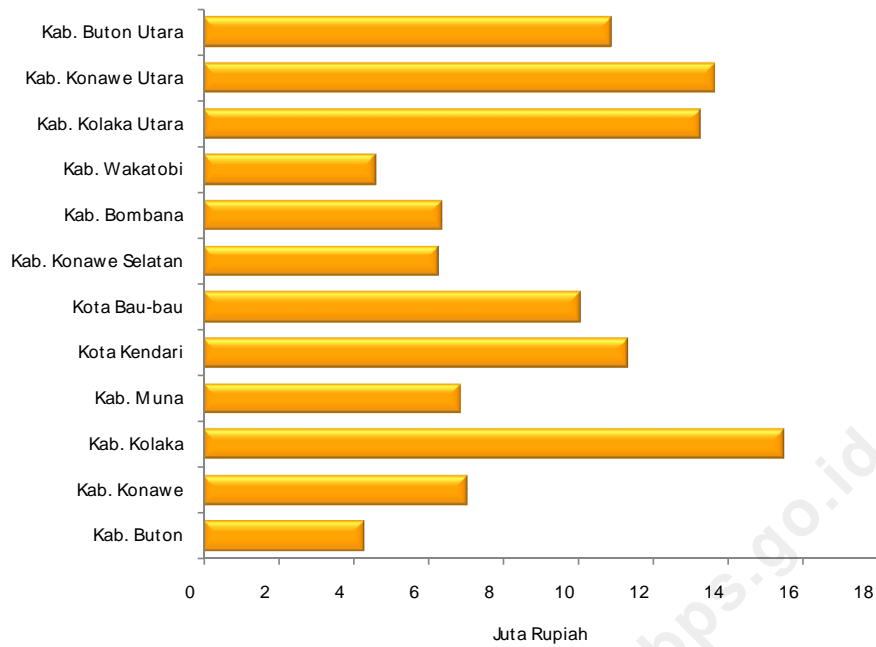
**Grafik 25.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Sulawesi Barat**



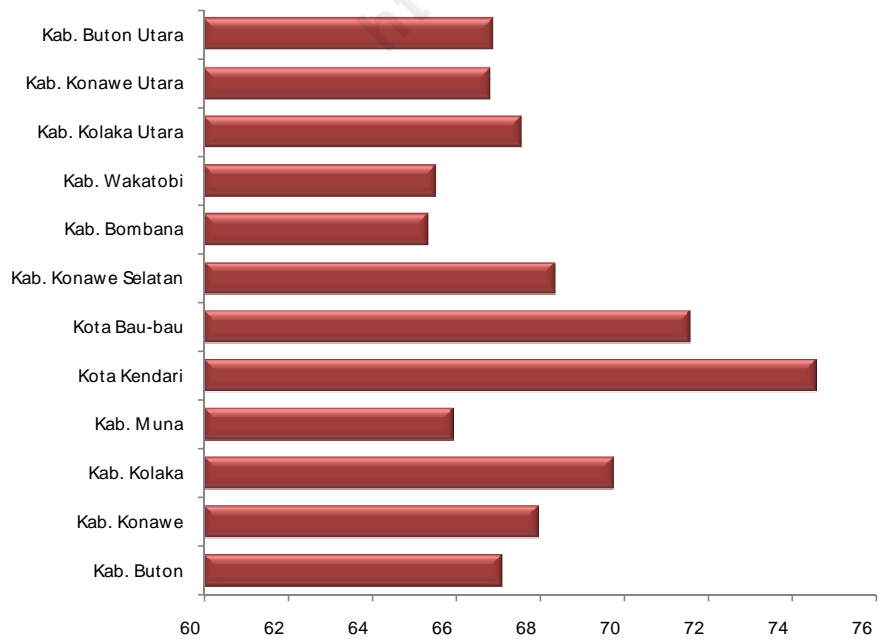
**Grafik 25.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Sulawesi Barat**



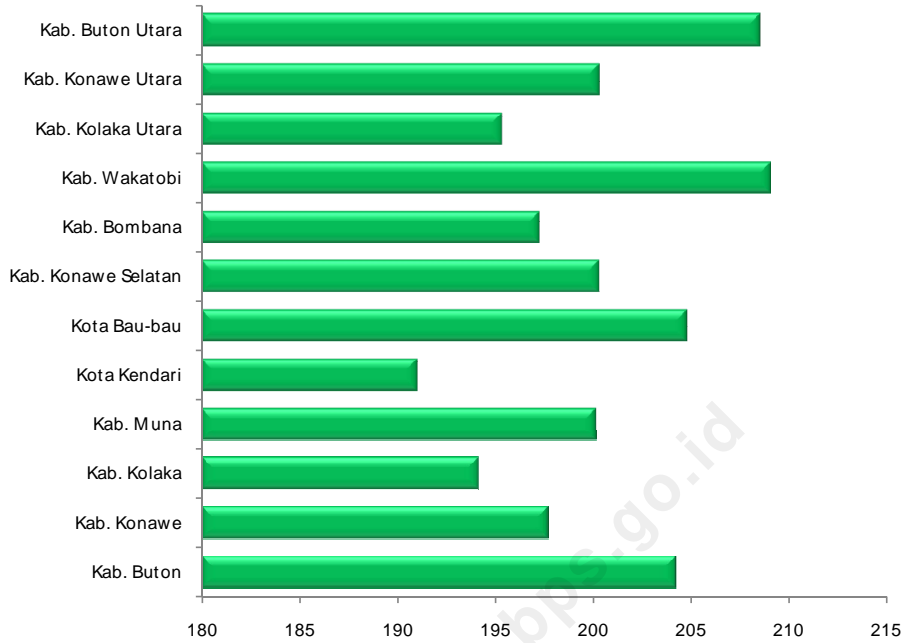
**Grafik 26.a. PDRB per Kapita
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007**



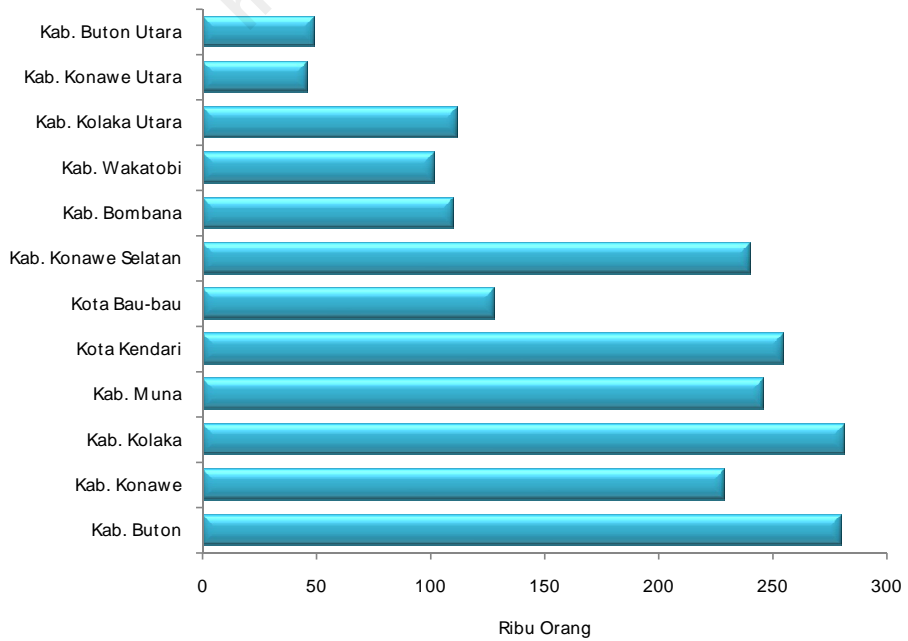
**Grafik 26.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2007**

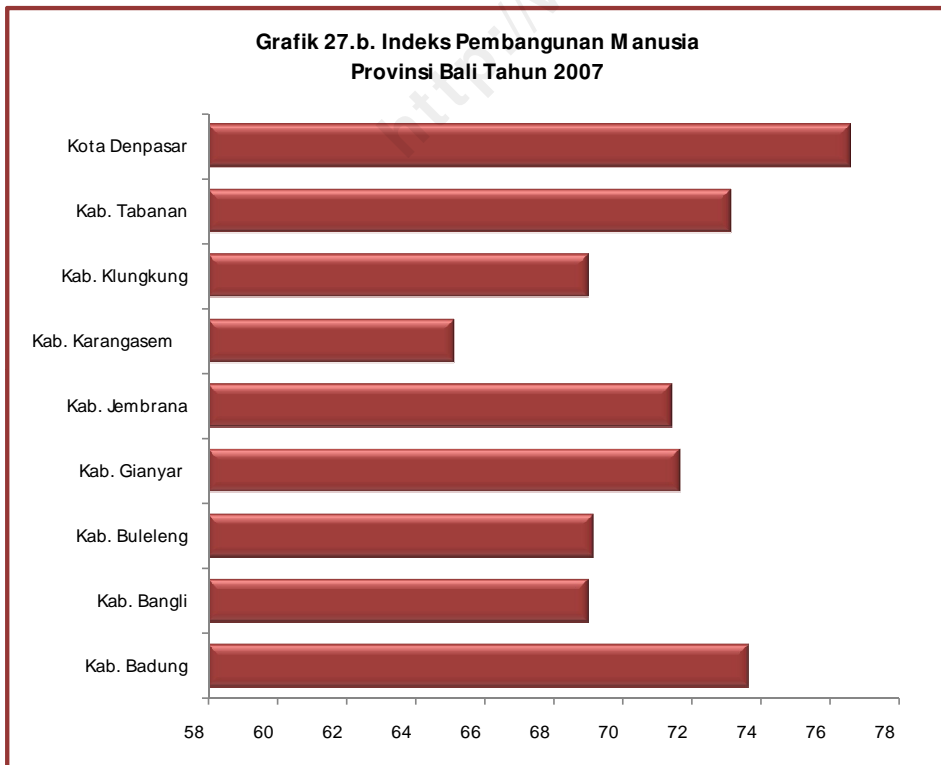
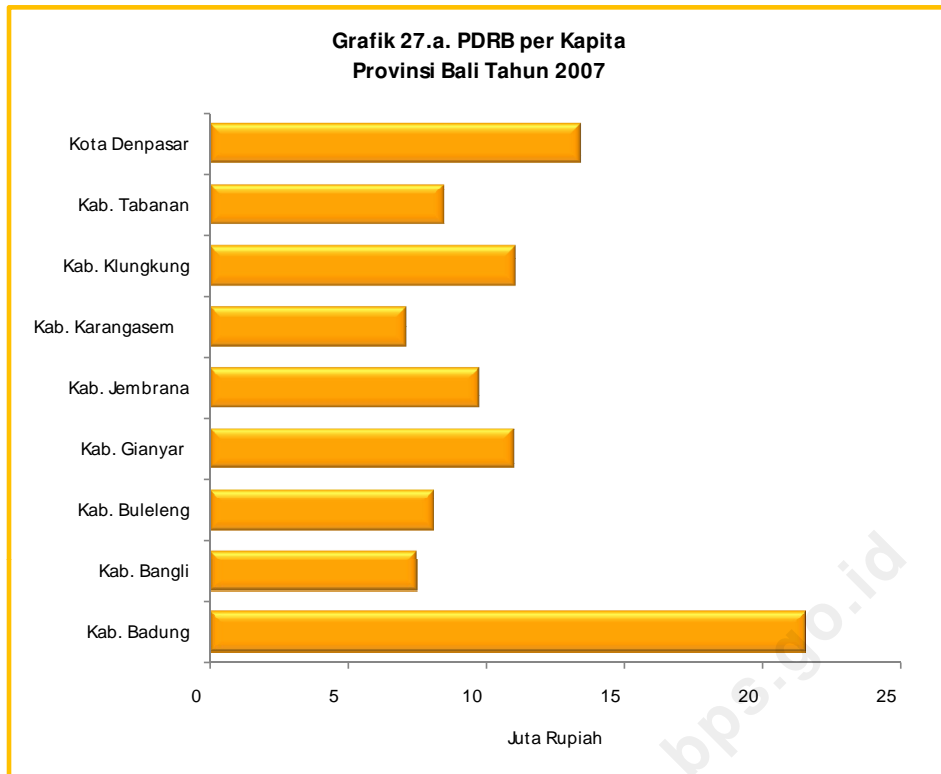


**Grafik 26.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Sulawesi Tenggara**

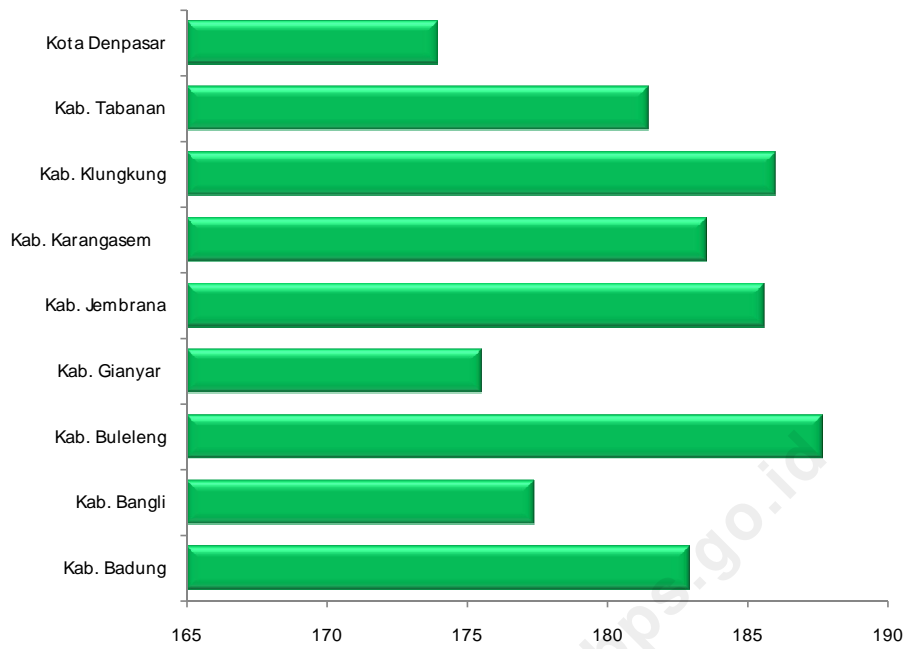


**Grafik 26.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Sulawesi Tenggara**

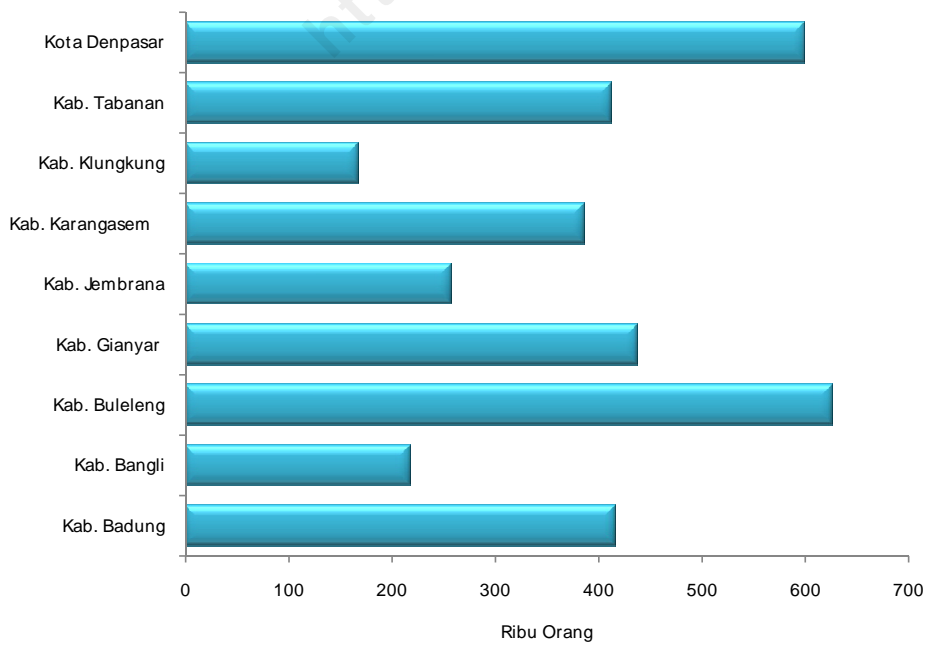




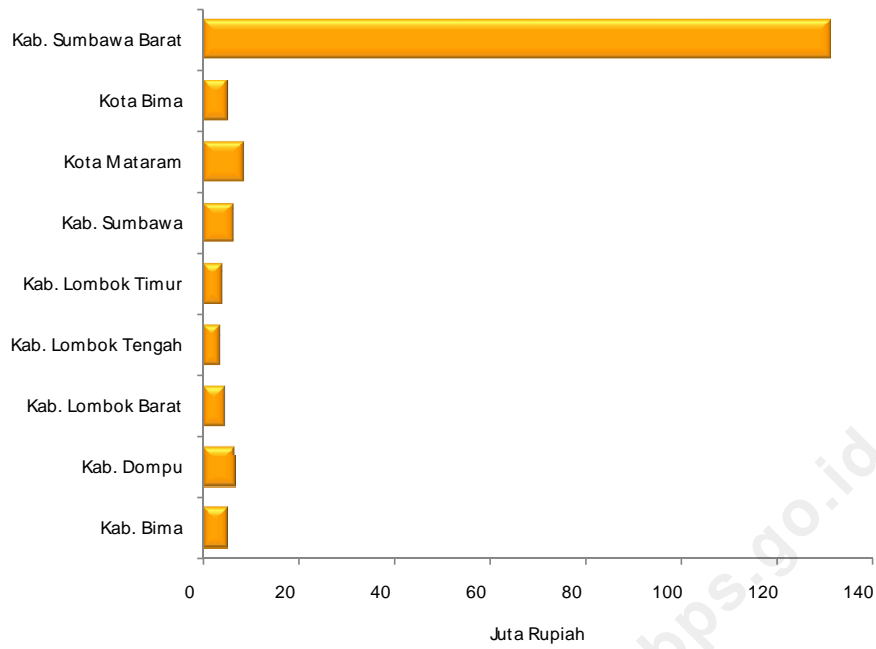
**Grafik 27.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Bali**



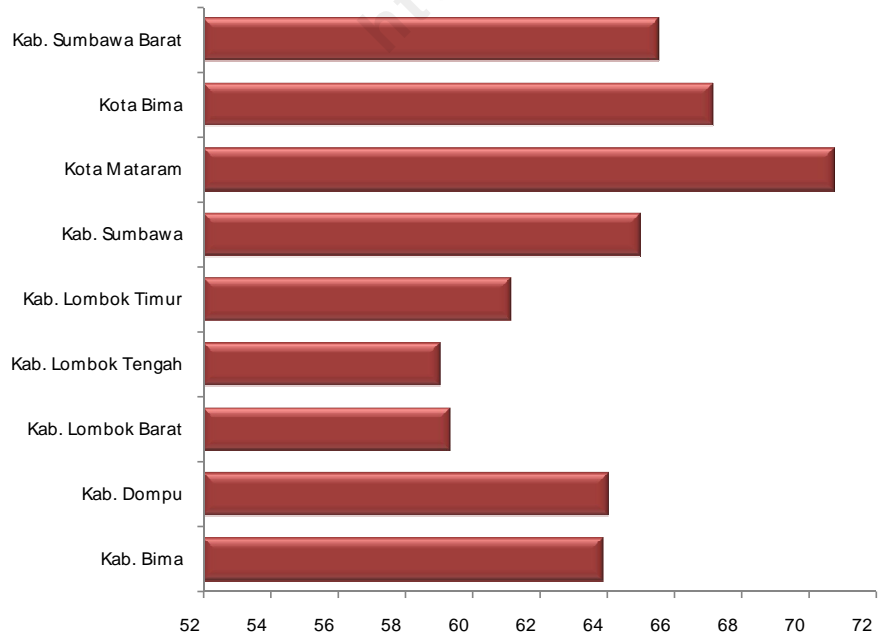
**Grafik 27.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Bali**



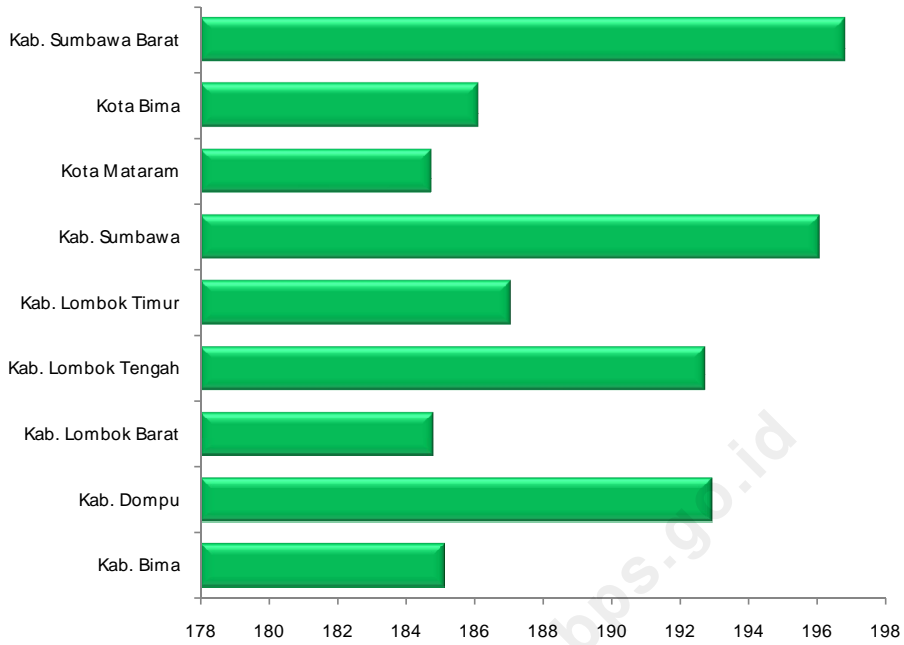
**Grafik 28.a. PDRB per Kapita
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007**



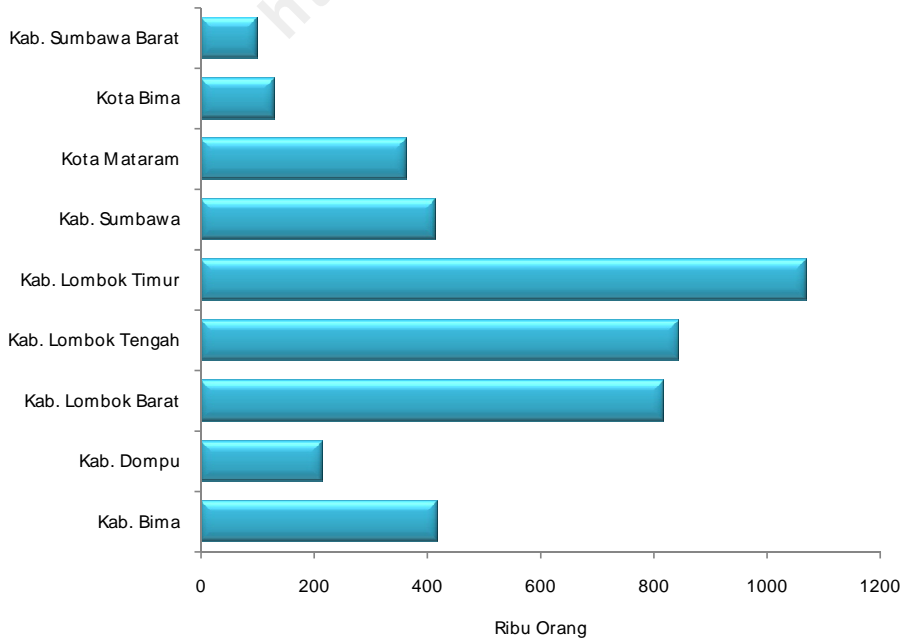
**Grafik 28.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2007**



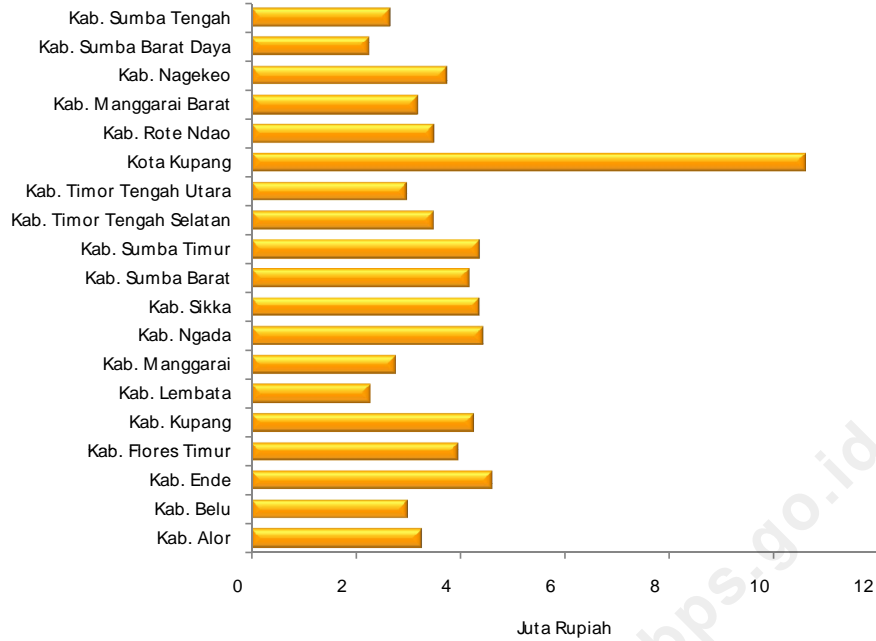
**Grafik 28.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Nusa Tenggara Barat**



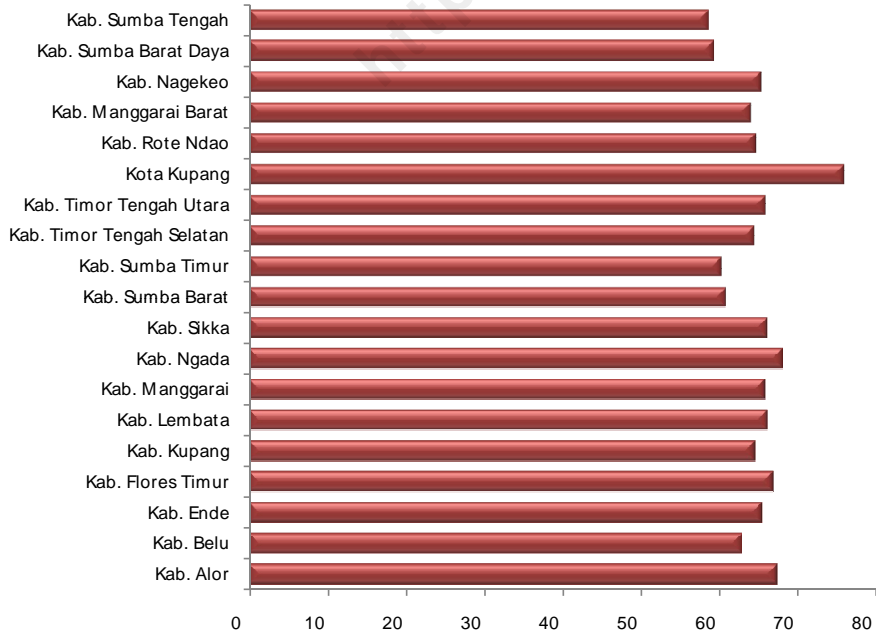
**Grafik 28.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Nusa Tenggara Barat**



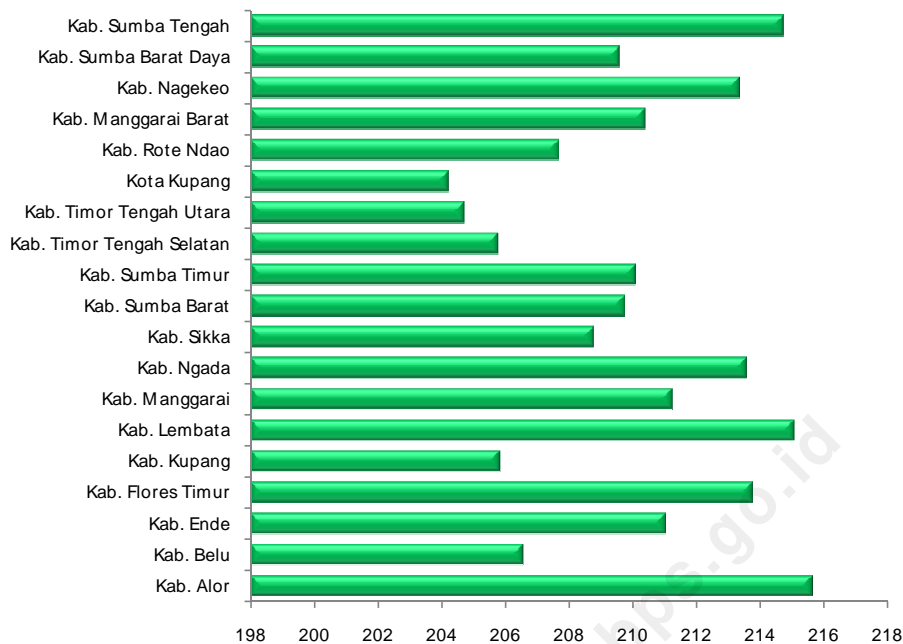
**Grafik 29.a. PDRB per Kapita
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007**



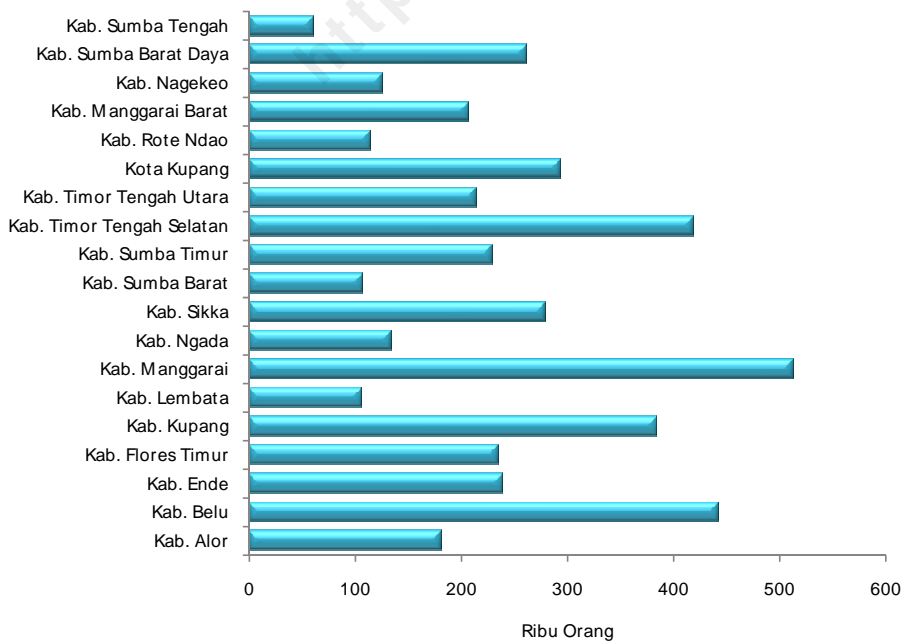
**Grafik 29.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2007**

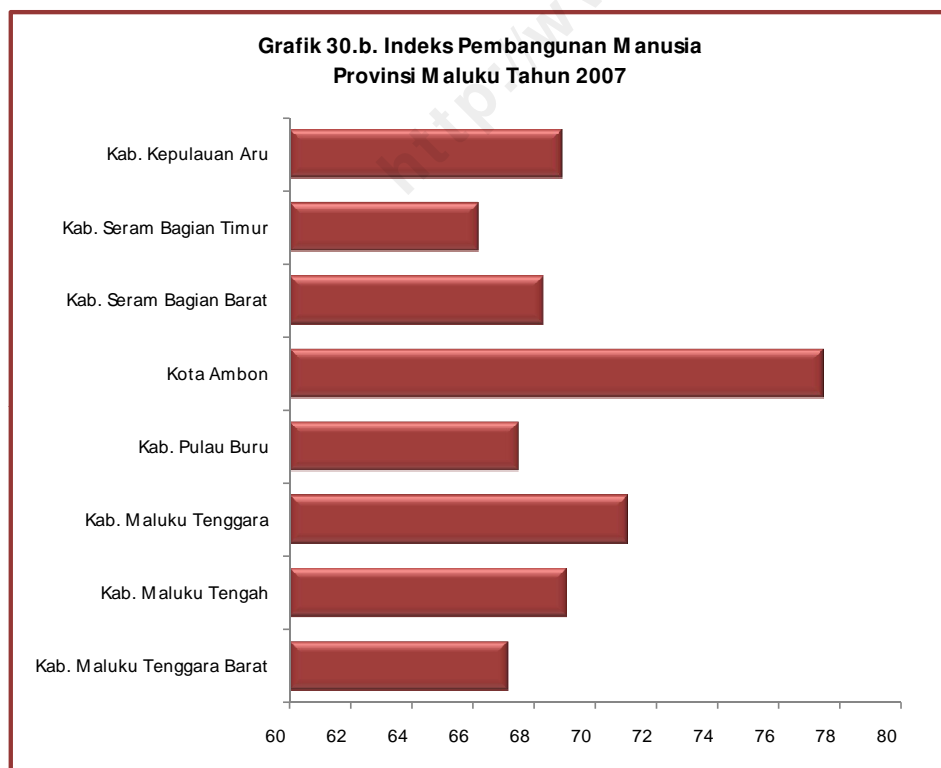
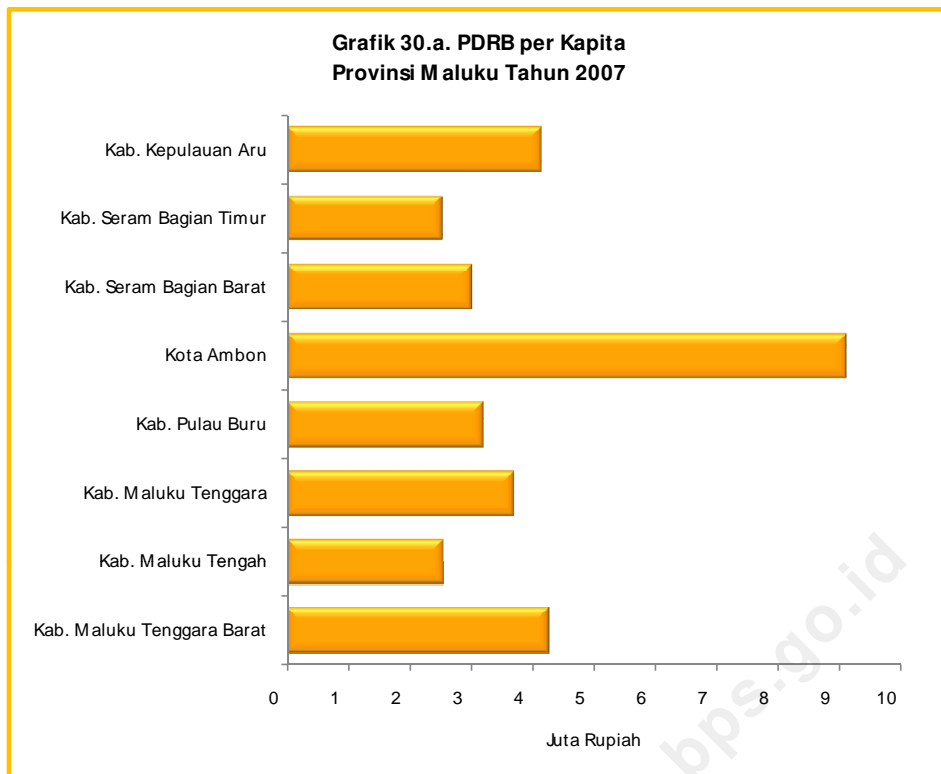


**Grafik 29.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

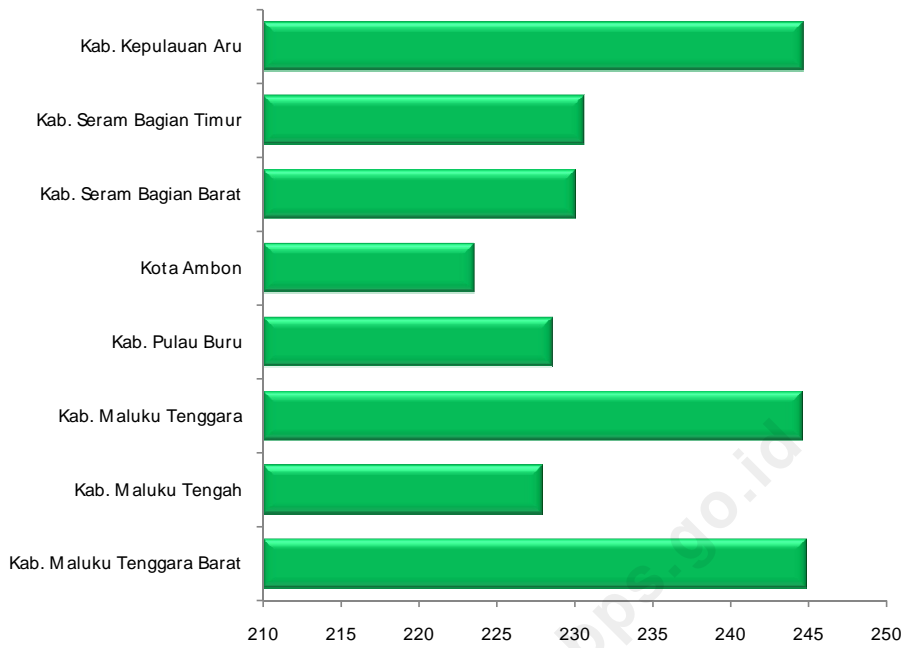


**Grafik 29.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Nusa Tenggara Timur**

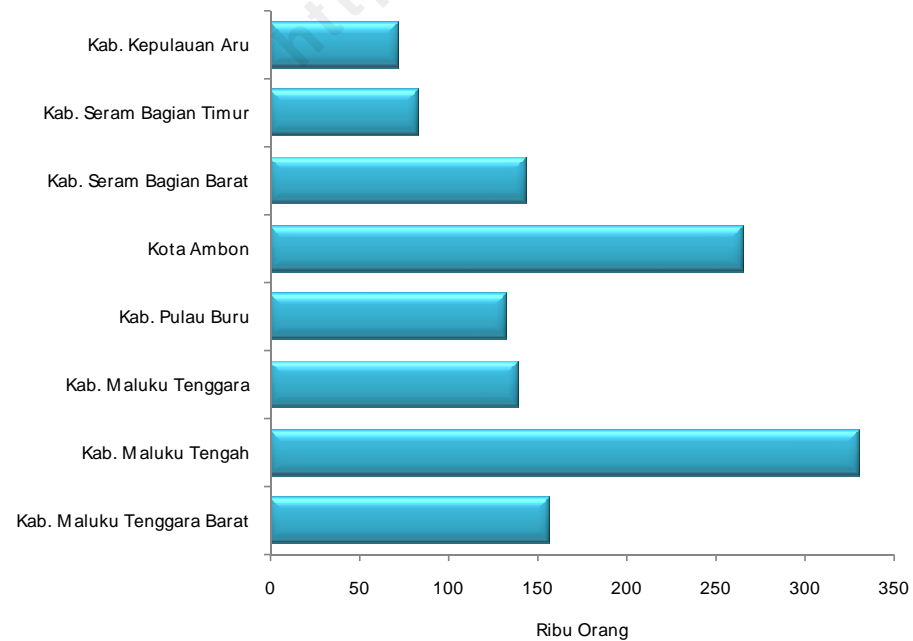




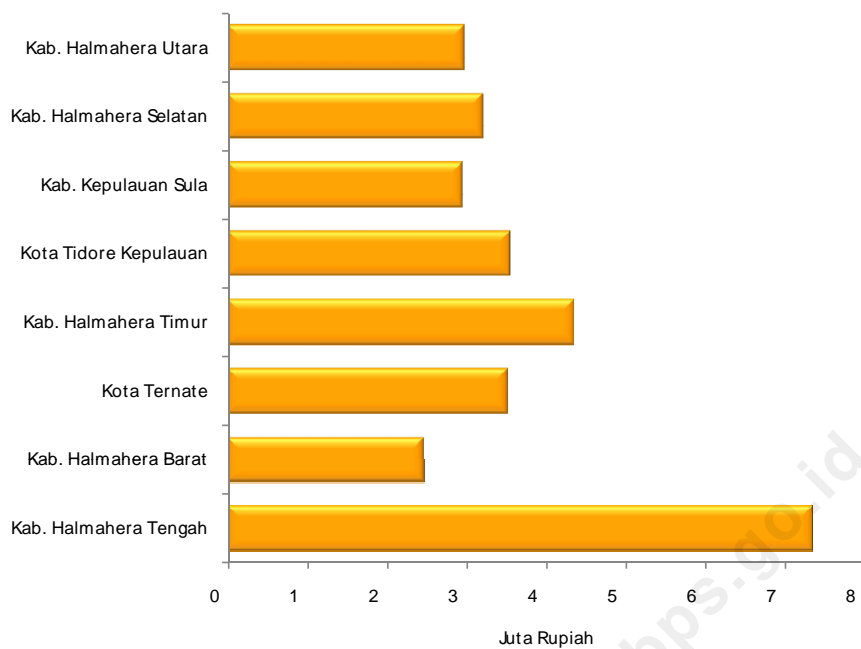
**Grafik 30.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Maluku**



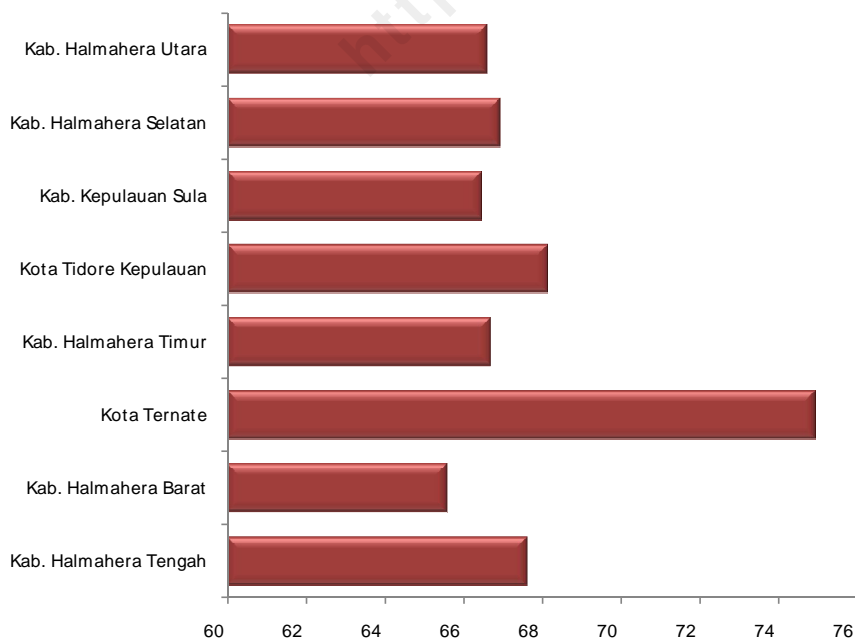
**Grafik 30.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Maluku**



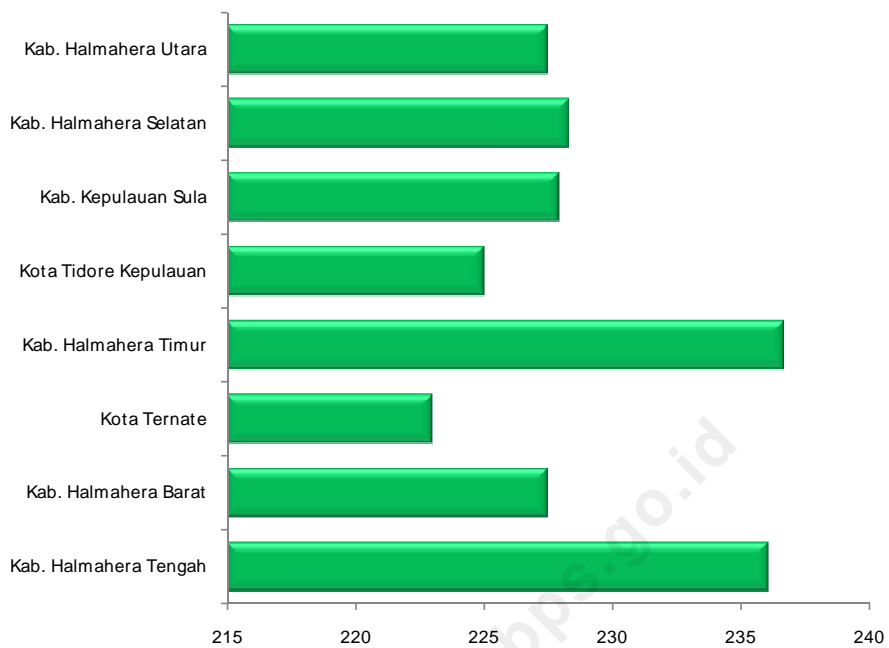
**Grafik 31.a. PDRB per Kapita
Provinsi Maluku Utara Tahun 2007**



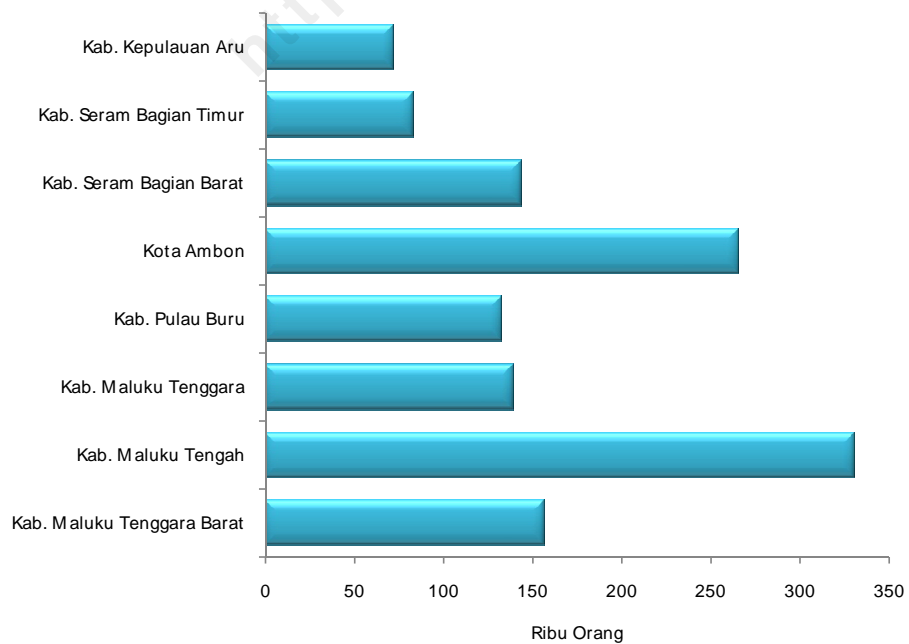
**Grafik 31.b. Indeks Pembangunan M anusia
Provinsi Maluku Utara Tahun 2007**



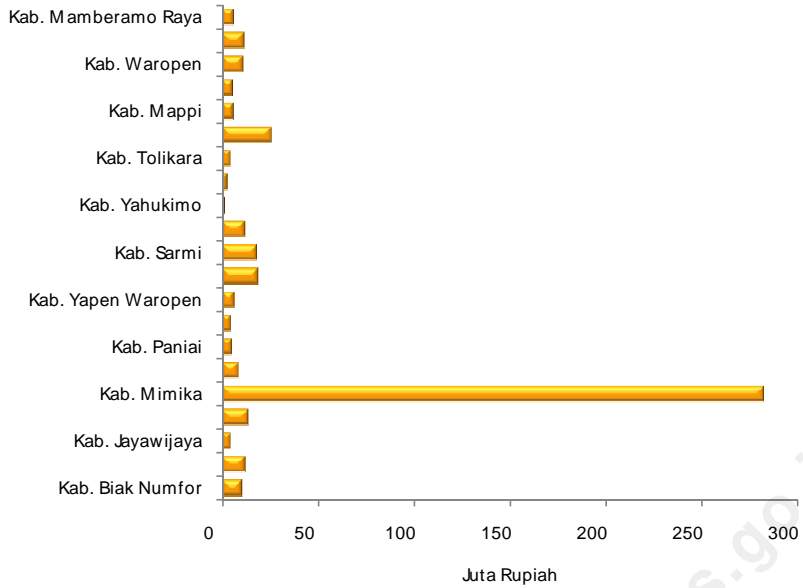
**Grafik 31.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Maluku Utara**



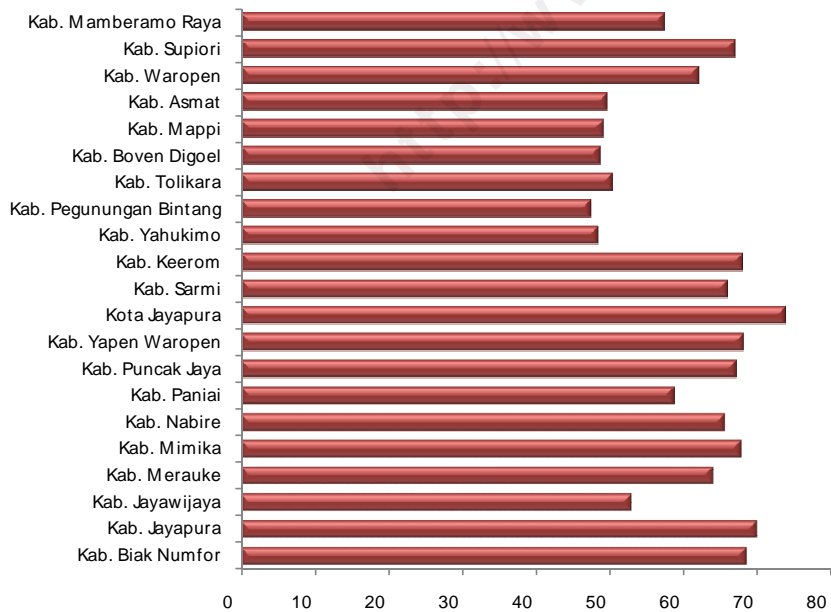
**Grafik 31.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Maluku Utara**



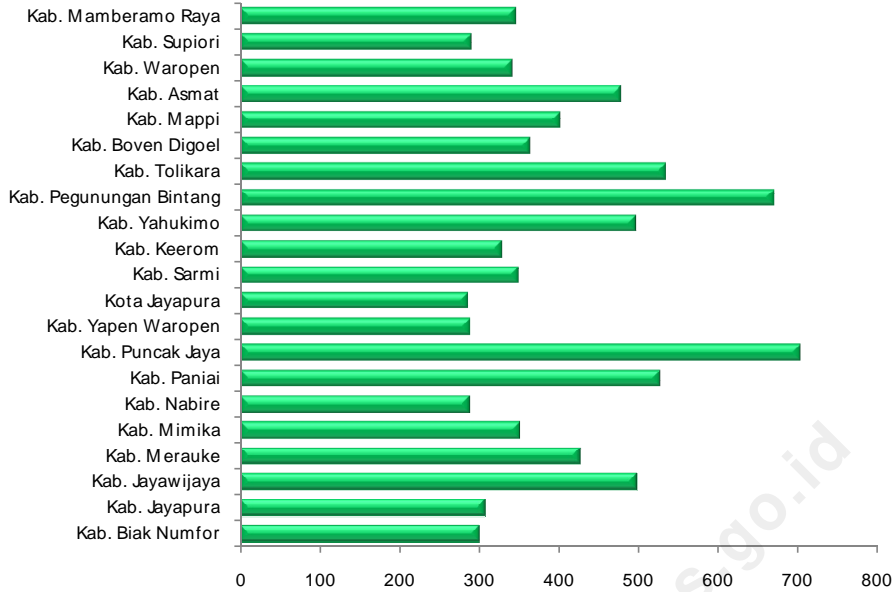
**Grafik 32.a. PDRB per Kapita
Provinsi Papua Tahun 2007**



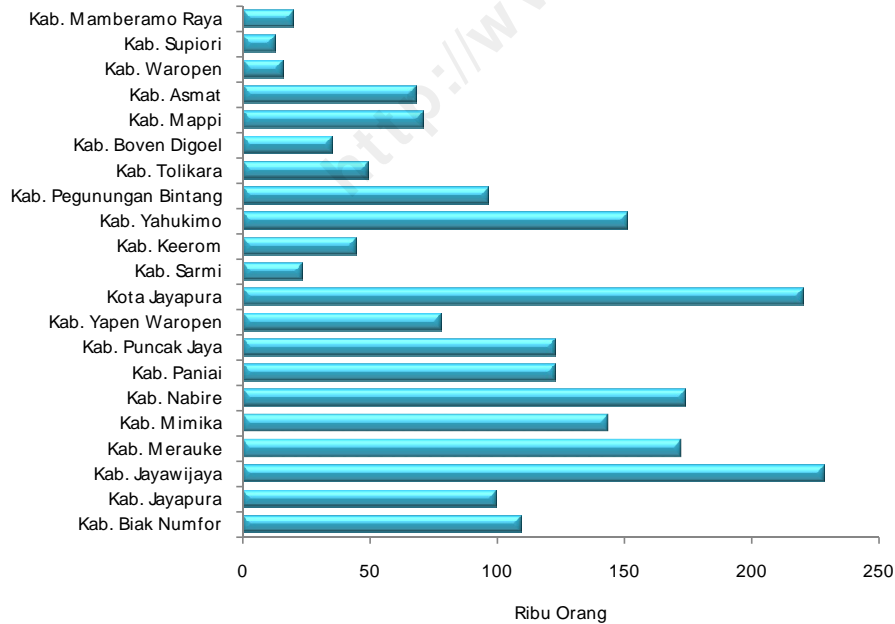
**Grafik 32.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Papua Tahun 2007**



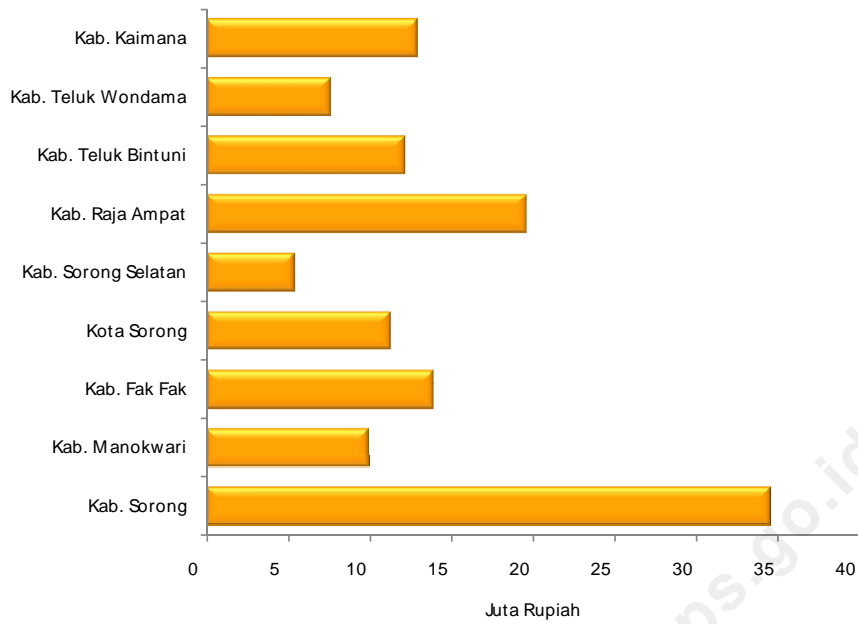
**Grafik 32.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Papua**



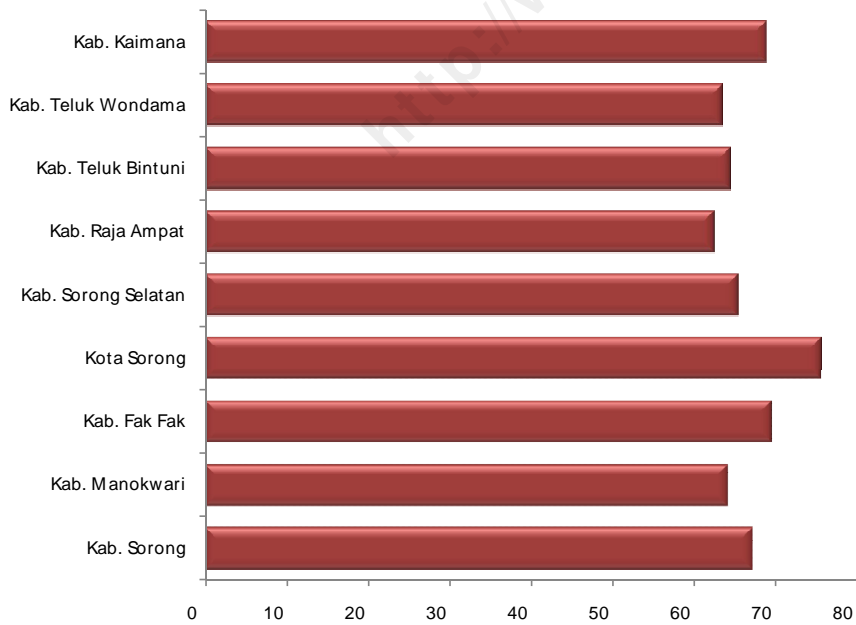
**Grafik 32.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Papua**



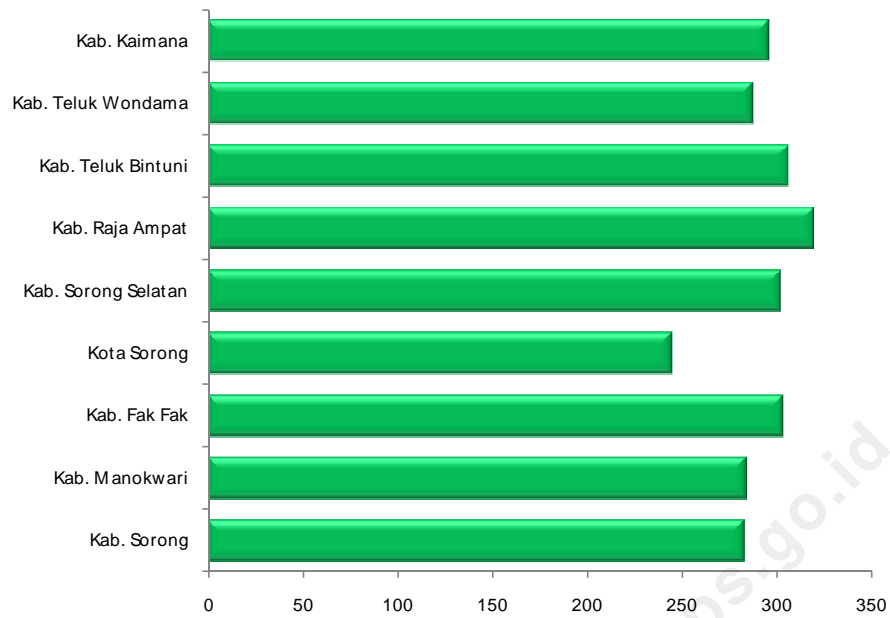
**Grafik 33.a. PDRB per Kapita
Provinsi Papua Barat Tahun 2007**



**Grafik 33.b. Indeks Pembangunan Manusia
Provinsi Papua Barat Tahun 2007**



**Grafik 33.c. Indeks Kemahalan Konstruksi Tahun 2008
Provinsi Papua Barat**



**Grafik 33.d. Jumlah Penduduk Pertengahan Tahun 2008
Provinsi Papua Barat**

